

# LAPORAN TAHUNAN

---

DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2015

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN

## KATA PENGANTAR

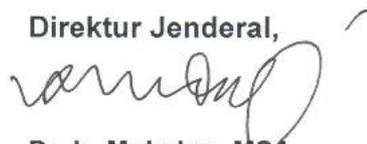
Sesuai dengan Nawa Cita, visi pembangunan peternakan dan keswan memilih kedaulatan dan keamanan pangan asal ternak. Pemilihan aspek kedaulatan dan keamanan pangan telah pula mempertimbangkan keselarasan dengan visi kementerian pertanian dan telah sesuai dengan tugas fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah menyusun kebijakan dibidang produksi ternak dan kesehatan hewan dengan fungsinya mencakup kebijakan dibidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen. Program Ditjen PKH Tahun 2015 adalah Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat.

Hasil-Hasil pelaksanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang didanai melalui APBN 2015 harus dilaporkan sebagai upaya pendokumentasian program/kegiatan serta mengetahui permasalahan yang muncul pada tahun 2015, sehingga menjadi umpan balik terhadap pelaksanaan tahun berikutnya. Berdasarkan hal tersebut, maka disusunlah Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Diharapkan laporan Tahunan ini dapat memberikan manfaat dan informasi capaian kinerja Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2015.

Jakarta, Januari 2016

Direktur Jenderal,



Dr. Ir. Muladno, MSA  
NIP. 19610824 198603 1 001

DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>II. PROGRAM DAN KEGIATAN DITJEN PKH TAHUN 2015</b>	
2.1. Program .....	3
2.2. Kegiatan .....	3
2.2.1. APBN Reguler .....	3
2.2.2. APBN-P .....	5
2.3. Anggaran Ditjen PKH Tahun 2015 .....	9
<b>III. KINERJA PEMENUHAN PANGAN ASAL TERNAK DAN AGRIBISNIS PETERNAKAN RAKYAT TAHUN 2015</b>	
3.1. Capaian Kinerja Aspek Makro .....	10
3.2. Capaian Kinerja Teknis Populasi dan Produksi .....	10
3.3. Capaian Kinerja Fungsional .....	12
3.3.1. Perbibitan Ternak .....	12
3.3.2. Budidaya Ternak .....	24
3.3.3. Pakan Ternak .....	43
3.3.4. Kesehatan Hewan .....	48
3.3.5. Kesehatan Masyarakat Veteriner .....	58
3.3.6. Dukungan Manajemen dalam menunjang Prestasi PKH .....	60
3.3.7. Realisasi Anggaran Ditjen Tahun 2015 .....	84
<b>IV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN BERKELANJUTAN</b>	
4.1. Sasaran Pembangunan PKH Tahun 2016 .....	86
4.2. Strategi Pencapaian Sasaran .....	86
4.3. Kegiatan Utama Tahun 2016 .....	89
<b>V. PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan .....	91
5.2. Permasalahan .....	94

5.3. Saran.....	96
<b>VI. LAMPIRAN.....</b>	<b>98</b>
<b>VII. DAFTAR ISTILAH.....</b>	<b>103</b>

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Prinsip Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pakan Sapi Potong Penggemukan Tahun 2015 .....	5
. Capaian Kinerja Aspek Makro Tahun 2015 .....	10
. Populasi Ternak Tahun 2014-2015 .....	11
Tabel 4. Penetapan Wilayah Sumber Bibit Ternak Tahun 2015 .....	13
Tabel 5. Produksi Ternak Bibit Unggul Tahun 2010-2015 .....	15
Tabel 6. Produksi Embrio Ternak Tahun 2010-2015 .....	16
Tabel 7. Target dan realisasi penerapan kartu ternak sapi dan kerbau Tahun 2015 .....	20
Tabel 8. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI Tahun 2015 .....	23
Tabel 9. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas IB Tahun 2015 .....	27
Tabel 10. Realisasi Pelaksanaan Sinkronisasi di UPT Tahun 2015 .....	27
Tabel 11. Realisasi Pelaksanaan Sinkronisasi di Provinsi Tahun 2015 .....	28
Tabel 12. Realisasi Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Perah Tahun 2015 .....	29
Tabel 13. Realisasi Kegiatan Pengembangan Budidaya Kambing Perah Tahun 2015 .....	30
Tabel 14. Realisasi Kegiatan Pengembangan Budidaya Ayam Lokal Tahun 2015 .....	31
Tabel 15. Realisasi Kegiatan Pengembangan Budidaya Itik Tahun 2015 .....	33
Tabel 16. Realisasi Kegiatan Pengembangan Budidaya Babi melalui dana APBN .....	34
Tabel 17. Realisasi Pengembangan Budidaya Babi APBN-P Tahun 2015 .....	34
Tabel 18. Jumlah Kelompok Pengembangan Integrasi Tanaman- Ternak Ruminansia Tahun 2010-2015 .....	45
Tabel 19. Lokasi, Jumlah, Luasan Kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan Tahun 2013-2015 .....	46
Tabel 20. Kegiatan Respon Cepat Kegiatan Pengendalian PHMS Tahun 2015 .....	52
Tabel 21. Data Nilai Ekspor Obat Hewan Tahun 2010 – 2015 (Nilai 1000 USD) .....	53
Tabel 22. Jumlah LHP Tuntas Periode 2010 s.d 2015 .....	67
Tabel 23. Jenis Komoditi Perijinan dan Rekomendasi Ditjen PKH .....	78
Tabel 24. Penilaian SAKIP dilingkup Ditjen PKH 2010-2014 .....	80
Tabel 25. Daftar Penghargaan SPI Ditjen PKH tahun 2010-2014 .....	82
Tabel 26. Perbandingan Nilai IPNBK tahun 2014 dan 2015 .....	83
Tabel 27. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015 .....	83

Tabel 28. Indikator Kinerja Utama (IKU)..... 86

**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1. Populasi Ternak Tahun 2010-2015 .....	11
Grafik 2. Produksi Daging, Telur dan Susu Tahun 2010-2015 .....	12
Grafik 3. Perkembangan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Tahun 2010 – 2015 .....	50
Grafik 4. Sebaran Kejadian AI per-provinsi selama Januari sampai Desember 2015.....	51
Grafik 5. Kejadian AI pada Unggas Tahun 2009 s/d 31 Desember 2015 .....	51
Grafik 6. Nilai SAKIP Ditjen PKH Periode 2010-2014 .....	80
Grafik 7. Realisasi Anggaran Per Jenis Kewenangan Ditjen PKH Tahun 2015.....	85
Grafik 8. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Ditjen PKH Tahun 2015.....	85
Grafik 9. Realisasi Anggaran Per Kegiatan Utama Ditjen PKH Tahun 2015 .....	85

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Ilustrasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pakan Sapi Potong Penggemukan .....	6
Gambar 2. Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan GBIB .....	7
Gambar 3. Capaian Penanggulangan gangrep APBN-P Tahun 2015 .....	49
Gambar 4. Struktur IKU dan IKK dalam ADIK .....	81

## I. PENDAHULUAN

Nawa cita Kabinet Jokowi-JK terkait kedaulatan pangan dan arah kebijakan jangka menengah pembangunan pertanian nasional merupakan acuan kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) 2015-2019. Kebijakan pembangunan pertanian tersebut adalah mewujudkan system pertanian bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tinggi berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Selain itu mempertimbangkan pula kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan periode sebelumnya.

Kinerja Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilihat dari aspek ekonomi makro serta teknis populasi dan produksi ternak. Dari sisi ekonomi makro yaitu PDB berdasarkan angka konstan meningkat sebesar 4,39% sedangkan penyerapan tenaga kerja tumbuh sebesar 3,07% pada tahun yang sama selama periode tahun 2010 – 2013. Untuk investasi baik PMA maupun PMDN tumbuh sebesar Rp.44.125,0 juta rupiah dan PMA US\$ 15.964 ribu dollar. Kenaikan pendapatan dan kesejahteraan petani peternak (NTP) mengalami peningkatan yang masih berada dikisaran 102. Sedangkan, pada aspek perdagangan ternak, peternakan dan kesehatan hewan masih mengalami devisa ekspor dibandingkan impor.

Sedangkan dari sisi teknis, populasi ternak dalam kurun waktu 2010-2014 rata-rata mengalami peningkatan kecuali kerbau yang menurun sebesar 24,91% per tahun. Dalam periode yang sama, untuk peningkatan produksi daging, semua jenis ternak mengalami peningkatan kecuali produksi daging kambing yang menurun 1,60%, domba 3,93%, produksi susu mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 0,19% per tahun, dan produksi telur meningkat rata-rata 7% pertahun.

Selaras dengan arah kebijakan pembangunan pertanian tahun 2015-2019 dan memperhatikan capaian aspek ekonomi makro dan aspek teknis populasi dan produksi ternak, maka Ditjen PKH merumuskan strategi untuk pemenuhan pangan asal ternak dan pembangunan agribisnis peternakan rakyat sebagai berikut: (1) Pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik lokal; (2) Penguatan kawasan dan kelembagaan peternakan; (3) Penguatan infrastruktur dan pelayanan teknis; (4) Pemberdayaan Peternakan dan Daya Saing; (5) Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas (kualitas) SDM peternakan dan kesehatan hewan; (6) Penerapan Teknologi dan Sistem Informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan; (7) Penguatan Regulasi Peternakan dan Kesehatan Hewan; (8) Mendorong insentif peternakan; dan (9) Perbaikan Tata Niaga Ternak dan Produk Ternak. Selama kurun waktu tersebut regulasi yang dibutuhkan banyak terkait dengan peraturan daerah yang mengatur: tatanang peternakan dan keswan; pengendalian pemotongan betina produktif; penetapan kawasan peternakan; pengembangan ternak dilahan sawit/hutan, pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dan pascapanen. Selain itu akan didorong dan diarahkan badan, instansi dan berbagai perusahaan untuk mengembangkan CSR/BKBL di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi maka dalam tahun anggaran 2015-2019 Ditjen PKH merumuskan programnya yaitu Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat. Terdapat 2 (dua) kata kunci dalam program tersebut, yaitu: pemenuhan pangan asal ternak yang mengarah pada peningkatan populasi dan produksi ternak (daging, telur dan susu). Kata kunci kedua adalah agribisnis peternakan rakyat yang mengarah pada peningkatan daya saing peternakan dan kesehatan hewan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka kegiatan utama yang akan diimplementasikan dalam tahun 2015-2019 adalah kegiatan produksi bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan ternak, penanganan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), jaminan pangan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dan kegiatan dukungan manajemen teknis.

Capaian sasaran strategis Ditjen PKH pada tahun 2015 termasuk kategori berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian sasaran strategis delapan indikator yang rata-rata lebih dari 81%, dengan kisaran 56,3% – 105,85 %. Indikator yang memiliki capaian >100% adalah produksi daging sapi/kerbau, produksi susu, peningkatan status kesehatan hewan, jumlah sertifikat, dan nilai tukar peternakan. Sedangkan indikator yang capainnya <100% adalah produksi daging ternak lainnya, produksi telur, dan ekspor ternak hidup babi.

Karena adanya perubahan organisasi di lingkup Kementerian Pertanian pada tahun 2015, maka pada tahun 2016 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan juga melaksanakan fungsi pengolahan dan pemasaran, sehingga kegiatan tahun 2016 menjadi kegiatan peningkatan kuantitas dan kualitas benih/bibit dan produksi ternak, peningkatan produksi pakan ternak, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, penjaminan produk hewan yang asuh dan berdaya saing, dan kegiatan dukungan manajemen teknis.

**II. PROGRAM DAN KEGIATAN DITJEN PKH TAHUN 2015****2.1. Program**

Program Ditjen PKH Tahun 2015 adalah Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat yang fokus pada : kesejahteraan peternak, komoditas sapi/kerbau, komoditas ternak lainnya, peningkatan daya saing peternakan. Tugas utama yang tertuang dalam Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 adalah : 1) Pemenuhan pangan asal ternak; 2) Pengembangan komoditas berorientasi ekspor; 3) Pengembangan produk industri prospektif; 4) Pengembangan produk energi pertanian; 5) Pengembangan bahan baku industri konvensional.

APBN Reguler Tahun 2015 sebesar Rp. 1,66 triliun, anggaran tersebut termasuk refokusing sebesar Rp. 188 miliar untuk pencapaian peningkatan produksi daging sapi/kerbau Tahun 2015, dipergunakan untuk kegiatan : 1) Bantuan pakan sapi potong penggemukan; 2) Penambahan volume kegiatan integrasi sapi-sawit; 3) Penambahan budidaya sapi potong usulan APBN-P Tahun 2015 sebesar Rp. 1,57 triliun, anggaran tersebut difokuskan untuk kegiatan mendukung pencaian swasembada daging sapi/kerbau, diantaranya : 1) Gertak birahi, IB (Inseminasi Buatan), dan ET (Embrio Transfer); 2) Penambahan sapi indukan dan bibit.

**2.2. Kegiatan****2.2.1. APBN Reguler**

Kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan disinergikan dengan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing Eselon II dibawahnya (Direktorat Perbibitan Ternak, Direktorat Budidaya Ternak, Direktorat Pakan Ternak, Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen dan Sekretariat). Dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan pada program Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dijabarkan dalam enam kegiatan dalam menunjang tupoksinya yaitu :

**2.2.1.1. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit**

Kegiatan ini dilaksanakan Direktorat Perbibitan Ternak bersama satker provinsi, kab/kota dan UPT yang meliputi: 1) Pembibitan Ternak Sapi/Kerbau dan Kambing/Domba; 2) Peningkatan Kualitas Bibit Sapi/Kerbau, Kambing, Babi, Ayam dan Itik; 3) Produksi dan Distribusi Embrio Ternak; 4) Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting; 5) Penguatan Pembibitan Ternak Sapi/Kerbau, Kambing/Domba, dan Unggas di Kabupaten/Kota Terpilih; 6) Penetapan Wilayah Sumber Bibit.

**2.2.1.2. Peningkatan Produksi Ternak**

Kegiatan ini dilaksanakan Direktorat Budidaya Ternak bersama satker provinsi, kab/kota dan UPT yang meliputi : 1) Pengembangan Budidaya Ternak Potong (pengembangan ternak sapi potong, kerbau dan kambing domba); 2) Optimalisasi IB dan InKA (peningkatan kapasitas petugas IB, distribusi semen beku dan

operasional IB, pengadaan pejantan, penguatan kelembagaan IB); 3) sinkronisasi Birahi; 4) Pengembangan Budidaya Ternak Perah; 5) Pengembangan Budidaya Ternak Unggas dan Aneka Ternak, Monogastrik; 6) Pengembangan Usaha dan Kelembagaan; 7) Pengembangan SMD WP; dan 8) Pengadaan Indukan Sapi Potong untuk Daerah Integrasi, Padang Pengembalaan dan Ex Tambang.

#### **2.2.1.3. Peningkatan Produksi Pakan Ternak**

Kegiatan ini dilaksanakan Direktorat Pakan Ternak bersama satker provinsi, kab/kota dan UPT yang meliputi : 1) Pengembangan Integrasi Temak Ruminansia; 2) Pengembangan HPT di UPT; 3) Pengembangan Padang Pengembalaan; 4) Penguatan Sumber Benih/Bibit HPT di UPT Pusat, UPTD dan Kelompok; 5) Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Temak Berkualitas; 6) Pengembangan UBP,UPP, LP dan Revitalisasi UPP/PPSK; 7) Penguatan Pakan Induk Sapi Potong, Sapi Perah dan Sapi Potong Penggemukan; 8) Pengadaan Indukan Sapi Potong, Sapi Perah dan Kerbau;

#### **2.2.1.4. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis**

Kegiatan ini dilaksanakan Direktorat Kesehatan Hewan bersama satker provinsi, kab/kota dan UPT yang meliputi : 1) Kesiagaan Wabah PHM; 2) Penanggulangan Gangguan Reproduksi dan Penyakit Parasiter; 3) Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan; 4) Pengawasan Obat Hewan (ekspor obat hewan, perijinan, pendaftaran, pengawasan peredaran); 5) Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (SIKHNAS); 6) Perlindungan hewan terhadap penyakit eksotik

#### **2.2.1.5. Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing**

Kegiatan ini dilaksanakan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner bersama satker provinsi, kab/kota dan UPT yang meliputi : 1) Peningkatan Pengendalian Penyakit Zoonosis; 2) Penguatan Laboratorium Kesmavet (fasilitasi peralatan dan akreditasi); 3) Fasilitas RPH-R; 4) Fasilitas Alat Transportasi Daging; 5) Unit Respon Cepat Pengawas Kesmavet; 5) Pemutakhiran data pemotongan; 6) Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan; 6) Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Kesmavet.

#### **2.2.1.6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan**

Kegiatan ini dilaksanakan Sekretariat Ditjen PKH bersama satker provinsi, kab/kota dan UPT yang meliputi : 1) Penyusunan Renstra 2015-2019; 2) Penyusunan RKT Tahun 2015; 3) Penyusunan Renja Tahun 2015; 4) Penyusunan RKAKL Tahun 2015; 5) Pelaksanaan Revisi Tahun 2014; 6) Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan Tahun 2014; 7) Penyusunan dan Penelaahan Usulan Dokumen Makalah Kerjasama/Bantuan Luar Negeri; 8) Koordinasi Kehumasan dengan Instansi Terkait; 9) Pengembangan Hubungan Kerjasama Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang PKH; 10) Reformasi Birokrasi; 11) Penataan dan Penguatan Organisasi (Penyusunan Rincian Tugas Pekerjaan

Eselon IV UPT); 12) Penataan Tata Laksana (Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan); 13) Penataan Peraturan Perundang-undangan; 14) Penataan Peraturan Perundang-undangan; 15) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur; 16); Pengembangan Perpustakaan Ditjen PKH; 17) Penyusunan Berita Acara Serah Terima BMN (Barang Milik Negara) untuk aset-aset yang berasal dari belanja MAK 526112, 526113, 526115 dan 526211; 18) Penghapusan; 19) Pembayaran Tunjangan Kinerja; 20) Laporan PNPB Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan TA. 2014; 21) Laporan KN; 22) Monev Pembangunan Peternakan dan Keswan; 23) Pengembangan *Website*; 24) Evaluasi Hasil Pengawasan; 25) SPI.

## 2.2.2. APBN-P

### 2.2.2.1. Bantuan Pakan Sapi Potong Penggemukan

Sasaran kegiatan bantuan ini adalah peternak sapi potong yang tergabung dalam kelompok ternak/gabungan kelompok ternak dengan memiliki usaha penggemukan sapi potong.

Target ternak yang akan dimasukkan dalam asumsi perhitungan kegiatan ini adalah seluruh sapi potong bakalan jantan jenis lokal (Bali dan PO) maupun persilangan dengan bobot awal kisaran 200-300 Kg pada 410 Kelompok. Dengan demikian diharapkan sapi potong memperoleh pakan berkualitas sehingga mampu mencapai bobot potong yang optimal, dalam satu siklus penggemukkan ( $\pm 4$  bulan) sesuai dengan jenis ternak.

Prinsip pelaksanaan kegiatan Bantuan pakan sapi potong penggemukan diantaranya : 1) Bantuan penguatan pakan sapi potong adalah bantuan penyediaan pakan berkualitas berupa Pakan Konsentrat dan penyediaan Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang diberikan kepada kelompok / Gabungan kelompok ternak yang memiliki usaha sapi potong penggemukan; 2) Jenis Pakan Konsentrat yang diberikan kepada peternak memenuhi sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan pakan (mengacu Standar Nasional Indonesia (SNI) pakan sapi potong penggemukan); 3) Bantuan pakan konsentrat diberikan, dengan jumlah ternak 50 ekor per kelompok; 4) Bobot awal, pemberian konsentrat dan lama pemeliharaan;

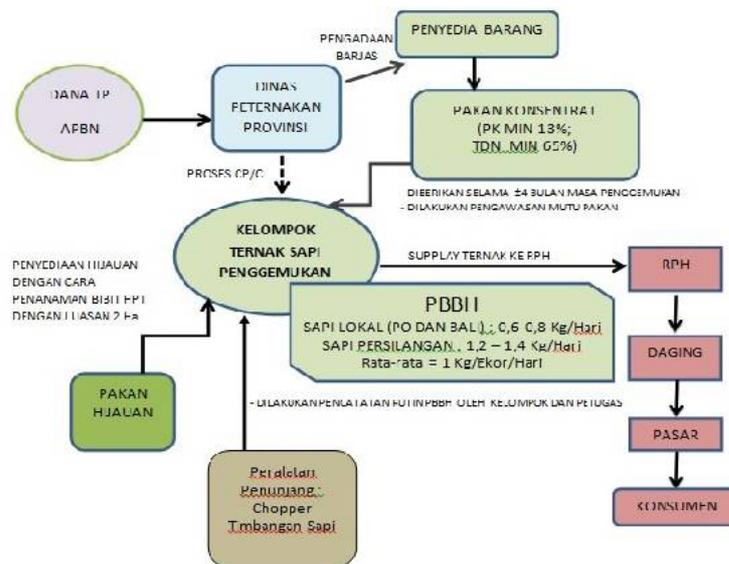
Tabel 1. Prinsip Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pakan Sapi Potong Penggemukan Tahun 2015

JENIS SAPI	Kisaran Bobot Awal (kg/ekor)	PEMBERIAN KONSENTRAT (Kg/ekor/hr)	LAMA PEMBERIAN (Hari)
BALI	180 -200	4	150
PO	200-250	5	130
PERSILANGAN	Minimal 300	6	

Sumber : Direktorat Pakan Ternak

5) Penyediaan HPT dilakukan dengan cara pengadaan bibit, pengolahan, pemeliharaan penanaman dan pemanenan; 6) Pemberian HPT sebanyak 25 Kg/ek/hari; 7) Peternak wajib menyediakan air secara cukup; 8) Dilakukan

pencatatan PBBH ternak setiap bulan selama program; 9) Pakan diadakan oleh Satker Daerah (Provinsi/ Kabupaten), selanjutnya didistribusikan kepada kelompok; 10) Pengawasan mutu pakan dilakukan oleh pengawas mutu pakan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota untuk menjamin kualitas pakan; 11) Pembinaan, pendampingan, dan pemantauan dilakukan oleh tim pusat, tim daerah, komisi ahli pakan, juga dapat melibatkan Perguruan Tinggi; 12) Agar dalam pelaksanaannya, seluruh pihak yang terkait dengan kegiatan ini mematuhi semua peraturan dan menghindari KKN.



Gambar 1. Ilustrasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pakan Sapi Potong Penggemukan

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini yaitu : 1) Peningkatan pemberian pakan yang berkualitas; 2) Peningkatan pertambahan bobot badan hidup Sapi Potong (Sapi Lokal (Bali , PO ) 0,6 – 0,8 Kg/ Hari, Sapi Persilangan 1,2-1,4 Kg/Hari); 3) Perubahan penjualan sapi berdasarkan bobot badan hidup sehingga terjadi peningkatan pendapatan petemak

Pembinaan wajib dilakukan oleh Dinas Peternakan atau dinas terkait terhadap aspek teknis peternakan kepada kelompok ternak. Pengawasan langsung maupun tidak langsung harus dilakukan oleh Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan di daerah. Evaluasi dilakukan bersama-sama oleh Tim Pusat, dan Tim daerah terhadap pelaksanaan kegiatan .

Tahapan pelaksanaan kegiatan Bantuan Penguatan Pakan Sapi potong pada tahun 2015 meliputi : 1) Proses CP/CL dilakukan oleh Tim Teknis di Kab/kota; 2) Verifikasi dilakukan oleh Tim Provinsi; 3) Penetapan lokasi/kelompok tani ternak terpilih; 4) Workshop dilakukan di Satker Provinsi/Kabupaten; 5) Pengadaan pakan konsentrat dilakukan oleh Satker Daerah (Prov/Kab); 6) Pakan didistribusikan ke kelompok; 7) Bersamaan dengan proses pengadaan pakan,

kelompok dapat memulai proses penyediaan HPT, mulai dari pengolahan lahan, pengadaan bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT), penanaman dan pemupukan; 8) Pengadaan Sapras pakan oleh satker daerah.

**2.2.2.2. Gertak Birahi dan Inseminasi Buatan (GBIB)**

Hasil evaluasi kegiatan IB tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, menunjukkan bahwa realisasi akseptor IB 2.230.287 ekor (75 %); Akseptor yang tidak ter IB 1.265.030 ekor (25 %); Realisasi kelahiran IB 1.525.790 ekor (68 %); dengan *Service per Conception/S/C* = 1,7. Penerapan sinkronisasi berahi dilakukan karena : 1) banyaknya temak yang tidak menampakkan gejala/tingkah laku berahi; 2) memungkinkan keseragaman berahi; 3) deteksi berahi dan waktu berahi yang tepat akan menurunkan biaya yang dikeluarkan; 4) penghematan penggunaan bahan dan efisiensi tenaga kerja; 5) panen pedet serempak.

Tujuan dari kegiatan sinkronisasi birahi antara lain: 1) mengoptimalkan pelaksanaan IB; 2) mengatur kelahiran; 3) mendata ternak yang mengalami gangguan reproduksi dan 4) meningkatkan angka kebuntingan dan kelahiran. Kegiatan GBIB ini memiliki sasaran antara lain : 1) terlaksananya GBIB sebanyak 691.000 ekor; 2) terdatanya akseptor gangguan reproduksi sebanyak 300.000 ekor; dan 3) tercapainya kelahiran ternak sapi dan kerbau di tahun 2016 sebanyak 2.096.846 ekor (GBIB sebanyak 518.250 ekor dan IB regular sebanyak 1.578.596 ekor kelahiran).

1) Tahapan Persiapan Dan Pelaksanaan

Tahapan persiapan meliputi kegiatan penyusunan pedoman umum dan pemetaan akseptor. Tahapan pelaksanaan meliputi beberapa kegiatan antara lain :



Gambar 2. Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan GBIB

a) Pelayanan IB

Seluruh sapi-sapi yang terlihat berahi setelah penyuntikan dilakukan pelayanan IB sesuai dengan *Standar Operationn Prosedur* (SOP) IB dengan tetap memperhatikan : a) Kualitas semen beku; b) waktu optimum pelayanan IB; c) deteksi berahi; d) teknik IB meliputi cara *thawing*, pemasukan (*deposisi*) semen beku pada posisi yang tepat dan dilakukan dengan benar; dan e) program pencatatan.

Penggunaan semen beku pada kegiatan ini dapat berasal dari B/BIB Nasional dan BIB Daerah dengan kualitas semen beku memenuhi SNI

b) Pemeriksaan Kebuntingan

Pemeriksaan kebuntingan dilakukan melalui palpasi per rektal untuk mengetahui perubahan yang terjadi di uterus atau menggunakan alat ultrasonografi serta pemeriksaan hormonal. Pemeriksaan kebuntingan melalui metoda palpasi per rektal dilakukan 2 bulan setelah pelayanan IB, dan dilakukan oleh Petugas Pemeriksaan Kebuntingan, atau petugas yang diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan tersebut.

c) Pelayanan Gangguan Reproduksi

Gangguan Reproduksi pada individu sapi dan kerbau antara lain : a) Tertahannya selubung plasenta dan kasus peradangan saluran reproduksi; b) Gangguan fungsional yang ditandai dengan tidak menunjukkan gejala berahi (*anestrus*), *estrus* yang tidak jelas/*silent heat*, jarak antar estrus yang tidak teratur; c) Kawin berulang; d) Abortus

Penanganan gangguan reproduksi bertujuan untuk meningkatkan angka kebuntingan dan kelahiran.

d) Kelahiran

Seluruh ternak yang dilahirkan melalui pelayanan IB dapat berasal dari program GBIB dan penanggulangan gangguan reproduksi. Kelahiran dapat terjadi secara normal atau mengalami penyimpangan antara lain *distokia*, *prematuur*, *abortus*, dan sebagainya. Anak sapi yang lahir dari kelahiran normal, dilakukan pencatatan meliputi rumpun, tanggal dilahirkan, jenis kelamin, identitas bapak (jantan) dan induknya.

2) Prasyarat Keberhasilan

Kegiatan getak birahi dan inseminasi buatan bisa berhasil apabila memenuhi syarat sebagai berikut : 1) melakukan pemetaan dan pendataan lokasi pelaksanaan sampai tingkat desa; 2) melakukan pemetaan dan pendataan petugas IB (inseminator, PKB (Pemeriksaan Kebuntingan), ATR (Asisten Teknis Reproduksi) dan rekorder); 3) menyiapkan bahan dan peralatan yang dibutuhkan; 4) merancang teknis pelaksanaan (pengumpulan ternak, seleksi, pemeriksaan, penyuntikan, pemeriksaan kebuntingan); 5) melakukan seleksi ternak yang memenuhi persyaratan untuk disinkron (tidak bunting dengan *Body Condition Skor* (BCS) = > 2,5); 6) mengembangkan sistem pelaporan

dengan sistem i-SIKHNAS; 7) meningkatkan koordinasi (pusat, propinsi, kabupaten/kota dan *stakeholder* terkait lainnya); 8) melaksanakan secara nyata pelarangan pematangan betina produktif apalagi bunting.

### **2.3. Anggaran Ditjen PKH Tahun 2015**

Penetapan DIPA Ditjen PKH Tahun 2015 ditetapkan tanggal 14 November 2014 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1,66 triliun. Pada bulan Maret 2015 Ditjen PKH memperoleh tambahan anggaran melalui APBNP sebesar Rp. 1,68 triliun, sehingga total anggaran Ditjen PKH sebesar Rp. 3,34 triliun yang ditetapkan pada DIPA tanggal 9 Maret 2015. Bila dibandingkan dengan Tahun 2014 terjadi peningkatan sebesar 140,28% (1,39 triliun).

Bulan Juli 2015 terjadi pergeseran program antar Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian. Pergeseran program tersebut mengakibatkan pengurangan anggaran Ditjen PKH sebesar Rp. 192 miliar, sehingga anggaran Ditjen PKH berkurang menjadi Rp. 3,15 miliar.

Akhir Tahun 2015 Anggaran Ditjen PKH berkurang sebesar Rp. 15 miliar, anggaran tersebut diambil dari Ditjen PKH untuk di kumpulkan di Sekretariat Jenderal untuk pembayaran Tunjangan Kinerja Kementerian Pertanian yang mengalami kenaikan. Anggaran Ditjen PKH pada bulan Desember 2015 menjadi Rp. 3,135 triliun.

Alokasi anggaran terbesar sampai terkecil berdasarkan kewenangan masing-masing adalah Kantor Daerah sebesar Rp. 1,1 triliun (35,76%), TP Provinsi Rp. 973 miliar (31,04%), Kantor Pusat Rp. 511 miliar (16,31%), Dekonsentrasi 283 miliar (9,04%), dan TP Kab/Kota Rp. 246 miliar (7,85%).

Berdasarkan Jenis Belanja masing-masing adalah Belanja Barang Rp. 2,6 triliun (85,42%), Belanja Modal Rp. 294 miliar (9,40%), Belanja Pegawai Rp. 143 miliar (4,56%), dan Belanja Sosial Rp. 19 miliar (0,62%).

Sedangkan berdasarkan Kegiatan Utama masing-masing adalah Peningkatan Produksi Ternak Rp. 1,04 triliun (33,33%), Peningkatan Produksi Pakan Ternak Rp. 846 miliar (27,01%), Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis Rp. 400 miliar (12,77%), Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Rp. 367 miliar (11,72%), Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Rp. 296 miliar (9,45%), dan Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing Rp. 179 miliar (5,72%).

### III. KINERJA PEMENUHAN PANGAN ASAL TERNAK DAN AGRIBISNIS PETERNAKAN RAKYAT TAHUN 2015

Kinerja program pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat tahun 2015 dilihat dari capaian aspek makro, teknis populasi dan produksi ternak (daging, telur dan susu), serta aspek fungsional.

#### 3.1. Capaian Kinerja Aspek Makro

Capaian kinerja aspek makro dinilai melalui nilai PDB sub sektor peternakan dan Nilai Tukar Petani Peternak (NTPT). Sampai dengan triwulan III, nilai PDB sub sektor peternakan berdasarkan harga konstan mencapai 101.607 milyar rupiah. Jika dibandingkan dengan capaian PDB triwulan III tahun 2014 terjadi pertumbuhan sebesar 4,54%. NTPT tahun 2015 sebesar 107,69, meningkat 0,97% dari tahun 2014 sebesar 106,65. Nilai NTPT > 100 berarti peternak mengalami surplus, dimana harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani lebih besar dari pengeluarannya. Peningkatan NTPT disebabkan oleh peningkatan IT lebih tinggi dibandingkan peningkatan IB (indeks harga yang dibayar petani). Komponen IB terdiri dari indeks konsumsi rumah tangga dan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal. Pengeluaran terbesar pada komponen konsumsi adalah untuk bahan makanan, sementara pengeluaran terbesar untuk biaya produksi adalah sewa lahan, pajak & lainnya, obat-obatan & pupuk dan pembelian bibit. Terlampir perbandingan NTPT Tahun 2014-2015 pada Lampiran 1.

Tabel 2. Capaian Kinerja Aspek Makro Tahun 2015

No	Uraian	Tahun		Pertumbuhan
		2014	2015	
1	PDB (Rp Milyar)	132.221 <sup>*)</sup>	136.312 <sup>**)</sup>	3,09%
2	NTPT	106,65	107,69	0,98%

Ket : \*) = Angka Sementara

\*\*) = Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS

#### 3.2. Capaian Kinerja Teknis Populasi dan Produksi

Dalam rentang waktu 2014-2015 (angka sementara) pertumbuhan populasi ternak besar rata-rata mengalami kenaikan : sapi potong 5,21%, sapi perah 4,51%, dan kerbau 3,46%, sedangkan pertumbuhan populasi ternak kecil meningkat yaitu: kambing 1,29%, domba 2,59%, dan babi 4,54%. Pertumbuhan populasi ternak unggas dan aneka ternak rata-rata meningkat, yaitu : ayam buras 3,60%, dan itik 3,55%.

Realisasi populasi ternak besar Tahun 2015 dibandingkan dengan sasaran dalam Renstra 2015-2019 mencapai lebih dari 100%, yaitu sapi potong 116,98%, sapi perah 112,90%, dan kerbau 123,19%. Realisasi populasi ternak kecil rata-rata mencapai lebih dari 90% yaitu kambing 94,67%, domba 97,05%, dan babi

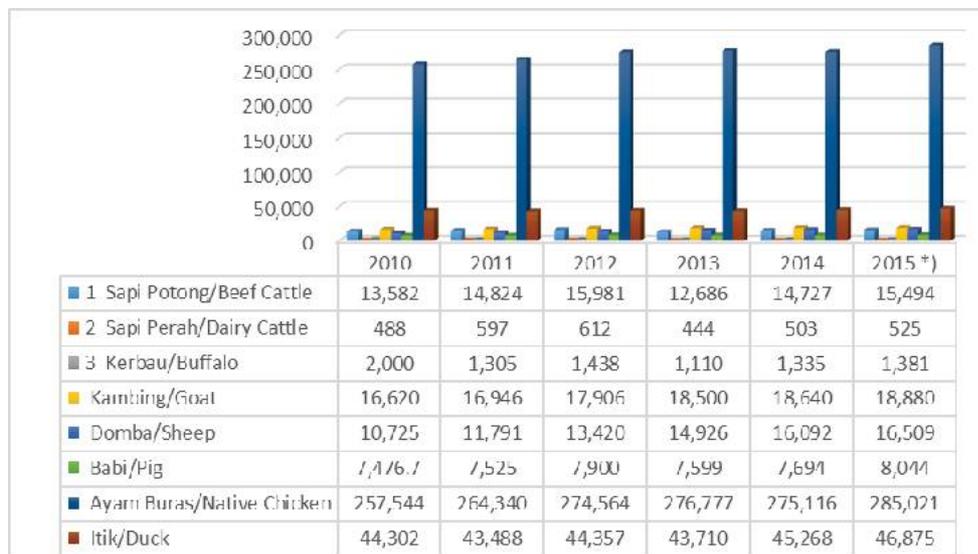
100,93%. Sedangkan realisasi populasi ternak unggas seperti ayam buras dan itik masing-masing mencapai 102,79% dan 101,65%. Selengkapnya pada Tabel 3.

Tabel 3. Populasi Ternak Tahun 2014-2015

(000 ekor)

No.	Jenis	Tahun				Pertumbuhan populasi Tahun 2014-2015 (%)
		2014	2015*)			
			Target	Realisasi	Persentase (%)	
1	Sapi Potong	14.727	13.245	15.494	116,98	5,21
2	Sapi Perah	503	462	525	112,90	4,51
3	Kerbau	1.335	1.121	1.381	123,19	3,46
4	Kambing	18.640	19.944	18.880	94,67	1,29
5	Domba	16.092	17.011	16.509	97,05	2,59
6	Babi	7.694	7.970	8.044	100,93	4,54
7	Ayam Buras	275.116	277.274	285.021	102,79	3,60
8	Itik	45.268	46.113	46.875	101,65	3,55

Keterangan: \*) Angka sementara  
 Sumber : Statistik Peternakan 2015



Sumber: Statistik Peternakan Tahun 2015

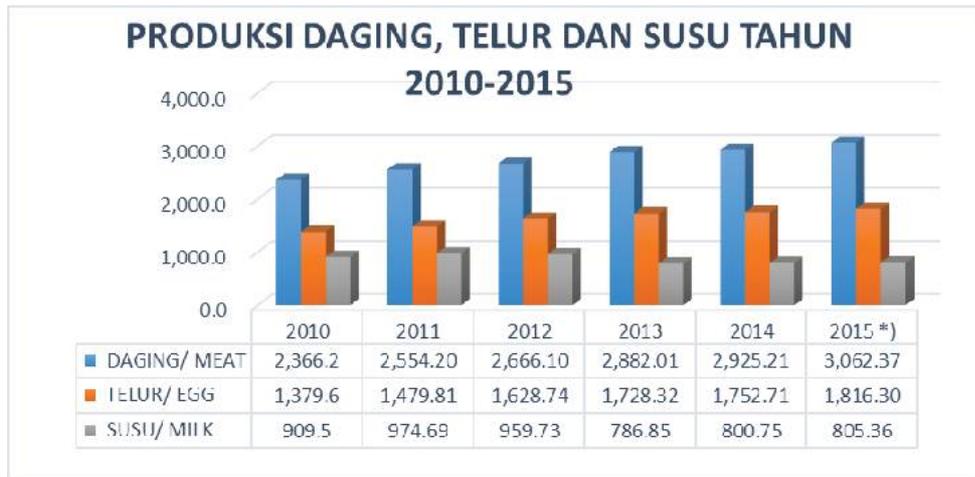
Grafik 1. Populasi Ternak Tahun 2010-2015

Produksi daging secara nasional tahun 2015 mencapai 3,06 juta ton, meningkat 4,4% dibanding produksi daging tahun 2014 sebesar 2,93 juta ton. Produksi daging sapi secara nasional tahun 2015 tercapai 523,9 ribu ton, jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 497,7 ribu ton, maka produksinya tumbuh sebesar 4,40%. Capaian produksi daging sapi tahun 2015 telah melebihi target yang

ditetapkan pada Renstra Ditjen PKH Tahun 2015-2019 yaitu sebesar 509,7 ribu ton.

Produksi telur secara nasional tahun 2015 tercapai 1,82 juta ton, jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 1,75 juta ton, maka produksinya tumbuh 4%. Namun capaian tersebut hanya mencapai 64,3% dari target produksi telur tahun 2015 sebesar 2,83 juta ton.

Produksi susu nasional tahun 2015 tercapai 0,805 juta ton, jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 0,800 juta ton (Data Statistik Ditjen PKH 2015), maka produksinya tumbuh 0,62%.Capaian tersebut telah melebihi target produksi susu 2015 sebesar 0,799 juta ton.



Sumber: Statistik Peternakan Tahun 2015

Grafik 2. Produksi Daging, Telur dan Susu Tahun 2010-2015

### 3.3. Capaian Kinerja Fungsional

#### 3.3.1. Perbibitan Ternak

Fungsi Perbibitan Ternak utamanya dilakukan oleh Direktorat Perbibitan Ternak. Direktorat Perbibitan Ternak sesuai Permentan No.

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbibitan ternak. Direktorat Perbibitan Ternak mempunyai fungsi : 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang bibit ternak ruminansia dan nonruminansia, serta penilaian, pelepasan, mutu dan pengembangan bibit ternak; 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang bibit ternak ruminansia dan nonruminansia, serta penilaian, pelepasan, mutu dan pengembangan bibit ternak; 3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang bibit ternak ruminansia dan nonruminansia, serta penilaian, pelepasan, mutu dan pengembangan bibit ternak; 4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bibit ternak ruminansia dan nonruminansia, serta penilaian, pelepasan, mutu dan pengembangan bibit ternak.

3.3.1.1. Perbibitan Ternak Lokal

Sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Nomor 41 Tahun 2014 Jo UU Nomor 18 Tahun 2009, pada Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2), bahwa Pemerintah berkewajiban melakukan pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan, dan/atau pembibitan serta membina pembentukan wilayah sumber bibit. Untuk itu Pemerintah telah melakukan penetapan wilayah sumber bibit, Uji *Performan* Sapi Potong, Penetapan Dan Pelepasan Rumpun/Galur Temak, dan Peningkatan Produksi Pembibitan Ternak Pada UPT Perbibitan.



Gambar : Wilayah Sumber Bibit Sapi Peranakan Ongole (PO) di Kabupaten

Penetapan wilayah sumber bibit harus memperhatikan tujuh aspek, yaitu : Jenis ternak, Rumpun atau Galur Ternak, Agroklimat, Kepadatan penduduk, Sosial Ekonomi, Budaya dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.



Penandatanganan Prasasti Ternak Hasil Uji Performan oleh Wakil Menteri Pertanian, 2009

Pengelolaan wilayah sumber bibit harus mengacu pada pedoman pembibitan ternak yang baik (*Good Breeding Practise/GBP*). Selanjutnya telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang penetapan Wilayah Sumber Bibit selama tahun 2013-2015.

Tahun 2013 telah ditetapkan 2 (dua) wilayah sumber bibit yaitu kabupaten Barru Sulawesi Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tahun 2015 telah ditetapkan 8 (delapan) wilayah sumber bibit yaitu kabupaten Kebumen, Gunung Kidul, Banjarnegara (2 komoditi ternak), Banyumas, Barito Kuala, Bojonegoro dan Lampung Selatan.

Tabel 4. Penetapan Wilayah Sumber Bibit Ternak Tahun 2015

No	Kabupaten Pengusul	Rumpun	Tahun	Nomor Keputusan Menteri Pertanian
1	Hulu Sungai Utara	Itik Alabio	2013	4436/Kpts/SR.120/7/2013
2	Barru	Sapi Bali	2013	4437/Kpts/SR.120/7/2013
3	Kebumen	Sapi PO	2015	47/kpts/SR.120/1/2015
4	Gunung Kidul	Sapi PO	2015	48/kpts/SR.120/1/2015
5	Banjarnegara	Domba Batur	2015	352/Kpts/PK.040/06/2015
6	Banjarnegara	Kambing PE	2015	353/Kpts/PK.040/06/2015
7	Banyumas	Kambing PE	2015	354/Kpts/PK.040/06/2015
8	Barito Kuala	Sapi Bali	2015	355/Kpts/PK.040/06/2015
9	Bojonegoro	Sapi PO	2015	356/Kpts/PK.040/06/2015
10	Lampung Selatan	Sapi PO	2015	357/Kpts/PK.040/06/2015

Sumber : Direktorat Perbibitan Ternak

Kegiatan uji *performan* sapi potong merupakan upaya peningkatan produktivitas sapi lokal atau asli Indonesia yang sudah dibudidayakan peternak.

Pelaksanaan uji *performan* dimulai pada tahun 2009 sampai dengan saat ini dengan melibatkan pemerintah, swasta, dan peternak.

Tahun 2009 dilaksanakan di 4 provinsi, 2010 di 7 provinsi, 2011 di 6 provinsi, 2012 di 9 provinsi, tahun 2013 dan 2014 di 14 provinsi dan 2 perusahaan dan tahun 2015 di 14 provinsi dan 1 perusahaan. Tanggal 20 September 2014 dilaksanakan peluncuran (*launching*) ternak bibit hasil uji *performan* yang terdiri dari : 143 bibit pejantan dan 185 bibit induk, yang terdiri dari bibit sapi Bali, sapi Madura, sapi PO (Peranakan Ongol) dan sapi SO (Sumba Ongol).

### 3.3.1.2. Penetapan Dan Pelepasan Rumpun/Galur Ternak

Pelepasan rumpun atau galur adalah penghargaan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap rumpun atau galur baru hasil pemuliaan di dalam negeri atau hasil introduksi yang dapat disebarluaskan. Sampai dengan Desember 2015 telah ditetapkan /dilepas 64 rumpun galur ternak. Penetapan/pelepasan ternak selama tahun 2010-2015.



*Rumpun Sapi Madura Jantan*



*Rumpun Sapi Bali Jantan*



*Rumpun Sapi Aceh Jantan*



*Rumpun PO Jantan*

### 3.3.1.3. Peningkatan Produksi Pembibitan Ternak Pada UPT Perbibitan

UPT Pusat yang berperan dalam penyediaan benih yaitu: BBIB Singosari, BIB Lembang dan BET Cipelang. B/BIB memproduksi semen beku, sedangkan BET memproduksi embrio. Kegiatan peningkatan produksi bibit ternak dilaksanakan di 7 UPT, yaitu BBPTU-HPT Baturraden, BPTU-HPT Indrapuri, BPTU-HPT Padang Mangatas, BPTU-HPT Sembawa, BPTU-HPT Bali, BPTU-HPT Siborongborong, dan BPTU-HPT Pelaihari

Produksi semen beku sampai saat ini oleh Balai Inseminasi Buatan (BIB) Nasional dan Daerah telah mampu memproduksi melebihi dari kebutuhan yang diperlukan, sehingga tahun 2012 telah dicanangkan swasembada semen beku dan tahun 2013 swasembada pejantan.



Pencanangan swasembada bull oleh Menteri Pertanian



Pencanangan swasembada semen beku oleh Wakil Menteri Pertanian

Pejantan unggul di BIB Nasional dan BIBD sampai bulan Juli 2015 berjumlah 240 ekor lokal dan 317 ekor eksotik. Produksi semen beku pada BBIB Singosari dan BIB Lembang kurun waktu tahun 2010 sampai dengan bulan Desember 2015 mencapai 29.634.647 dosis dan distribusi mencapai 18.438.689 dosis.

Produksi ternak bibit unggul pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2015 mencapai 1.603.498 ekor. Produksi tahun 2015 sampai dengan Desember mencapai 492.245 ekor.

Tabel 5. Produksi Ternak Bibit Unggul Tahun 2010-2015

No	Komoditas	Tahun (Ekor)						Jumlah (**)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015*)	
1	Sapi Aceh	46	75	134	108	615	658	1.636
2	Sapi Potong	42	34	103	153	784	1.250	2.366
3	Sapi Dwiguna	46	64	110	266	659	1.044	2.189
4	Sapi Bali	478	698	953	60	797	904	3.890
5	Sapi perah	169	298	332	440	1,300	2.205	4.744
6	Sapi Madura	-	-	-	-	-	8	8
7	Kerbau	21	29	35	29	293	232	639
8	Kambing	114	122	174	155	440	969	1.974
9	Babi	478	298	430	497	424	454	2.581
10	Ayam	85,000	82,749	9,450	129,000	130,193	114.490	550.882
11	Itik	166,237	155,086	12,327	172,546	156,284	369.951	1.032.431
12	bibit sapi (BET)	-	-	-	-	78	80	158
<b>Jumlah</b>		<b>252,631</b>	<b>239,453</b>	<b>24,048</b>	<b>303,254</b>	<b>291,867</b>	<b>492.245</b>	<b>1.603.498</b>

\*) Data sampai Desember 2015

\*\*) Jumlah Ternak Bibit 2010-2014

Sumber : Ditjen PKH, 2015

Embrio ternak diproduksi BET Cipelang, realisasi produksi 2010 sampai dengan bulan Desember 2015 sebanyak 9.061 embrio.

Tabel 6. Produksi Embrio Ternak Tahun 2010-2015

KEGIATAN	Tahun (Embrio)						Jumlah
	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	
Produksi Embrio	1.256	1.682	807	930	716	3.670	9.061

\*) Data per Desember 2015

Sumber : Ditjen PKH, 2015

#### 3.3.1.4. Perkembangan Pemanfaatan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)

Upaya Pemerintah untuk meningkatkan penyediaan bibit ternak salah satunya dilakukan melalui fasilitasi subsidi bunga skim Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dengan bunga sebesar 5% per tahun untuk mendukung adanya keterbatasan: (a) dana APBN untuk membiayai perbibitan; (b) kredit yang sesuai untuk perbibitan ternak; dan (c) akses peternak kepada perusahaan dalam penyediaan bibit. Kegiatan ini telah diluncurkan tahun 2009 dan realisasi mulai awal tahun 2010.

Perkembangan kegiatan sebagai berikut :

Skim kredit yang pernah ada untuk saat ini adalah Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS). KUPS merupakan kredit bersubsidi yang diberikan bank pelaksana kepada pelaku usaha pembibitan sapi, baik sapi potong maupun sapi perah. Beban bunga bagi pelaku usaha maksimal 5% per tahun dengan jangka waktu maksimal 6 tahun dan masa tenggang 24 bulan. Realisasi sampai dengan 15 Desember 2015 sebanyak 50.805 ekor sapi dengan total dana sebesar Rp. 637,45 miliar (15,92% dari total PKP (Pengusaha Kena Pajak) Rp. 4,003 Triliun) dengan jumlah pelaku sebanyak 493 pelaku usaha pembibitan sapi (12 perusahaan, 17 koperasi dan 464 kelompok/gabungan kelompok).

Rendahnya penyaluran antara lain karena :

- 1) Keputusan penyaluran ada di pihak perbankan (penentu kebijakan), pemerintah hanya sebatas mensosialisasikan keberadaan KUPS dan mempersiapkan calon pelaku;
- 2) Dukungan daerah (dinas kabupaten dan provinsi) terhadap kegiatan ini sangat diperlukan karena kesiapan calon pelaku terhadap skim kredit program yang masih jauh dari yang diharapkan;
- 3) Skim kredit program akan berakhir di bulan Desember 2014 sehingga bank pelaksana KUPS masih menunggu kebijakan pemerintah terhadap keberlanjutan skim kredit tersebut dengan tidak mengoptimalkan penyaluran kredit ini;
- 4) Penyaluran kredit oleh perbankan memiliki prioritas dimana KUPS bukan merupakan prioritas karena resiko ditanggung sepenuhnya oleh perbankan dengan kata lain tidak ada *risk sharing* dari pemerintah seperti halnya Kredit

Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) yang resiko usahanya lebih rendah dibanding KUPS;

- 5) Penyaluran KUPS berakhir pada 31 Desember tahun 2014. Adapun jangka waktu pengembalian sampai dengan tahun 2020;
- 6) Saat ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sedang memproses skim pembiayaan untuk peternakan.

#### **3.3.1.5. Perkembangan Perlindungan Usaha Pembibitan Melalui Asuransi Ternak**

##### **1) Pengembangan Asuransi**

Asuransi Ternak Sapi (ATS) adalah asuransi penjaminan terhadap ternak sapi yang bertujuan untuk memberikan jaminan/perlindungan atas resiko usaha akibat kematian sapi yang disebabkan penyakit, kecelakaan dan melahirkan, serta sapi hilang karena pencurian. Produk asuransi ternak sapi juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak. Asuransi Ternak Sapi ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan penyaluran kredit oleh perbankan ke sektor peternakan secara lebih besar serta mendorong peningkatan iklim investasi di sektor pertanian. Pada akhirnya, peningkatan investasi akan mendorong peningkatan persediaan sapi secara nasional dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional khususnya ketersediaan pasokan daging sapi dengan kuantitas dan harga yang stabil.

Beban premi asuransi ini sebesar 2 % (persen) dari nilai pertanggungan. Nilai pertanggungan adalah harga nominal perolehan sapi induk tanpa penambahan biaya lain yang disepakati oleh tertanggung dan penanggung. Pembiayaan premi asuransi bersumber dari APBN dan swadana. Pilot project asuransi ternak premi menggunakan sumber pembiayaan berasal dari swadana petani.

##### **2) Pelaksanaan Asuransi Peternakan**

Untuk dapat melaksanakan ATS perusahaan asuransi harus mengajukan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sampai saat ini perusahaan asuransi yang telah memperoleh izin adalah konsorsium ATS yang di pimpin oleh PT. Jasindo (Persero), dan beranggotakan PT. Asuransi Tripakarta, PT. Asuransi Raya dan PT. Asuransi Bumida. Tidak menutup kemungkinan untuk perusahaan asuransi lain apabila ingin menyalurkan asuransi ternak dengan memenuhi persyaratan memperoleh izin dari OJK.

Dasar Hukum pelaksanaan ATS merupakan pelaksanaan dari Undang Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3) Nomor 19 Tahun 2013. Pedoman Fasilitas Asuransi Pertanian sedang dalam proses penyelesaian penandatanganan oleh menteri pertanian demikian juga Keputusan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Asuransi Ternak Sapi. Pencatatan ijin produk asuransi ternak Nomor S-578/NB.11/2013 tanggal 27 Februari 2013.

Asuransi Ternak Sapi (ATS) diluncurkan oleh Wakil Menteri Pertanian pada tanggal 23 Oktober 2013 di Jakarta dan *Grand Launching* oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2013 di Padang. Pelaku yang telah memanfaatkan asuransi dengan biaya APBD, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan swadana sebanyak 418 ekor dengan harga pertanggungan bervariasi mulai dari 6 juta rupiah sampai dengan 16 juta rupiah dan jumlah total pertanggungan sebesar 5,4 miliar rupiah. Peserta asuransi menggunakan APBD berasal dari Provinsi Bali yang terintegrasi dengan program Simantri, sementara CSR ada Provinsi DIY dengan perusahaan Sari Husada, dan Cirebon dengan bank BNI. Peserta dengan swadana murni baru mencapai 70 ekor dengan nilai pertanggungan antara 10 juta rupiah sampai dengan 15 juta rupiah dengan total jumlah pertanggungan mencapai 901,5 juta rupiah atau 16 % dari total pertanggungan asuransi ternak sapi.

Sampai dengan 15 Desember 2015, ATS telah diakses oleh peserta asuransi sebanyak 93 pelaku yang terdiri atas 2 koperasi dan 91 kelompok/gabungan kelompok dengan total ternak yang telah diasuransikan sebanyak 2.252 ekor dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 17,2 miliar.

Pemasalah dalam pelaksanaan asuransi ini adalah peternak mengharapkan adanya subsidi asuransi bagi pengakses kredit KUPS seperti halnya dengan subsidi asuransi bagi petani padi, hal ini sangat membantu peternak pembibit karena cost yang ditanggung cukup besar. Biaya penerbitan surat keterangan sehat dari dokter hewan yang merupakan syarat wajib bagi pengguna asuransi ternak sapi ini juga dianggap membebani petani, sehingga diharapkan adanya kebijakan penerbitan surat keterangan sehat tidak dibebankan ke peternak.

#### **3.3.1.6. Investasi Pembibitan Ternak**

Dalam upaya membuka peluang investasi dan peluang pasar di bidang peternakan serta mendorong minat investor untuk usaha perbibitan diperlukan adanya data dan informasi tentang peluang dan potensi investasi. Peluang dan investasi meliputi lokasi dan serangkaian kebijakan investasi dan permodalan. Kegiatan ini untuk mengumpulkan informasi dan peluang potensi daerah untuk peningkatan peluang usaha peternakan khususnya pembibitan ternak dari dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan beserta Badan Koordinasi Penanaman Modal/Daerah (BKPM/BKPMMD). Sebagai pilot project pada tahun 2015 dilaksanakan di 6 provinsi yaitu Provinsi Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB dan Sulawesi Selatan. Sedangkan saat ini provinsi yang telah selesai menyusun profil potensi dan peluang investasi adalah provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Lampung, sehingga terwujud penyediaan data dan informasi dasar berupa profil investasi mengenai potensi dan peluang investasi usaha pembibitan pada sub sektor peternakan.

### 3.3.1.7. Penguatan Kelembagaan Perbibitan Ternak

Tujuan kegiatan adalah dalam rangka penyamaan persepsi dalam gerak langkah kegiatan operasional penguatan kelembagaan perbibitan tahun 2015 sehingga diperlukan pedoman serta petunjuk kerja kelembagaan perbibitan ternak. Adapun beberapa hasil pertemuan adalah sebagai berikut :

- 1) Tersusunnya rancangan Permentan Pedoman Kelembagaan Usaha Peternakan yang selanjutnya akan dirumuskan sebagai acuan bagi daerah dalam melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan peternakan yang di dalamnya juga memuat tentang perbibitan.
- 2) Tersusunnya petunjuk kerja penguatan kelembagaan perbibitan sebagai acuan bagi daerah dalam melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan perbibitan yang difokuskan pada peningkatan SDM melalui kegiatan koordinasi untuk peternak dan petugas.
- 3) Adanya persamaan persepsi terhadap rancangan Permentan Pedoman Kelembagaan Usaha Peternakan, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penguatan kelembagaan perbibitan.
- 4) Arah penguatan kelembagaan kelompok pembibit yang berada pada masing-masing kabupaten diharapkan dapat bergabung menjadi satu kesatuan (lokasi) dengan jumlah minimal populasi ternak sapi yang ada sekitar 100 ekor ST (Satuan Ternak) untuk melakukan prinsip-prinsip pembibitan khususnya di 23 provinsi dan hasil identifikasi calon kelompok pembibit di 10 provinsi. Selanjutnya kelompok pembibit yang sudah ditetapkan tersebut harus menguasai kompetensi dasar sebagai kelompok pembibitan.
- 5) Kegiatan identifikasi calon kelompok pembibit difokuskan pada 10 provinsi yaitu provinsi Riau, Jambi, Sumbar, Jateng, Jatim, Bali, NTB, Kaltim, Sulsel, Maluku. Sedangkan penguatan kelembagaan berupa pertemuan kelompok dengan dinas serta *stakeholders* terkait dalam rangka penguatan kelembagaan kelompok pembibit dilaksanakan di 23 provinsi yaitu: NAD, Bengkulu, DIY, Kaltim, Sumut, Babel, Jatim, Riau, Lampung, Bali, Sulsel, Jambi, Banten, NTB, Maluku, Sumbar, Jabar, NTT, Papua, Sumsel, Jateng, Kalsel dan Papua Barat.

Permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- 1) Kelompok masih belum dapat menerapkan pola pencatatan yang tertib dan rapih khususnya dalam mencatat ternaknya baik secara harian, bulanan maupun tahunan.
- 2) Dalam usaha pembibitan ternak membutuhkan waktu cukup panjang dan pola *recording* yang baik, sehingga dibutuhkan pola pembinaan serta pendanaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan pola dan sistem usaha perbibitan.

Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan :

- 1) Perlu disusun terkait koordinasi dan pembinaan terhadap manajemen organisasi dan manajemen teknis pembibitan kepada kelompok pembibitan agar dapat berkelanjutan dan bersifat *multiyears*.
- 2) Perlu adanya koordinasi antara Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Kepala Badan SDM Pertanian untuk melakukan kerjasama dalam penguatan kelembagaan pembibitan bidang peternakan secara berkesinambungan.

### 3.3.1.8. Pelaksanaan Penerapan Kartu Temak Sapi dan Kerbau

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan masih belum tertibnya data dan informasi keberadaan ternak berdasarkan kepemilikan ternak, populasi ternak, jumlah rumah tangga peternak, mutasi ternak dan stock ternak yang ada, diperlukan adanya penerapan kartu ternak yang mekanismenya diadopsi dari Kabupaten Sumbawa, NTB yang telah berlangsung sejak lama, dan selanjutnya perlu diimplementasikan di lokasi uji coba di 8 Kabupaten daerah sentra produsen.

Dari hasil pertemuan dan pendampingan di lapangan dapat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

Target dan realisasi penerapan kartu ternak sapi dan kerbau yang telah dilaksanakan di 8 kabupaten sebagai berikut :

Tabel 7. Target dan realisasi penerapan kartu ternak sapi dan kerbau Tahun 2015

No.	Provinsi	Kabupaten	Target Populasi Sapi/kerbau (ekor)	Kartu Ternak (Lembar)	Persentase Pelaksanaan (%)
1	NTT	Kupang	148.369	163.206	19,50%
2	NTB	Sumbawa Barat	35.123	38.635	88,77%
3	Bali	Badung	36.668	40.335	53,00%
4	Jatim	Tuban	225.230	247.753	23,47%
5	DIY	Gunung Kidul	138.214	152.035	34,89%
6	Jateng	Semarang	77.150	84.865	27,93%
7	Lampung	Lampung Selatan	97.123	106.835	65,00%
8	Sulsel	Maros	61.957	68.153	75,00%

<sup>\*)</sup> data s/d bulan Nopember 2015  
 Sumber : Direktorat Perbibitan Ternak

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar mengamanatkan bahwa identifikasi ternak merupakan suatu sistem untuk mengefektifkan penelusuran faktor-faktor yang terkait dengan penyakit hewan dan keamanan pangan dengan memberikan tanda atau identitas terhadap ternak maupun pemilik/penggadu, untuk itu pelaksanaan penerapan kartu ternak akan terus diterapkan di seluruh kabupaten dan perlu adanya *political will* dari pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat untuk keberlanjutannya.

Permasalahan yang dihadapi :

- 1) Masih belum berjalannya upaya pengawasan penerapan kartu ternak di lokasi uji coba kartu ternak.
- 2) Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan keswan belum dapat menindak lanjuti penerapan kartu ternak melalui peraturan bupati atau peraturan gubernur.
- 3) Pelaksanaan penerapan kartu ternak di 8 lokasi uji coba masih belum dapat direalisasikan sesuai target populasi ternak.
- 4) Belum terlaksananya kemudahan bagi peternak yang telah memiliki kartu ternak.

Tindak Lanjut :

- 1) Perlu adanya kerjasama dengan Kapolsek setempat, sebagaimana yang telah dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Tuban, dalam upaya pengawasan penerapan kartu ternak.
- 2) Guna keberlanjutan penerapan kartu ternak di seluruh kabupaten, diharapkan peran Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan keswan dapat menindak lanjuti melalui peraturan bupati atau peraturan gubernur.
- 3) Diharapkan pelaksanaan penerapan kartu ternak di 8 lokasi uji coba dapat direalisasikan sesuai target populasi ternak pada masing-masing kabupaten paling lambat tanggal 30 Desember 2015.
- 4) Perlu meyakini bahwa bagi peternak yang memiliki kartu ternak, akan mendapatkan fasilitas pelayanan standar minimal berupa kesehatan hewan. Registrasi ternak yang telah tercatat berdasarkan struktur populasi ternak, dapat mengetahui keberadaan ternak, jumlah rumah tangga peternak, mutasi ternak, stock ternak yang ada dan dapat digunakan sebagai dasar untuk penyusunan data dan informasi di lokasi SPR.
- 5) Rencana pelaksanaan penerapan kartu ternak tahun 2016, diusulkan alokasi anggaran untuk pembinaan dan pengembangan lokasi.

#### **3.3.1.9. Lembaga Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak**

Sesuai Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 13 ayat (6) dan (7) dan Peraturan Pemerintah tentang Sumberdaya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak Nomor 48 tahun 2011, maka dibentuk Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Benih dan Bibit Ternak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75 tahun 2012 tentang Lembaga Sertifikasi Bidang Pertanian. Dan pada bulan Juli 2015 LSPro benih dan bibit ternak telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor LSPro-045-IDN.

Sertifikasi benih dan bibit ternak merupakan upaya melindungi masyarakat terhadap penggunaan benih dan bibit ternak yang mutunya dapat

dipertanggungjawabkan, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun luar negeri dan perlindungan menuju pasar global.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Pada Tahun 2015 hasil temuan atas penilaian KAN telah dinyatakan ditutup (closed) dan pada akhir April dan awal Mei 2015 dilakukan penyaksian (witness) terhadap audit kesesuaian yang dilaksanakan oleh Auditor LSPro. Kegiatan witness dilaksanakan di BPTU HPT Denpasar dan BET Cipelang. Dari hasil witness menunjukkan kesiapan LSPro dalam menjalankan fungsi pelayanan jasa sertifikasi benih dan bibit ternak.

Walaupun masih ada beberapa hal yang menjadi catatan dari Asesor KAN terhadap pelaksanaan audit kesesuaian LSPro pada kedua balai tersebut. Terdapat catatan secara umum antara lain : 1) Tim auditor LSPro yang ditetapkan telah memenuhi persyaratan dan mendukung ruang lingkup sertifikasi, namun masih perlu peningkatan kemampuan komunikasi dalam proses audit; 2) perlunya konsistensi dalam penyusunan audit plan dan cara pengisian kolom-kolom dalam laporan ketidaksesuaian yang disampaikan kepada auditee; 3) perlunya penajaman sisi teknis produksi dan sistem manajemen yang terikat langsung dan berpengaruh pada produk yang dihasilkan pemohon sertifikasi; 4) sistem pelaksanaan audit kesesuaian belum dijalankan secara konsisten karena sistem administrasi yang masih belum rapi.

- 2) Sertifikat akreditasi LSPro Benih dan Bibit Ternak oleh KAN telah diputuskan lulus akreditasi dengan nomor LSPr-045-IDN dengan 28 ruang lingkup benih dan bibit ternak, hal ini berdasarkan surat nomor 4488/4.c1/PLP/08/2015 tentang Keputusan Akreditasi.
- 3) Peningkatan kompetensi SDM LSPro pada tahun 2015 dilakukan pelatihan sebagai berikut: 1) Pelatihan Sistem Manajemen LSPro (17065 dan 17067) tanggal 11 – 13 Februari 2015; 2) Petugas Pengambilan Contoh tanggal 7 – 8 Mei 2015; 3) Pemahaman SNI 12 Mei 2015; *Lead Auditor Based on ISO 9001* tanggal 26-30 Januari 2015, 23 – 27 Februari 2015 dan 16 - 20 Maret 2015 (SGS Cilandak).
- 4) Koordinasi LSPro Benih dan Bibit Ternak dilakukan kegiatan yaitu : 1) koordinasi personel LSPro tanggal 2 dan 3 November 2015 mengenai proses kegiatan LSPro serta pemahaman dokumen baru; 2) Pertemuan serah terima personel LSPro serta penyerahan Akreditasi KAN pada tanggal 9 November 2015 yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Dede Erawan kepada Manajer Puncak LSPro. Serah terima jabatan manajer puncak LSPro yang lama Harry Cakra Mahendra, S.Pt kepada manajer puncak yang baru Dani Kusworo, S.Pt.M.Si; 3) Pertemuan tanggal 1 s/d 2 Desember 2015 pembahasan antara lain review dokumen, metode pengujian semen beku, pemantapan posisi personel LSPro serta perispian sosialisasi LSPro untuk breeder; 4) Pertemuan sosialisasi ruang lingkup unggas kepada breeder tanggal 4 Desember 2015 yang dihadiri oleh beberapa perusahaan unggas, dewan pengarah, komisi

teknis, personil LSPro, berharap dengan sertifikasi produk merupakan salah satu cara untuk memberikan jaminan terhadap kualitas dan harga DOC.

- 5) Dalam rangka penerbitan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI oleh LSPro Benih dan Bibit Ternak, salah satu prosedur yang wajib dilakukan adalah pembahasan oleh Komisi Teknis (Komtek) tentang hasil audit dan hasil uji benih/bibit. Sesuai dengan tugasnya, Komtek memberikan pertimbangan dan menentukan terhadap pemberian, pemeliharaan, pengembangan, pembekuan dan pencabutan sertifikat. Anggota Komtek tersebut dijamin independensinya dan memiliki kompetensi teknis yang relevan dengan ruang lingkup sertifikasi produk yang sedang dipertimbangkan. Rapat Komisi Teknis bertujuan untuk melakukan evaluasi dan memberikan putusan dalam rangka sertifikasi. LSPro Benih dan Bibit Ternak telah melakukan rapat komisi teknis

Tabel 8. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI Tahun 2015

No	Produsen	Pelaksanaan	Nama Produk	Jumlah Produk yang diajukan	Jumlah Produk bersertifikat	Standar
1	BIBD Kalimantan Selatan	1 April 2015	Semen beku	15 ekor	13 ekor	SNI 4869:1:2008 SNI 4869:2:2008
2	BBPTU HPT Baturaden	21 November 2015	Bibit Sapi Perah	51 ekor	48 ekor	SNI 2735:2008
3	BET Cipelang	20 November 2015	Embrio	212 embrio	212 embrio	SNI 7880:2008
4	BIB Lembang	20 November 2015	Semen Beku	157 straw dari 50 ekor bull	2.400.000 straw dari 40 ekor bull	SNI 4869:1:2008 SNI 4869:2:2008
5	BPTU HPT Denpasar	21 November 2015	Bibit Sapi Bali	11 ekor	11 ekor	SNI 7355:2008

Sumber : Direktorat Perbibitan Ternak

- 6) Koordinasi dan sosialisasi dilakukan kepada BPTU HPT Indrapuri BPTU HPT Siborong-borong, BPTU HPT Padang Mengatas, BPTU HPT Sembawa, BBIB Singosari, BPTU HPT Pelaihari dan BPTU HPT Denpasar, menginformasikan terkait LSPro telah diakreditasi oleh KAN, dengan adanya sosialisasi juga UPT dapat mempersiapkan produknya untuk dilakukan sertifikasi.
- 7) Survelen dilakukan pada BBIB Singosari untuk melihat kegiatan proses produksi BBIB Singosari, kesesuaian kegiatan dengan pedoman mutu yang ada.

### 3.3.2. Budidaya Ternak

Fungsi Budidaya Ternak dilaksanakan utamanya pada Direktorat Budidaya Ternak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010, tanggal 14 Oktober 2010, maka tugas pokok dan fungsi Direktorat Budidaya Ternak adalah Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya ternak. Sedangkan fungsinya : 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang budidaya ternak potong, perah, unggas dan aneka ternak, serta usaha dan kelembagaan; 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya ternak potong, perah, unggas dan aneka ternak, serta usaha dan kelembagaan; 3) Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria ternak potong, perah, unggas dan aneka ternak, serta usaha dan kelembagaan; 4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ternak potong, perah, unggas dan aneka ternak, serta usaha dan kelembagaan; dan 5) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Budidaya Ternak. Selanjutnya pada bulan Agustus Fungsi Budidaya Ternak ditangani oleh Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.

#### 3.3.2.1. Pengembangan Budidaya Ternak Potong

Dalam rangka mengukur capaian kinerja kegiatan budidaya ternak potong, disamping memperhatikan input yang digunakan, proses dan hasil atau kinerja kegiatan yang dilakukan dengan cara mengukur capaian *output*, disamping melakukan pengukuran terhadap capaian *outcome* bagi kegiatan yang sudah dapat memberikan hasil bagi peternak.

Untuk mendukung Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat tahun 2015, perlu meningkatkan produksi dan produktivitas ternak melalui pengembangan budidaya ternak potong yang berorientasi agribisnis, prioritas pada usaha industri pembibitan, pembesaran dan penggemukan, dengan penerapan tata cara budidaya ternak potong yang baik (*Good Farming Practice/GFP*).

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemberian modal usaha kepada kelompok tani ternak, baik yang diberikan dalam bentuk agroinput berupa ternak plus sarana pendukung, disamping diberikan fasilitasi berupa pelayanan Inseminasi Buatan (IB), penyediaan jantan pemacek dan pembinaan serta monitoring yang dilaksanakan baik oleh pelaksana pada tingkat pusat maupun di daerah (provinsi dan Kabupaten/Kota).

Dalam mendukung pengembangan ternak potong pada tahun 2015 maka dilaksanakan kegiatan antara lain :

##### 1) Pengembangan Sapi Potong

Pengembangan budidaya sapi potong dilakukan melalui fasilitasi anggaran Tugas Pembantuan (TP) provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan di 33 provinsi dengan target output sebanyak 374 kelompok. Realisasi pelaksanaan kegiatan sebanyak 350 kelompok (93.58%), dengan realisasi pengadaan

ternak sebanyak 9.566 ekor (ternak jantan sebanyak 1.159 ekor dan betina sebanyak 7.877 ekor). Untuk kegiatan melalui alokasi dana APBN-P di 7 provinsi dengan target output sebanyak 41 kelompok terealisasi sebanyak 36 kelompok atau (87.80%).

2) Pengembangan Budidaya Kerbau

Dalam upaya mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha budidaya kerbau yang dilaksanakan dengan skala usaha yang ekonomis melalui pendekatan kelompok, pada tahun 2015, disediakan fasilitasi bantuan sebanyak 29 kelompok di 6 Provinsi. Realisasi pelaksanaan kegiatan sebanyak 22 kelompok (75.86%), dengan realisasi pengadaan ternak sebanyak 416 ekor (ternak jantan sebanyak 47 ekor dan betina sebanyak 245 ekor). Sedangkan kegiatan yang dialokasikan melalui dana APBN-P dilaksanakan di 5 provinsi dari target output sebanyak 10 kelompok terealisasi sebanyak 9 kelompok atau (87.80%).

3) Pengembangan Budidaya Kambing

Agroinput berupa kegiatan pengadaan ternak dan sarana dan prasarana pengembangan ternak kambing. Target kegiatan sebanyak 44 kelompok terdapat di 20 Provinsi dengan realisasi sebanyak 45 kelompok (102.27%). Realisasi pengadaan ternak sebanyak 2.411 ekor (ternak jantan sebanyak 239 ekor dan betina sebanyak 2.009 ekor).

Untuk kegiatan yang dialokasikan melalui dana APBN-P di 11 provinsi dengan target output sebanyak 62 kelompok terealisasi sebanyak 55 kelompok atau (88.71%).

4) Pengembangan Budidaya Domba

Agroinput berupa kegiatan pengadaan ternak dan sarana dan prasarana pengembangan ternak domba. Target kegiatan sebanyak 32 kelompok terdapat di 6 Provinsi. Realisasi kegiatan sebanyak 30 kelompok (93.75%), dengan realisasi pengadaan ternak sebanyak 1.709 ekor (ternak jantan sebanyak 260 ekor dan betina sebanyak 1.285 ekor). Untuk kegiatan yang dialokasikan melalui dana APBN-P di 2 provinsi dengan target output sebanyak 19 kelompok hanya terealisasi sebanyak 8 kelompok atau (42.11%).

Belum terealisasinya kegiatan secara maksimal disebabkan oleh: 1) Proses penghematan anggaran sehingga terjadinya keterlambatan pelaksanaan kegiatan; 2) pengadaan barang dan jasa menggunakan sistem kontraktual, sehingga pelaksanaan menjadi tidak tepat waktu bahkan ada beberapa kegiatan yang mengalami gagal lelang; dan 3) proses lelang melalui ULP membutuhkan waktu yang cukup lama karena banyaknya lelang yang dilaksanakan di ULP.

**5) Optimalisasi Kelahiran Melalui IB dan InKA****a) Optimalisasi IB**

Inseminasi buatan merupakan salah satu jenis penerapan teknologi tepat guna yang menjadi pilihan utama dalam peningkatan populasi, produksi dan produktivitas, karena Inseminasi Buatan memiliki beberapa keunggulan antara lain: 1) penyebaran bibit unggul dapat dilaksanakan dengan murah, mudah dan cepat; 2) dapat mencegah penyebaran penyakit reproduksi menular; 3) efisiensi penggunaan pejantan unggul dan 4) dapat meningkatkan mutu genetik ternak, sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peternak.

Untuk mendapatkan hasil IB yang maksimal perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang tersedia disamping disamping melakukan: 1) Peningkatan kapasitas petugas IB (Inseminator, PKB, ATR dan lain-lain); 2) Penguatan kelembagaan pelayanan IB (penyediaan sarana IB, seperti : pos IB; ULIB, SP-IB) serta sinkronisasi; dan 3) pengadaan sarana IB dan pendukung lainnya sehingga dapat meningkatkan pelayanan IB dan fungsi Kelembagaan IB pada SPIB I, SPIB II, Pos IB pada wilayah IB introduksi dan wilayah IB pengembangan.

Optimalisasi IB mencakup kegiatan seperti :

**(1) Distribusi Semen Beku dan Oprasional IB**

Pada tahun 2015 untuk mendukung kelancaran pelayanan IB dialokasikan distribusi semen beku dan oprasional IB sebanyak 1.625.535 dosis di 33 provinsi, yang digunakan untuk mendistribusikan semen beku sebanyak 932.386 dosis (57%) dan mendukung terlaksananya pelayanan IB yang dilakukan oleh petugas IB di Kabupaten/Kota dan tingkat kecamatan sampai dengan lapangan.

**(2) Penguatan Kelembagaan IB**

Pada tahun 2015 untuk mendukung kelancaran pelaksanaan IB dilaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan pelayanan IB dilaksanakan di 33 provinsi dengan target output sebanyak 270 unit, terealisasi 243 unit (90%).

**(3) Peningkatan Kapasitas Petugas IB (Inseminator, PKB dan ATR)**

Kegiatan peningkatan kapasitas petugas IB tahun 2015 dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan target peserta sebanyak 150 orang dengan realisasi kegiatan mencapai 100,6% (151 orang).

Tabel 9. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas IB Tahun 2015

Pelaksana	Peserta Bimtek					
	Inseminator		PKb		ATR	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
BIB Lembang	30	31	60	60	60	60

Sumber : Direktorat Budidaya Ternak

(4) Sinkronisasi Birahi

Dalam rangka optimalisasi kelahiran temak hasil IB, deteksi berahi dan ketepatan pelayanan IB merupakan hal penting yang mempengaruhi keberhasilan kebuntingan pada temak yang diinseminasi. Pada kelompok sapi betina yang tidak bunting, siklus berahi tersebar secara acak, sekitar 40% berada dalam tahap foikuler, sisanya 60% dalam tahap luteal. Pada kondisi normal, 5% sapi betina berada dalam keadaan berahi setiap hari.

Sinkronisasi berahi dilakukan dengan tujuan agar terjadi berahi serempak. Kegiatan sinkronisasi dilakukan dengan alasan: (1) banyaknya ternak yang tidak menampakkan gejala/tingkah laku berahi sehingga perlu sinkronisasi untuk mempermudah pendeteksian berahi, (2) deteksi berahi mudah, (3) memungkinkan keseragaman berahi, (4) deteksi berahi dan waktu berahi yang tepat akan menurunkan biaya yang dikeluarkan, (5) penghematan dan efisiensi tenaga kerja inseminator, dan (6) panen pedet serempak.

Pada tahun 2015, kegiatan sinkronisasi birahi dilaksanakan di daerah dan UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan total target kegiatan sebanyak 31.900 dosis, dengan rincian jumlah untuk daerah sebanyak 1.900 dosis dan di 4 UPT Ditjen PKH (BPTU HPT Sembawa, BIB Lembang, BPTU HPT Padang Mengatas dan BET Cipelang) sebanyak 30.000 dosis.

Dari total target kegiatan pada tahun 2015 yaitu sebanyak 31.900 dosis, dilaporkan realisasinya adalah sebanyak 25.573 dosis (80.1%).

Tabel 10. Realisasi Pelaksanaan Sinkronisasi di UPT Tahun 2015

Pelaksana	Sinkronisasi			IB			PKb			ATR		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
BPTU-HPT Padang Mengatas	3.500	3.577	102	3.577	3.190	89	3.577	2.895	81	2.895	1.419	49
BPTU-HPT Sembawa	7.500	5.872	78	5.872	5.675	97	5.872	5.240	89	5.240	2.273	43
BIB Lembang	7.500	7.507	100	7.507	7.507	100	7.507	7.430	99	7.430	5.123	69
BET Cipelang	7.500	7.424	99	7.424	-	-	7.424	-	-	-	-	-
	26.000	24.380	94	24.380	16.372	67	24.380	15.565	64	15.565	8.815	57

Sumber : Direktorat Budidaya Ternak

Tabel 11. Realisasi Pelaksanaan Sinkronisasi di Provinsi Tahun 2015

No.	Pelaksana	Sinkronisasi		
		Target	Realisasi	%
1	Kepulauan Riau	300	269	90
2	Kepulauan Bangka Belitung	300	242	81
3	Maluku	300	300	100
4	Maluku Utara	300	125	42
5	Papua	300	257	86
6	Papua Barat	400	0	-
Jumlah		1.900	1.193	63

Sumber : Direktorat Budidaya Ternak

#### b) InKA Penyebaran Jantan Sapi Potong dan Kerbau

Dalam rangka optimalisasi kelahiran, disamping dilaksanakan kegiatan optimalisasi IB, juga dilaksanakan kegiatan Intensifikasi Kawin Alam (InKA). Kawin alam merupakan salah satu pilihan dalam pengembangbiakan ternak pada daerah yang belum dilakukan IB. Berdasarkan data dari jumlah betina produktif sebanyak 4,9 juta ekor (sapi dan kerbau) yang sudah dapat di IB berjumlah lebih kurang 2,3 juta ekor, sehingga sisanya sebanyak 2,6 juta ekor pengembangannya dilaksanakan melalui kawin alam. Oleh karena itu kegiatan pengadaan jantan pemacek InKA tahun 2015 dilaksanakan dengan tujuan untuk penyebaran jantan unggul untuk kawin alam dan perbaikan rasio antara jantan dan betina sejalan dengan perbaikan mutu genetik ternak.

Pada tahun 2015, kegiatan InKA melalui pengadaan jantan pemacek dilaksanakan di 12 Provinsi dengan target pengadaan sapi jantan pemacek sebanyak 1.798 ekor. Adapun realisasi pelaksanaan kegiatan pengadaan dan distribusi pejantan pemacek sapi tersebut berjumlah sebanyak 2.142 ekor atau 119.13%.

Pengadaan kerbau jantan pemacek dilaksanakan di 8 Provinsi dengan target pengadaan sebanyak 437 ekor. Realisasi pelaksanaan kegiatan sebanyak 337 ekor atau 77.12%. Secara umum kegiatan InKA sapi potong dan kerbau terlaksana dengan baik dengan realisasi ternak mencapai lebih dari 100% dan kinerja pengadaan meningkat. Adapun rendahnya realisasi pengadaan jantan kerbau dikarenakan adanya pengurangan target kegiatan dan karena unit cost yang rendah.

#### 3.3.2.2. Pengembangan Budidaya Ternak Perah

Dalam rangka mengukur capaian kinerja kegiatan budidaya ternak perah, disamping memperhatikan input yang digunakan, proses dan hasil atau kinerja kegiatan yang dilakukan dengan cara mengukur capaian *output*, disamping melakukan pengukuran terhadap capaian *outcome* bagi kegiatan yang sudah dapat memberikan hasil bagi peternak.

Untuk mendukung Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak tahun 2015, perlu meningkatkan produksi dan produktivitas ternak melalui pengembangan budidaya

ternak perah yang berorientasi agribisnis, prioritas pada peningkatan skala usaha dan penguatan modal usaha kelompok, dengan penerapan tata cara budidaya ternak perah yang baik (*Good Farming Practice* (GFP)).

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemberian modal usaha kepada kelompok tani ternak, baik yang diberikan dalam bentuk agroinput berupa ternak dan sarana pendukung, disamping diberikan fasilitasi bimbingan teknis sapi perah yang berupa penerapan sistem informasi sapi perah dan fasilitasi GFP sapi perah yang dilaksanakan baik oleh pelaksana pada tingkat pusat maupun di daerah (provinsi dan Kabupaten/Kota).

Dalam mendukung pengembangan ternak perah pada tahun 2015 maka dilaksanakan kegiatan antara lain :

1) Pengembangan Budidaya Sapi Perah

Pengembangan budidaya sapi perah dilakukan melalui fasilitasi anggaran TP provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan di 7 provinsi dengan target output sebanyak 27 kelompok. Realisasi pelaksanaan kegiatan sebanyak 27 kelompok (100 %), dengan realisasi pengadaan ternak sebanyak 513 ekor (ternak betina calon induk).

Tabel 12. Realisasi Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Perah Tahun 2015

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Jmlh target klp/ekor	Jmlh Realisasi klp / ekor
1.	Sumatera Barat (1)	1. Agam	1 / 12	1 / 12
2.	Bengkulu (1 klp)	.Kapahiang	1 / 17	1 / 17
3.	Sulawesi Selatan (3 klp)	.Enrekang	3 / 54	3 / 54
4.	Jawa Timur (5 klp)	.Ponorogo 9. Magetan 10. Probolinggo 11. Blitar	1 / 20 2 / 40 1 / 20 1 / 20	1 / 20 2 / 40 1 / 20 1 / 20
5.	Jawa Barat (6 klp)	12. Bandung Barat 13. Bandung 14. Tasikmalaya 15. Cianjur 16. Subang 17. Garut	1 / 17 1 / 17 1 / 15 1 / 17 1 / 17 1 / 17	1 / 17 1 / 17 1 / 15 1 / 17 1 / 17 1 / 25
6.	Jawa Tengah (10 klp)	18. Wonosobo 19. Kota Salatiga 20. Banyumas 21. Boyolali 22. Magelang 23. Purbalingga 24. Semarang	1 / 20 1 / 20 2 / 40 1 / 20 2 / 40 1 / 20 2 / 40	1 / 20 1 / 20 2 / 40 1 / 20 2 / 42 1 / 20 2 / 40
7.	DIY (1 klp)	25. Sleman	1 / 20	1 / 20

Sumber : Direktorat Budidaya Ternak

2) Pengembangan Budidaya Kerbau Perah

Pengembangan budidaya kerbau perah dilakukan melalui fasilitasi anggaran TP provinsi dilaksanakan di 1 provinsi dan 1 kabupaten yakni Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan dengan target output sebanyak 3 kelompok. Realisasi pelaksanaan kegiatan sebanyak 3 kelompok (100 %), dengan realisasi pengadaan ternak sebanyak 51 ekor (ternak betina calon induk).

3) Pengembangan Budidaya Kambing Perah

Pengembangan budidaya kambing perah dilakukan melalui fasilitasi anggaran TP provinsi dan Kabupaten/kota dilaksanakan di 10 provinsi dan 23 kabupaten yakni dengan target output sebanyak 53 kelompok. Realisasi pelaksanaan kegiatan sebanyak 53 kelompok (100 %), dengan realisasi pengadaan ternak sebanyak 1378 ekor (ternak calon induk jantan 112 ekor dan betina 1.266 ekor). Masing masing seperti tabel berikut.

Tabel 13. Realisasi Kegiatan Pengembangan Budidaya Kambing Perah Tahun 2015

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Jmlh target klp/ekor	Jmlh Realisasi klp / ekor
1.	Sumatera Barat (4 klp)	1. Agam	2 / 26	2 / 30
		2. Kota Payakumbuh	2 / 26	2 / 30
2.	Sumatera Selatan ( 2 klp )	3. Kota Pagar Alam	2 / 33	2 / 33
3.	Riau ( 2 klp )	4. Kota Dumai	2 / 30	2 / 50
4.	Lampung ( 2 klp )	5. Pesawaran	2 / 54	2 / 52
5.	Bengkulu (2 klp)	6. Kapahiang	2 / 32	2 / 32
6.	Jawa Timur (12 klp)	7. Lumajang	2 / 56	2 / 56
		8. Pasuruan	2 / 56	2 / 56
		9. Situbondo	2 / 56	2 / 56
		10. Trenggalek	2 / 56	2 / 56
		11. Magetan	2 / 56	2 / 56
		12. Tulungagung	2 / 56	2 / 56
7.	Jawa Barat (10 klp)	13. Bandung Barat	2 / 32	2 / 32
		14. Bandung	4 / 64	4 / 72
		15. Tasikmalaya	4 / 64	4 / 76
8.	Jawa Tengah (9 klp)	16. Banyumas	2 / 60	2 / 60
		17. Banjarnegara	2 / 60	2 / 60
		18. Purworejo	2 / 60	2 / 60
		19. Magelang	1 / 60	1 / 60
		20. Purbalingga	2 / 60	2 / 60
9.	DIY (6 klp)	21. Bantul	4 / 136	4 / 136
		22. Kulonprogo	4 / 136	4 / 136
10.	Bali (2 klp)	23. Buleleng	2/60	2/60

Sumber : Direktorat Budidaya Ternak

4) Bimbingan Teknis Sapi Perah

Kegiatan Bimbingan Teknis Sapi Perah yakni kegiatan Dekonsentrasi kepada Provinsi yang dialokasikan di 14 provinsi yang berupa kegiatan fasilitasi GFP Sapi Perah dan Penerapan Sistem Informasi Sapi Perah.

Alokasi kegiatan fasilitasi penerapan GFP Sapi Perah berada di 14 Provinsi yaitu : 1) Prov. Sumatera Utara; 2) Prov. Sumatera Selatan; 3) Prov. Riau; 4) Prov. Lampung; 5) Prov. Jawa Tengah; 6) Prov. Jawa Timur, 7) Provinsi DIY, 8) Prov. Jawa Barat; 9) Prov. Sulawesi Selatan; 10) Prov. Sulawesi Utara; 11) Prov. Bengkulu; 12) Prov. Kalimantan Selatan; 13) Kalimantan Timur dan 14) Prov. Sumatera Barat. Terealisasi di 11 provinsi sedangkan yang tidak realisasi di Provinsi Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain :1) Bimbingan Teknis/pembinaan; 2) Rehabilitasi Kandang; 3) Pengadaan Milk Can; 4) Pakan Konsentrat; 5) Recording ternak; 6) Workshop; 7) Apresiasi dan 8) Sekolah Lapang.

Kegiatan Penerapan Sistem Informasi Sapi Perah di alokasi di 5 Provinsi yakni 1) Sumatera Barat, 2) Jawa Barat, 3) Jawa Tengah, 4) DIY, 5) Jawa Timur, dan 6) Sulawesi Selatan. Realisasi kegiatan di 4 Provinsi sedangkan provinsi yang tidak melaksanakan adalah Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Kegiatan yang dilaksanakan berupa Workshop penerapan SISI Sapi Perah.

### 3.3.2.3. Pengembangan Budidaya Unggas Lokal Dan Aneka Ternak

Kegiatan pengembangan budidaya unggas lokal dan pengembangan budidaya babi dilaksanakan untuk mendukung peningkatan populasi unggas lokal (ayam dan itik) dan babi. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi kegiatan koordinasi, pembinaan dan monitoring, pelaksanaan kegiatan di daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 adalah:

- 1) Pengembangan Budidaya Unggas Lokal
  - a) Pengembangan Budidaya Ayam Lokal

Kegiatan pengembangan budidaya ayam lokal melalui dana TP provinsi dan kabupaten/kota semula yang memfasilitasi 146 kelompok yang dilaksanakan di 15 provinsi, di 46 Kabupaten/Kota.

Tabel 14. Realisasi Kegiatan Pengembangan Budidaya Ayam Lokal Tahun 2015

No.	Provinsi	Kabupaten	Jmlh target klp/ekor	Jmlh Realisasi klp / ekor
1.	Sumut	1. Karo	3 / 6.000	3 / 6.000
2.	Sumbar ( 9 klp )	2. Limapuluh Kota	2 / 4.000	2 / 4.000
		3. Kota Solok	2 / 4.000	2 / 4.000
		4. Kota Sawahlunto	3 / 6.000	3 / 6.000
		5. Padang Pariaman	2 / 4.000	2 / 4.000
3.	Riau ( 6 klp )	6. Kota Pekanbaru	5 / 10.000	5 / 10.000
		7. Kota Dumai	1 / 2.000	1 / 2.000
4.	Sumsel ( 8 klp )	8. Kota Palembang	5 / 10.000	5 / 10.000
		9. Lubuk Linggau	3 / 6.000	3 / 6.000
5.	Lampung ( 3 klp )	10.Kota bandar Lampung	3 / 6.000	3 / 6.000

6.	Banten	11. Lebak	3 / 6.000	3 / 6.000
		12. Pandeglang	3 / 6.000	3 / 6.000
7.	Jabar ( 20 klp )	13. Bandung Barat (TP kab)	5 / 10.000	5 / 10.000
		14. Ciamis (TP kab)	3 / 6.000	3 / 6.000
		15. Majalengka	3 / 6.000	3 / 6.000
		16. Sumedang/Ciamis (TP prov)	3 / 6.000	3 / 6.000
		17. Bandung (TP kab)	6 / 12.000	6 / 12.000
8.	Jateng ( 36 klp )	18. Kota Semarang	3 / 6.000	3 / 6.000
		19. Kendal	3 / 6.000	3 / 6.000
		20. Kota Salatiga (TP kab)	2 / 4.000	2 / 4.000
		21. Rembang	3 / 6.000	3 / 6.000
		22. Sukoharjo	3 / 6.000	3 / 6.000
		23. Sragen (TP kab)	3 / 6.000	3 / 6.000
		24. Grobogan	4 / 8.000	4 / 8.000
		25. Blora	3 / 6.000	3 / 6.000
		26. Cilacap	3 / 6.000	3 / 6.000
		27. Karanganyar	3 / 6.000	1 / 2.000
9.	DIY ( 3 klp )	28. Banyumas	3 / 6.000	3 / 6.000
		29. Semarang		
10.	Jatim ( 14 klp )	30. Kota Yogyakarta	3 / 6.000	3 / 6.000
		31. Banyuwangi (TP kab)	2 / 4.000	2 / 4.000
		32. Gresik	4 / 8.000	4 / 8.000
		33. Bondowoso	3 / 6.000	3 / 6.000
		34. Pamekasan	3 / 6.000	3 / 6.000
11.	Kalbar ( 10 klp )	35. Tulungagung (TP kab)	2 / 4.000	2 / 4.000
		36. Sambas	2 / 4.000	2 / 4.000
		37. Sintang	2 / 4.000	2 / 4.000
		38. Kubu Raya	2 / 4.000	2 / 4.000
		39. Kapuas Hulu	2 / 4.000	2 / 4.000
12.	Kalsel ( 10 klp )	40. Bengkayang	2 / 4.000	2 / 4.000
		41. Banjarbaru	8 / 16.000	0
13.	Kaltim ( 3 klp )	42. Kota Baru	2 / 4.000	0
		43. Kota Samarinda	3 / 6.000	3 / 6.000
14.	Kaltara	44. Kota Tarakan	3 / 6.000	3 / 6.000
15.	Sulsel	45. Bantaeng	6 / 12.000	6 / 12.000
		46. Maros	6 / 12.000	6 / 12.000
15 provinsi		47. kabupaten	146 klp / 292.000 ekor	44 kab / 134 klp / 268.000 ekor

Sumber : Direktorat Budidaya Ternak

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengembangan ayam lokal dengan target 146 kelompok terealisasi sebanyak 134 kelompok (91,78 %). Sedangkan realisasi populasi ayam lokal dari target 292.000 ekor terealisasi sebanyak 268.000 ekor (91,78 %). Tidak tercapainya target diakibatkan oleh : a) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Selatan tidak melaksanakan kegiatan pengembangan budidaya ayam lokal sebanyak 10 kelompok karena adanya kesalahan penginputan e-proposal dan permasalahan di internal

dinas, b) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas merevisi 2 kelompok ayam lokal menjadi 2 kelompok itik karena kondisi potensi wilayah di Kabupaten Banyumas kurang mendukung untuk melaksanakan pengembangan ayam lokal.

b) Pengembangan Budidaya Itik

Pelaksanaan pengembangan budidaya itik dengan target 45 kelompok terealisasi sebanyak 45 kelompok (100%). Sedangkan realisasi populasi ayam lokal dari target 45.000 ekor terealisasi sebanyak 45.000 ekor (100%).

Tabel 15. Realisasi Kegiatan Pengembangan Budidaya Itik Tahun 2015

No.	Provinsi	Kabupaten	Jmlh target klp/ekor	Jmlh Realisasi klp / ekor
1.	Sumbar ( 3 klp )	1. Limapuluh Kota	3 / 3.000	3 / 3.000
2.	Jambi ( 3 klp )	2. Kerinci	3 / 3.000	3 / 3.000
3.	Banten ( 5 klp )	3. Lebak	2 / 2.000	2 / 2.000
		4. Pandeglang	3 / 3.000	3 / 3.000
4.	Jabar ( 20 klp )	5. Cirebon, dialihkan ke :	9 / 9.000	
		6. Sukabumi	1 / 1.000	1 / 1.000
		7. Tasikmakaya	2 / 2.000	2 / 2.000
		8. Majalengka	1 / 1.000	1 / 1.000
		9. Kerawang	1 / 1.000	1 / 1.000
		10. Bandung Barat	2 / 2.000	2 / 2.000
5.	Jateng ( 6 klp )	11. Kuningan	2 / 2.000	2 / 2.000
		12. Brebes	2 / 2.000	2 / 2.000
		13. Tegal	2 / 2.000	2 / 2.000
6.	Jatim ( 9 klp )	14. Banyumas *)	2 / 2.000	2 / 2.000
		15. Lamongan	4 / 4.000	4 / 4.000
7.	Kalsel ( 2 klp )	16. Mojokerto	5 / 5.000	5 / 5.000
		17. Hulu Sungai Utara (TP kab)	2 / 2.000	0
8.	Kalteng ( 6 klp )	18. Kotawaringin Barat ( TP kab )	2 / 2.000	2 / 2.000
		19. Kotawaringin Timur	2 / 2.000	2 / 2.000
		20. Sukamara	2 / 2.000	2 / 2.000
9.	Sulsel	21. Takalar	4 / 4.000	4 / 4.000
9 provinsi		22. kabupaten	45 klp / 45.000 ekor	19 kab /45 klp / 45.000 ekor

Sumber : Direktorat Budidaya Ternak

Realisasi 100% ini dikarenakan adanya perubahan komoditi yang terjadi di Kabupaten Banyumas 2 kelompok ayam lokal menjadi 2 kelompok itik yang menggantikan 2 kelompok yang tidak terealisasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, sehingga realisasi sesuai target.

2) Pengembangan Budidaya Babi

a) Pengembangan Budidaya Babi melalui dana APBN

Kegiatan pengembangan budidaya babi APBN Tahun 2015 terealisasi di 14 kelompok dari target 15 kelompok (93,33%) dengan jumlah populasi 736 ekor.

Tabel 16. Realisasi Kegiatan Pengembangan Budidaya Babi melalui dana APBN

No.	Provinsi	Kabupaten	Jmlh target klp	Jmlh Realisasi klp / ekor
1.	Sumut ( 3 klp )	1. Nias Selatan	1	1 / 36 : 5
		2. Pakpak Barat	1	1 / 36 : 5
		3. Samosir	1	1 / 36 : 5
2.	Bali ( 2 klp )	4. Klungkung	2	2 / 58 : 170 (170 ekor anak jantan untuk digemukkan)
3.	Sulut ( 6 klp )	5. Kota Tomohon	1	1 / 50
		6. Kota Bitung	1	1 / 50
		7. Kota Manado	1	1 / 50
		8. Minahasa Utara	1	1 / 49 : 1
		9. Minahasa	1	1 / 50
4.	Papua ( 4 klp )	10. Jayapura	1	1 / 20 : 3
		11. Biak Numfor	1	1 / 21 : 2
		12. Waropen	1	1 / 21 : 2
		13. Intan Jaya	1	0
5.	Papua Barat	14. Sorong	1	1 / 47 : 19
5 provinsi		14 kabupaten	15 klp	13 kab / 14 klp / 736 ekor

Sumber : Direktorat Budidaya Ternak

Satu kelompok tidak terealisasi yaitu di Kabupaten Intanjaya yang merupakan dana TP Provinsi Papua, hal yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan karena rekanan yang tidak sanggup menyediakan sapronak disebabkan tingginya biaya transportasi (rekanan tidak dapat memperkirakan harga usulan kontrak (HPS) dan harga real di lapangan).

b) Pengembangan Budidaya Babi APBN-P

Kegiatan pengembangan budidaya babi APBN-P Tahun 2015 terealisasi di 37 kelompok dari target 39 kelompok (94,87%) dengan jumlah populasi 1.884 ekor.

Tabel 17. Realisasi Pengembangan Budidaya Babi APBN-P Tahun 2015

No.	Provinsi	Kabupaten	Jmlh target klp / ekor	Jmlh Realisasi klp / ekor
1.	Sumut ( 3 klp )	1. Tapanuli Utara	1 / 50	1 / 47 : 5
		2. Pakpak Barat	5 / 250	5 / 235 : 25
		3. Humbang Hasundutan	1 / 50	1 / 47 : 5
2.	Bali (2 klp)	4. Badung	3 / 150	2 / 120 : 30
		5. Kota Denpasar	2 / 100	0
		6. Gianyar	2 / 100	2 / 80 : 20

		7. Bangli	2 / 100	2 / 80 : 20
		8. Tabanan	3 / 150	3 / 120 : 30
3.	Kalbar (9 klp)	9. Bengkayang	2 / 100	2 / 80 : 20
		10. Landak	3 / 150	3 / 120 : 30
		11. Sanggau	3 / 150	3 / 120 : 30
		12. Kota Singkawang	1 / 50	1 / 40 : 10
4.	Papua (11 klp)	13. Jayapura	3 / 150	3 / 138 : 12
		14. Jawawijaya	3 / 150	3 / 135 : 15
		15. Yakohimo	3 / 150	3 / 120 : 30
		16. Lanny Jaya	2 / 100	2 / 80 : 20
4 provinsi	16 kabupaten		39 klp / 1.950	15 kab / 37 klp / 1.884 (1.562 : 322) ekor

Sumber : Direktorat Budidaya Ternak

Dua kelompok tidak terealisasi yaitu di Kabupaten Lanijaya yang merupakan dana TP Provinsi Papua, hal yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan karena rekanan yang tidak sanggup menyediakan sapronak disebabkan tingginya biaya transportasi (rekanan tidak dapat memperkirakan harga usulan kontrak (HPS) dan harga real di lapangan). Pihak panitia pengadaan tidak sanggup melaksanakan tender ulang

### 3.3.2.4. Usaha dan Kelembagaan

#### 1) Pembinaan Sarjana Membangun Desa (SMD)

##### a) Sarjana Membangun Desa (SMD)

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Monitoring Perkembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2015 dilakukan melalui pertemuan koordinasi dan kunjungan ke Daerah untuk melihat realisasi pelaksanaan kegiatan SMD.

Pada bulan Oktober 2015, bersamaan dengan kegiatan bulan bakti peternakan dan kesehatan hewan, telah dilaksanakan Petemuan Sarjana Membangun Desa Nasional 2015 pada tanggal 2 – 4 Oktober 2015 di Hotel Crown Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dengan Peserta Pertemuan berjumlah 84 orang perwakilan SMD dan SMD WP yang berasal dari provinsi Sumatera Barat 5 orang, provinsi Lampung 6 orang, provinsi Jawa Barat 25 orang, provinsi Jawa tengah 15 orang, provinsi DIY 9 orang, provinsi Jawa timur 15 orang, provinsi Sulawesi selatan 4 orang, provinsi Nusa Tenggara Barat 4 orang, provinsi Nusa Tenggara Timur 1 orang dan narasumber 5 orang, serta masing masing 1 orang pendamping dari dinas peternakan provinsi.

Dari penyampaian materi dari beberapa narasumber tersebut dapat disampaikan rumusannya sebagai berikut :

- (1) Pertemuan Nasional SMD dan SMD WP tahun 2015 ini merupakan forum komunikasi dan diskusi bagi para SMD/SMD WP
- (2) Sosialisasi kegiatan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) diharapkan ke depannya SMD/SMD WP dapat berkontribusi dalam pengembangan peternakan Indonesia.

- (3) SMD/SMD WP sangat berpeluang menjadi manajer SPR yang mempunyai tugas : menjadi narasumber bagi peternak ; menjadi penghubung antara gugus perwakilan pemilik ternak (GPPT) dengan *stakeholders* dalam SPR di semua bidang peternakan (Pakan, Keswan, Pasar, Perguruan Tinggi dan swasta)
- (4) Indonesia harus bisa seperti Australia yang mampu memiliki peternakan berskala besar. Karena kepemilikan ternak oleh masing-masing peternak di Indonesia jumlahnya sangat sedikit, maka diupayakan untuk mengubah cara berpikir peternak agar bisa membentuk usaha secara kolektif.

b) Sarjana Membangun Desa Wirausahawan Pendamping (SMD WP)

Program Sarjana Membangun Desa Wirausahawan Pendamping (SMDWP) tahun 2015, telah dilaksanakan pada 9 provinsi yaitu: Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, D I Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. Peserta yang mengikuti seleksi tertulis dan wawancara sebanyak 236 orang yang berasal dari provinsi Sumatera Barat sebanyak 58 orang; provinsi Lampung sebanyak 9 orang; provinsi Jawa Barat sebanyak 24 orang; provinsi Jawa Tengah sebanyak 32 orang; provinsi D I Yogyakarta sebanyak 10 orang; provinsi Jawa Timur sebanyak 21 orang; provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 37 orang; provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 20 orang; provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 25 orang.

Hasil dari pelaksanaan program SMDWP ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 130/Kpts/PD.410//F/02/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Penetapan Sarjana Membangun Desa Wirausahawan Pendamping (SMD WP) Terpilih Tahun Anggaran 2015, sebanyak 100 orang SMD WP terpilih yang berasal dari provinsi Sumatera Barat sebanyak 33 orang; provinsi Lampung sebanyak 6 orang; provinsi Jawa Barat sebanyak 16 orang; provinsi Jawa Tengah sebanyak 18 orang; provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 4 orang; provinsi Jawa Timur sebanyak 12 orang; provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 24 orang; provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 16 orang; provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 5 orang untuk melaksanakan tugas sebagai tenaga pembimbing, pendamping dan pemberdayaan kelompok tani ternak/koperasi dalam mengembangkan usaha agribisnis berbasis peternakan.

Sedangkan dari perpanjangan SMD WP tahun 2014 terpilih sebanyak 66 orang yang berasal dari provinsi Sumatera barat sebanyak 14 orang; provinsi Lampung sebanyak 5 orang ; provinsi Jawa Barat sebanyak 9 orang ; provinsi Jawa Tengah sebanyak 12 orang; provinsi Jawa Timur sebanyak 12 orang; provinsi DIY sebanyak 7 orang; provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 10 orang; provinsi Sulawesi selatan 1 orang.

Dari 134 orang SMD WP 2015 yang telah ditetapkan, terdapat 10 orang menyatakan mengundurkan diri, yaitu: 2 orang dari Provinsi Jawa Tengah; 4 orang dari Provinsi Jawa Barat; 1 orang dari Provinsi Lampung; 1 orang dari Provinsi Sumatera Barat; 1 orang dari Nusa Tenggara Barat dan 1 orang dari Provinsi Jawa Timur sehingga total SMD WP tahun 2015 menjadi 124 orang.

Dalam rangka memperluas wawasan, meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap para SMD WP, dilaksanakan workshop pembekalan Sarjana Membangun Desa Wirausahawan Pendamping (SMD WP) dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 18-20 Maret 2015 dan 23-25 Maret 2015, secara rinci sebagai berikut;

(1) Tanggal 18-20 Maret 2015

Workshop pembekalan Sarjana Membangun Desa Wirausahawan Pendamping dilaksanakan pada tanggal 18-20 Maret 2015 di BPTU HPT Padang Mengatas Provinsi Sumatera Barat, yang dihadiri oleh Direktur Budidaya Ternak, Staf Direktorat Budidaya Ternak selaku panitia, narasumber dari BPSDMP Kementerian Pertanian, Tim KUBIK/LDC, Tim Pembina SMD/SMD WP Provinsi Sumatera Barat dan Sarjana Membangun Desa Wirausahawan Pendamping terpilih tahun 2015 khusus wilayah provinsi Sumatera Barat dengan jumlah peserta sebanyak 33 orang.

(2) Tanggal 23-25 Maret 2015

Workshop pembekalan SMD-WP dilaksanakan pada tanggal 23-25 Maret 2015 di Asrama Haji Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, yang dihadiri oleh Direktur Budidaya Ternak, Staf Direktorat Budidaya Ternak selaku panitia, narasumber dari BPSDMP Kementerian Pertanian, Puslitbangnak Kementerian Pertanian, Tim KUBIK/LDC, Tim Pembina SMD/SMD WP Provinsi dan Sarjana Membangun Desa Wirausahawan Pendamping terpilih tahun 2015 untuk wilayah provinsi Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan dengan jumlah peserta sebanyak 98 orang.

Adapun hasil Workshop Pembekalan SMD-WP Tahun 2015 sebagai berikut :

- (1) Modal awal untuk mencapai keberhasilan Sarjana Membangun Desa Wirausahawan Pendamping adalah memiliki tujuan/niat dan visi menjadi SMD WP dalam rangka pendampingan, pembinaan dan pemberdayaan kelompok peternak
- (2) Secara prinsip antara kelompok peternak dan kelembagaan koperasi adalah sama, hanya ruang geraknya yang membedakan yakni kelompok peternak disektor produksi sedangkan koperasi disektor usaha. Untuk itu, yang perlu dilakukan adalah bagaimana

mengupgrade kelompok peternak memiliki usaha/bisnis yang ekonomis dan meningkatkan status kelembagaannya menjadi koperasi atau badan usaha lainnya.

- (3) SMD-WP dalam melakukan pendampingan, pembinaan dan pemberdayaan kelompok harus mengenal kelompok dengan baik, sehingga dapat meningkatkan status kelompok peternak mulai dari pemula, lanjut, madya dan utama serta meningkatkan menjadi gabungan kelompok peternak (gapoktan) ataupun LKMA.
- (4) Berbagai potensi dan sumberdaya lokal yang bisa dioptimalkan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ternak, termasuk limbah ternak dan limbah pertanian melalui terapan teknologi tepat guna.
- (5) Pentingnya Pemahaman Tugas dan Peran SMD WP dalam pendampingan, pembinaan dan pemberdayaan kelompok serta tata cara pengisian buku kerja
- (6) Peningkatan kapasitas SMD WP dalam memulai, membangun, dan mengembangkan dinamika kelompok serta usaha kelompok yang mandiri dan berdaya saing
- (7) Penyelesaian dokumen kontrak Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Budidaya Ternak dengan Sarjana Membangun Desa Wirausahawan Pendamping Tahun 2015

Pada bulan November 2015 telah dilakukan monitoring evaluasi terpadu yang melibatkan unsur Perguruan Tinggi dan dinas Provinsi. Dari hasil evaluasi tersebut dapat dilanjutkan kontrak bagi 50 orang SMD WP tahun 2016.

## 2) Penguatan Kelembagaan Peternak

Kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah dalam rangka memperkuat kelembagaan peternak baik dalam aspek usaha maupun aspek kelembagaan sosialnya. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyiapan Pedoman/Petunjuk, Pertemuan Kelembagaan Peternak, Pembinaan, Supervisi serta monitoring dan evaluasi.

Pertemuan Penguatan Kelembagaan Peternak I tahun 2015 dilaksanakan di Aula Pertemuan Kwarcab Pramuka Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 10 sampai 12 Juni 2015. (jadwal pelaksanaan terlampir). Kegiatan ini dihadiri oleh SMD WP dan kelompok binaannya, Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan, dan narasumber dari berbagai instansi.

Beberapa hasil dari pertemuan Penguatan Kelembagaan Peternak I ;

- a. Pertemuan Penguatan Kelembagaan Peternak dapat dijadikan sharing antar peserta dalam rangka memperkuat bisnis, jaringan dan kewirausahawan

- b. Reorientasi kelembagaan peternak menjadi kelembagaan usaha yang berbadan hukum, mandiri dan berdaya saing, melalui sinergis penumbuhan dan pengembangan kelembagaan usaha, seperti koperasi.
- c. Peningkatan kapasitas kelembagaan peternak menjadi kelembagaan usaha baik administrasi, teknis dan skala usaha melalui akses skim pembiayaan diperbankan
- d. SDM kelembagaan peternak dapat mengambil pelajaran dari model manajemen peternakan di Australia dan bagaimana aplikasinya di Indonesia
- e. BI dan BRI mendorong pembangunan peternakan melalui pendampingan SMDWVP menuju kelembagaan yang feasible dan bangkable, disamping itu perlu peningkatan kualifikasi kelembagaan peternak baik secara administrasi, teknis dan usahanya yang accountable. Dalam artian bahwa uang yang difasilitasi oleh bank adalah uang rakyat yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan, bukan berarti mempersulit peternak dalam mendapatkan fasilitasi pembiayaan dari perbankan.
- f. Pendampingan, pembinaan dan pemberdayaan peternak agar terus dilakukan untuk mengupgrade kelembagaan peternak sehingga dapat mengakses pemodalan dari pihak perbankan dan sumber pembiayaan lainnya.

Pertemuan Penguatan Kelembagaan Peternak ke II (kedua) tahun 2015 dilaksanakan di Luminor Hotel Surabaya Provinsi Jawa Timur pada tanggal 18 sampai 20 November 2015.

Dari penyampaian materi oleh narasumber dan hasil diskusi antara peserta dan narasumber secara garis besar dapat disampaikan rumusannya sebagai berikut :

- (1) Pertemuan Penguatan Kelembagaan Peternak dapat dijadikan sharing antar peserta dalam rangka memperkuat bisnis, jaringan dan kewirausahawan
- (2) Reorientasi kelembagaan peternak menjadi kelembagaan usaha yang berbadan hukum, mandiri dan berdaya saing, melalui sinergis penumbuhan dan pengembangan kelembagaan usaha, seperti koperasi.
- (3) Peningkatan kualifikasi kelembagaan peternak menjadi kelembagaan usaha baik administrasi, teknis dan skala usaha dengan mengakses skim kredit program yang disubsidi Pemerintah maupun kredit komersial.
- (4) Perubahan pola pikir/*mindset* peternak terhadap kegiatan peternakan yang dilaksanakan adalah mulia, dimana peternak harus bangga dengan menjadi peternak dan menjadikan usaha peternakan yang dilakukan sebagai usaha utama dengan tujuan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak. Bahwa sektor peternakan yang ditekuni

peternak telah mampu memberikan kontribusi dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan peternak.

- (5) BRI mendorong pembangunan peternakan yang dilakukan oleh petani peternak menuju kelembagaan yang feasible dan bangkable, disamping itu perlu peningkatan kualifikasi kelembagaan peternak baik secara administrasi, teknis dan usahanya yang accountable. Dalam artian bahwa kelompok harus bertanggung jawab, yang berarti disaat peternak mengajukan kelayakan pinjaman kepada bank dengan kesiapannya, maka setelah dana diterima peternak/kelompok maka juga harus bertanggungjawab dalam penggunaan dan pengembaliannya kepada bank.
  - (6) Membangun komunikasi dan koordinasi lintas peternak, lembaga perbankan, koperasi dalam membangun kemitraan dan jaringan usaha yang lebih luas dan saling menguntungkan
  - (7) Membangun soliditas anggota kelompok dalam menjalankan usaha bersama dan dinamika pengurus serta kegiatan yang dilaksanakan. Pengelolaan usaha bersama kelompok, selain kesadaran anggota dan kemampuan manajerial kepemimpinan sangatlah dibutuhkan agar kelompok terus bisa berjalan dan maju
  - (8) Bahwa fasilitasi dan ruang untuk membentuk koperasi sangat terbuka dengan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh peternak. Dengan adanya koperasi sebagai badan usaha peternak, mempunyai bargaining position yang sama dengan kelembagaan lainnya. Untuk itu perlu adanya SDM yang terampil dalam mengelola kelembagaan koperasi, sehingga dapat meningkatkan kapasitas usaha dan kesejahteraan anggota (peternak).
- 3) Dinamika Ketersediaan Sapi/Kerbau Siap Potong

Sapi potong merupakan ternak yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia dan penyebaran populasinya menyebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan rata-rata kepemilikan sapi potong yang masih kecil yaitu berkisar 2-4 ekor per rumah tangga peternak. Kondisi tersebut mengarahkan kepada pola pemeliharaan yang bersifat sambilan

Pada dasawarsa terakhir, daging sapi merupakan salah satu bahan pangan pokok yang memiliki nilai strategis dan mempengaruhi perekonomian nasional dan sempat menjadi salah satu sumber dari lima besar penyebab inflasi. Oleh sebab itu sangat diperlukan adanya data yang akurat tentang ketersediaan sapi siap potong untuk menjadi acuan bagi pengambilan keputusan

Data ketersediaan sapi siap potong yang akurat merupakan tugas lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama dengan Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di daerah. Dalam perhitungan data tersebut perlu ada suatu persepsi yang sama diantara para *stakeholders* sehingga perhitungan dinamika ketersediaan sapi siap potong benar-benar valid.

Kegiatan Dinamika Ketersediaan Sapi Siap Potong meliputi kegiatan Persiapan Penyusunan Draft Pedoman, Pelaksanaan Penyusunan Draft Pedoman dan Pembahasan Draft Pedoman Dinamika Ketersediaan Sapi Siap Potong. Pedoman Ketersediaan Sapi Siap Potong sangat penting dan strategis karena sebagai sarana untuk menyajikan data ketersediaan sapi potong dan sapi siap potong di setiap wilayah provinsi maupun nasional, serta untuk memberikan gambaran tentang peta kemampuan setiap wilayah propinsi dalam penyediaan kebutuhan akan daging sapi.

#### **3.3.2.5. Birahi Digertak Populasi Sapi Meningkat**

Tulang punggung penyediaan daging sapi/kerbau di Indonesia adalah peternakan rakyat, yang umumnya dalam skala kecil dengan kepemilikan 2-3 ekor, sebagai usaha sampingan. Dalam rangka mendukung peningkatan populasi, produksi dan produktivitas temak telah dilaksanakan Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB) dengan murah, mudah dan cepat. Kendala aplikasi IB yang paling umum terjadi adalah sulitnya pengenalan birahi (estrus). Birahi sapi sering sulit dikenali karena banyaknya kasus anestrus dan birahi tenang (silent heat) sehingga mengakibatkan kurang tepatnya pengenalan atau deteksi birahi dan ketidaktepatan pelaksanaan IB.

Aspek lain yang berpotensi menghambat keberhasilan IB adalah gangguan reproduksi yaitu perubahan fungsi normal reproduksi baik jantan maupun betina yang disebabkan oleh non-penyakit dan penyakit. Gangguan reproduksi dapat bersifat sebagian atau secara lengkap. Gangguan yang bersifat secara lengkap dan permanen menyebabkan kemajiran ternak sehingga ternak tidak dapat dikembangkan. Sedangkan gangguan yang bersifat sementara (temporer) yang disebabkan oleh faktor hormonal, penyakit infeksius, dan lingkungan masih dapat ditangani untuk mengatasi infertilitas atau menurunnya kesuburan.

Ternak sapi/kerbau yang telah disiapkan untuk program IB dan telah melalui pemeriksaan gangguan reproduksi maka dilakukan sinkronisasi birahi, yaitu upaya menimbulkan birahi dengan menggunakan hormon pada sekelompok ternak sapi/kerbau agar terjadi peningkatan kesuburan.

Kelahiran kumulatif hasil IB tahun 2010-2014 sebesar 7,57 juta ekor (80,44%) dengan akseptor 11,10 juta ekor (72,94%). Sedangkan kelahiran IB tahun 2015 (sampai Oktober 2015) sebesar 940 ribu ekor (50,44%) dengan akseptor 1,43 juta ekor (65,52%).

Kegiatan percepatan peningkatan populasi yang akan dilakukan melalui sinkronisasi birahi dan optimalisasi pelaksanaan IB (GBIB). GBIB ini bertujuan untuk optimalisasi pelaksanaan IB, penyerentakan birahi dalam upaya akselerasi kelahiran, peningkatan akseptor IB, memperluas jangkauan pelayanan IB dan tertanganinya kasus gangguan reproduksi.

Untuk kegiatan sinkronisasi birahi regular dilaksanakan melalui dana Dekonsentrasi (1.900 ekor) dan dana KD oleh 4 Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu BPTU-HPT Padang Mengatas,

BPTU-HPT Sembawa, BIB Lembang dan Balai Embrio Ternak Cipelang (30.000 ekor).

Selain sinkronisasi berahi regular pada tahun 2015 juga dialokasikan anggaran melalui dana APBN-P yaitu kegiatan sinkronisasi berahi dan Gertak Berahi Inseminasi Buatan (GBIB), yang dilaksanakan di 30 propinsi oleh 10 Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan target jumlah akseptor sebanyak 691.000 ekor akseptor.



*GBIB Ternak Kerbau di Kab. Hasundutan, Sumatera Utara, 2015*



*GBIB Ternak Sapi di Sultra, 2015*



*Pelaksanaan Gertak Birahi (GBIB) di Kabupaten Gunung Kidul, DIY, 2015*



*Pelaksanaan Gertak Birahi (GBIB) di Kabupaten Gunung Kidul, DIY, 2015*

### 3.3.3. Pakan Ternak

Direktorat Pakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi pakan. Dan mempunyai fungsi : 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan; 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan; 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan; 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan; 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan; dan 6) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pakan.

#### 3.3.3.1. Upaya Mengurangi Impor Jagung Pakan Ternak

Kebutuhan pakan ternak unggas setiap tahun terus meningkat begitu juga dengan kebutuhan bahan pakan terutama jagung. Tahun 2015 produksi pakan pabrikaan diperkirakan 17,2 juta ton dimana 50% nya adalah jagung atau sebanyak 8,6 juta ton. Dari kebutuhan jagung tersebut biasanya dipenuhi dari jagung lokal dan impor. Pada tahun 2014 impor jagung mencapai 3 juta ton sehingga pada tahun



*Direktur Pakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Nasrullah, bersama tim pemantau mengecek langsung lahan yang masih berproduksi di daerah sentra jagung Indonesia*

2015 diupayakan untuk menekan impor. Sampai akhir Oktober 2015 impor jagung sebanyak 2.570.933 ton sesuai dengan SPP yang sudah dikeluarkan sedangkan SPP yang belum dikeluarkan sebanyak 181.420 ton.

Sampai saat ini jagung sebagai bahan pakan belum tergantikan sehingga pakan unggas

sangat tergantung pada ketersediaan jagung. Pembatasan impor jagung telah berhasil meningkatkan harga jagung lokal sehingga memberikan keuntungan yang layak pada petani. Ketersediaan jagung lokal yang terbatas dengan harga yang tinggi menyebabkan peternak sulit mendapatkan jagung lokal termasuk pabrik pakan

### 3.3.3.2. Melimpahnya Potensi Hijauan Pakan ternak Indonesia



*Integrasi Sapi Bali di lokasi perkebunan sawit di Riau*

Hijauan pakan temak (HPT) mutlak diperlukan dan harus tersedia dalam usaha budidaya temak ruminansia. Jumlah kebutuhan HPT per ekor sebesar 10-15% Bobot Badan setara dengan 6,25 kg bahan kering per hari per satuan ternak. Bagian terbesar HPT berupa rumput lokal atau rumput alam, baik yang berasal dari padang penggembalaan umum, pematang sawah, pinggir jalan, pinggir hutan, saluran irigasi atau perkebunan. Rendahnya sebaran dan ketersediaan HPT sepanjang tahun menjadi

salah satu penyebab sulit berkembangnya populasi dan produktivitas temak ruminansia di Indonesia. Sementara secara ekonomis pengusahaan HPT merupakan usaha tani yang menguntungkan terutama jika menggunakan jenis dan varietas unggul. Usaha budidaya HPT umumnya dapat terus dilakukan tanpa investasi penanaman kembali dan pengolahan lahan, karena sifatnya yang tumbuh kembali (*regrowing*) sehingga dapat menghemat biaya produksi. Permasalahan utama penyediaan hijauan pakan di Indonesia antara lain : (1) fluktuasi produksi karena musim, (2) rendahnya kualitas HPT terutama rumput lokal, (3) tingginya laju konversi lahan pangonan, dan (4) terbatasnya sebaran lahan dan sumber bibit HPT di masyarakat.

Pakan untuk memenuhi kebutuhan ternak non ruminansia sebagian besar dipenuhi oleh pakan pabrikan, sedangkan pakan konsentrat untuk ternak ruminansia masih diusahakan oleh kelompok-kelompok peternak dan koperasi pada unit usaha pengolahan pakan skala kecil. Sampai dengan tahun 2015, terdapat 124 unit pengolahan pakan yang telah memproduksi pakan olahan yang tersebar di 98 kabupaten/kota pada 27 provinsi.

Upaya yang telah ditempuh oleh Pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan pakan ternak yang berkualitas dilakukan melalui : (1) Pengembangan Integrasi Tanaman Ternak Ruminansia; (2) Pengembangan Padang Penggembalaan; (3) Pengembangan HPT di UPT Pusat; (4) Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Berkualitas di Masyarakat; (5) Sertifikasi Pakan.



*Integrasi Sapi Bali di lokasi perkebunan sawit di Kota Waringin Barat Prov. Kalimantan Tengah*

Pengembangan Intergrasi Temak Tanaman Ruminansia ditujukan untuk memfasilitasi kelompok-kelompok peternak yang menerapkan konsep integrasi dalam pemeliharaan ternak ruminansia sehingga dapat mendukung tercapainya

program swasembada daging sapi kerbau (PSDSK) tahun 2014 dan keberlanjutan program PSDSK; mengoptimalkan potensi hasil samping tanaman sebagai pakan ternak, sehingga dapat membantu mengurangi biaya produksi usaha ternak; membantu peternak mengoptimalkan produksi ternak maupun tanaman dengan hubungan yang saling menguntungkan.

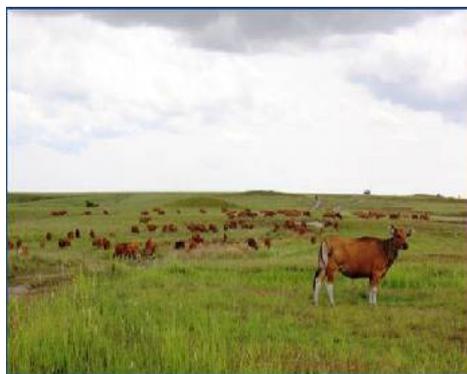
Pengembangan integrasi tanaman – ruminansia terdiri dari integrasi sapi–sawit ; integrasi sapi–padi; integrasi sapi-jagung; integrasi sapi-kakao; dan integrasi sapi–tanaman lainnya. Selama tahun 2010 – 2015 telah dialokasikan untuk 1.229 kelompok dengan jumlah sapi sebanyak 26.991 ekor, sebagaimana rincian pada tabel berikut.

Tabel 18. Jumlah Kelompok Pengembangan Integrasi Tanaman- Ternak Ruminansia Tahun 2010-2015

No	Tahun	Jumlah Kelompok	Alokasi Sapi (ekor)
1.	2010	45	1.439
2.	2011	76	3.800
3.	2012	96	4.900
4.	2013	231	4.775
5.	2014	143	3.322
6.	2015	638	8.755
	Jumlah	1.229	26.991

Sumber : Direktorat Pakan Ternak, 2015

Pengembangan padang penggembalaan bertujuan meningkatkan ketersediaan pakan hijau dan peningkatan kapasitas daya tampung padang penggembalaan terhadap ternak ruminansia.



Padang Penggembalaan di Desa Tinabite, Bombana



Padang Penggembalaan di Kec. Sawalati, Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat

Pengembangan padang penggembalaan dilaksanakan mulai tahun 2013, sampai dengan Oktober 2015 telah dikembangkan 115 kelompok di 14 Kabupaten pada 7 provinsi dengan luas padang penggembalaan 8.154 Hektar. Secara rinci diuraikan sebagai berikut :

/

Tabel 19. Lokasi, Jumlah, Luasan Kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan Tahun 2013-2015

No	Tahun	Lokasi		Jumlah Kelompok	Luasan Padang (Hektar)
		Provinsi	Kabupaten		
1.	2013	Sultra	Bombana	7	2.935
		NTT	Kupang	8	150
			Belu	8	230
			TTS	8	240
			Ngada	12	360
		Papua Barat	Fak-Fak		1.210
Tambraw Sorong			1.760 250		
2.	2014	Aceh	Bener Meriah	8	103
		Sulteng	Poso	9	113
3.	2015	NTB	Dompu		100
		Sultra	Muna Kolaka		100

Sumber : Direktorat Pakan Ternak, 2015

Pengembangan HPT di UPT Perbibitan Ditjen PKH dimaksudkan untuk menyediakan benih/bibit HPT memenuhi kebutuhan di UPT Ditjen PKH, UPTD dan kelompok peternak serta pihak lain yang terkait; meningkatnya produksi dan produktivitas ternak UPT pusat, UPT daerah dan kelompok; dan (3) UPT Perbibitan Ditjen PKH sebagai *centre of excellence* atau pusat referensi dan pelatihan bidang pakan.

Pengembangan HPT di 10 BPTU-HPT/BIB dengan luas kebun HPT dan padang penggembalaan yang diolah seluas 444 Ha.



Padang Penggembalaan di BPTU-HPT Sembawa, Sumatera Selatan



Padang Penggembalaan di BPTU-HPT Padang Mengatas Sumatera Barat

**3.3.3.3. Penanaman Dan Pengembangan Tanaman Pakan Temak Berkualitas (Gerbang Patas)**



*Penanaman rumput Razi (Brachiaria Decumbens) di Distrik Salawati Kab. Sorong, Papua Barat*

Gerbang Patas bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ternak ruminansia melalui penanaman dan pemanfaatan tanaman pakan temak yang berkualitas. Sasaran kegiatan adalah kelompok peternak di kawasan sentra sapi potong atau sapi perah. Sampai dengan tahun 2015 terealisasi penanaman tanaman pakan ternak berkualitas sebanyak 12.295.349 stek atau setara dengan 12.295 Hektar, dengan rincian tahun 2013 sebanyak 2.806.349 stek, tahun 2014 sebanyak 3.709.000 stek dan tahun 2015

5.870.000 stek.

Jenis HPT yang ditanam disesuaikan dengan lahan dan cuaca di daerah penanaman serta ketersediaan bibit. Pada umumnya yang banyak ditanam adalah jenis rumput gajah (Pennisetum purpureum), rumput gajah cv. Mott atau biasa disebut rumput gajah odot (P.purpureum cv Mott), rumput raja/king grass

sepium), lamtoro (Leucaena leucocephala), indigofera, turi dan legume lokal (seperti Bunut di Bali, lamtoro taramba di NTT)

**3.3.3.4. Standarisasi dan Sertifikasi Pakan**

Pengembangan mutu pakan nasional dilakukan melalui pengawasan mutu pakan; jaminan mutu dan keamanan pakan yang beredar di masyarakat serta dengan terbitnya Permentan No.19/2009 tentang Syarat dan tata Cara Pendaftaran Pakan (secara *on line*); sertifikasi pabrik pakan dilakukan dengan Kepmentan No.240/2003 tentang Cara Pembuatan Pakan Yang Baik (CPPB). Tahun 2014 telah diterbitkan 6 sertifikat CPPB, tahun 2015 ditargetkan penilaian terhadap 16

Oktober 2015 terealisasi 10 pabrik pakan. Selain itu, bahan pakan/pakan perlu diterapkan standar mutu untuk menjembatani produk Oktober 2015 telah diterbitkan 42 SNI pakan dan 18 SNI bahan pakan. Sedangkan PTM telah diterbitkan 32 PTM Asal Hewan, 15 PTM Asal Tumbuhan dan 7 PTM Tanaman Pakan Temak (TPT).

**3.3.4. Kesehatan Hewan**

Direktorat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyehatan hewan secara individu dan populasi. Fungsi Direktorat Keswan diantaranya : 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan; 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan; 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan; 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan; 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan; dan 6) Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat kesehatan hewan

**3.3.4.1. Penanganan Gangguan Reproduksi**

Hingga tahun 2015 telah dilakukan kegiatan bimbingan teknis Gangguan Reproduksi (Gangerep) kepada 463 orang tenaga teknis penanganan gangguan reproduksi yang berasal dari 33 Propinsi dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang menangani penyakit reproduksi. Realisasi penanganan gangguan reproduksi tahun 2010-2014 telah dilaksanakan pada 354 ribu ekor sapi, sedangkan 2015 mencapai 5.393 ekor.



*Bimbingan Teknis Penanggulangan Reproduksi di Rejang Lebong, Bengkulu, 2014*

Dalam rangka mendukung program Pemenuhan Pangan Asal Hewan dan Agribisnis Peternakan Rakyat, Ditjen PKH

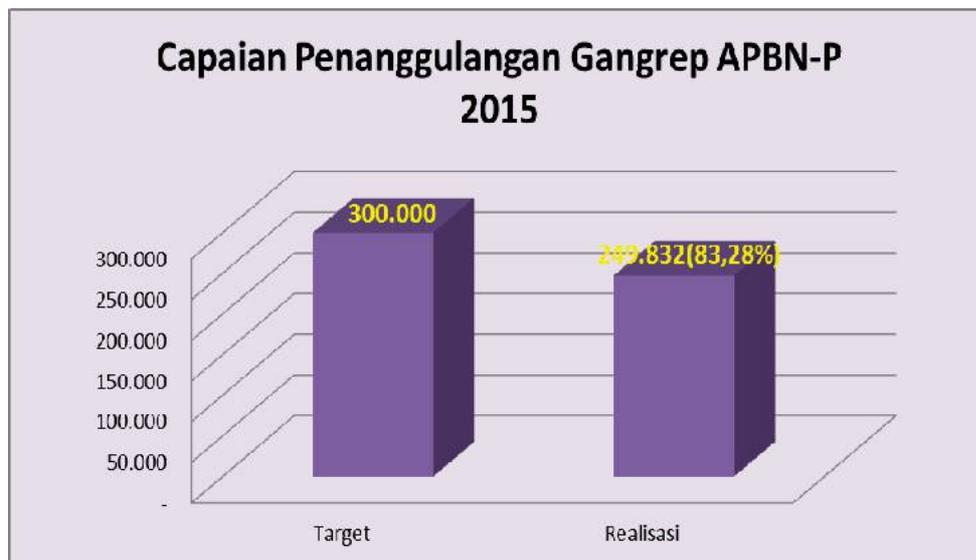


*Kegiatan Penanggulangan Gangguan Reproduksi di Batang, Jawa Tengah, 2015*



*Kegiatan Penanganan Gangguan Reproduksi di Magelang, Jawa Tengah, 2015*

mendapatkan anggaran perubahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi. Realisasi penanggulangan gangguan reproduksi yang mendukung pelaksanaan GBIB sampai dengan bulan Desember tahun 2015 mencapai 249.832 ekor atau 83,28% dari total target akseptor gangrep sebanyak 300.000 ekor. Berdasarkan dari pelaksanaan penanganan gangguan reproduksi APBN-P 2015, persentase kasus gangguan reproduksi yang terjadi dilapangan yaitu *hipofungsi* 24.64%, *silent heat* 13.20%, *repeat breeder* 9.71%, CLP 4.75%, *endometritis* 2.40%, *cyste* 0.505, *hipoplasia* 0.32%, *atropi* 0.30%, *retensio plasenta* 0.20%, *pyometra* 0.13%.



Gambar 3. Capaian Penanggulangan gangrep APBN-P Tahun 2015

#### 3.3.4.2. Pembangunan Puskesmas

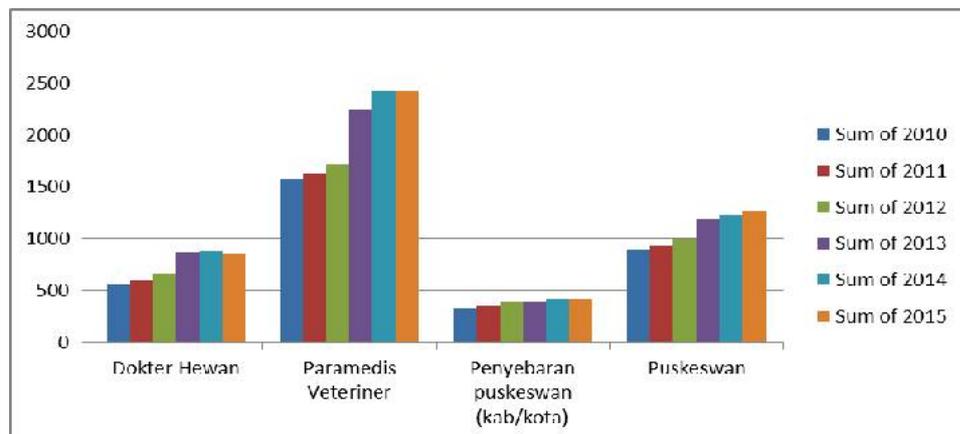
Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dalam mewujudkan peningkatan populasi hewan dengan produktivitas dan reproduktivitas yang tinggi, status kesehatan hewan yang optimal, lingkungan dan ekosistem yang aman serta produk hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH) diperlukan pelayanan kesehatan hewan yang profesional. Pelayanan kesehatan hewan yang profesional harus dapat melayani langsung kepada masyarakat peternak yang membutuhkan, terutama dalam penanganan penyakit hewan, pelayanan reproduksi dan permasalahannya, penerapan kewaspadaan dini dan diseminasi informasi dan pelayanan terkait penyakit hewan lainnya. Kelembagaan kesehatan hewan milik pemerintah yang melakukan pelayanan secara langsung kepada masyarakat ditingkat kecamatan pada saat ini dilakukan oleh Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas). Oleh karena itu keberadaan Puskesmas sangat diperlukan sehingga diharapkan pemerintah daerah yang dibantu pemerintah pusat harus dapat melengkapi kelembagaan ini baik bangunan, peralatan, Tenaga Kesehatan Hewan yang kompeten, biaya operasional maupun status kelembagaannya.

Sampai dengan bulan Desember 2015 tercatat 1.262 unit Puskesmas yang tersebar di 417 kabupaten/kota terbagi dalam 1.262 Kecamatan dengan jumlah tenaga Dokter Hewan tercatat 853 orang dan tenaga Paramedis Veteriner sebanyak 2.432 orang. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan jumlah puskesmas sebesar 2,69 % yaitu dari 1.229 unit menjadi 1.262 unit. Penurunan jumlah tenaga Dokter Hewan di Puskesmas sebesar 2,93% dari 878 orang menjadi 853 orang dan peningkatan tenaga Paramedik Veteriner di Puskesmas sebesar 0,37% dari 2.423 menjadi 2.432 orang (data dari provinsi baru sebagian yang masuk). Realisasi kegiatan pengembangan kelembagaan dan sumber daya keswan adalah 33 unit yang tersebar di 417 kabupaten/kota di 1.262 Kecamatan.

Untuk mewujudkan penjaminan pelayanan kesehatan hewan yang langsung kepada masyarakat oleh Puskesmas, masih diperlukan penambahan jumlah puskesmas berdasarkan kebutuhan minimal dalam pelayanan dengan jangkauan wilayah 3 kecamatan, diperlukan paling sedikit 1 (satu) puskesmas atau setiap 2.000 satuan ternak (animal unit).

Dengan jumlah kecamatan di Indonesia pada saat ini sebanyak 7160, jika dilihat dari jangkauan wilayah kerja sesuai jumlah kecamatan, maka membutuhkan 2.387 unit puskesmas. Sedangkan untuk saat ini jumlah puskesmas yang ada sebanyak 1.262 unit atau 52,87% dari total kebutuhan minimal. Sehingga masih membutuhkan 1.125 unit atau 47,13%.

Apabila kebutuhan minimal pelayanan puskesmas, dilihat dari jumlah satuan ternak yang dilayani dimana dalam 1 puskesmas melayani 2.000 satuan ternak maka jumlah ternak berdasarkan Sensus ternak tahun 2013 sebanyak 14.800.000 satuan ternak maka dibutuhkan puskesmas sebanyak 7.400 unit puskesmas. Sedangkan untuk saat ini jumlah puskesmas yang ada sebanyak 1.262 unit Puskesmas atau 17,05% dari total kebutuhan minimal pelayanan puskesmas. Jadi sampai saat ini masih membutuhkan 6.138 unit puskesmas atau 82,95% unit puskesmas lagi.

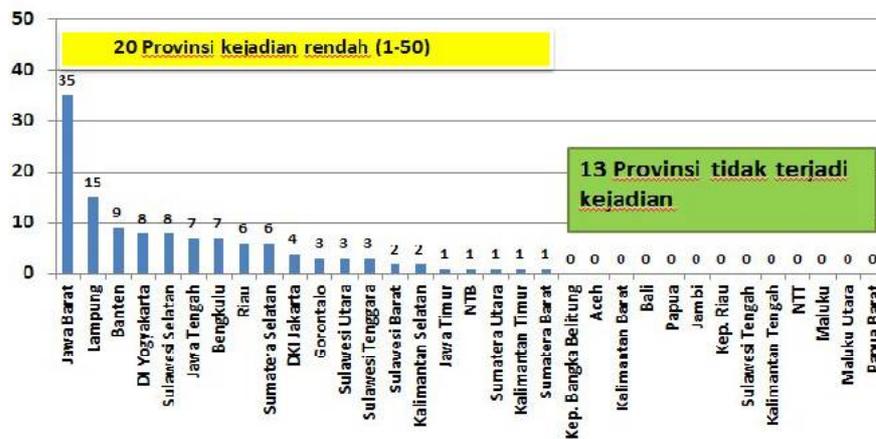


Grafik 3. Perkembangan Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) Tahun 2010 – 2015

3.3.4.3. Perkembangan Kasus AI Di Indonesia

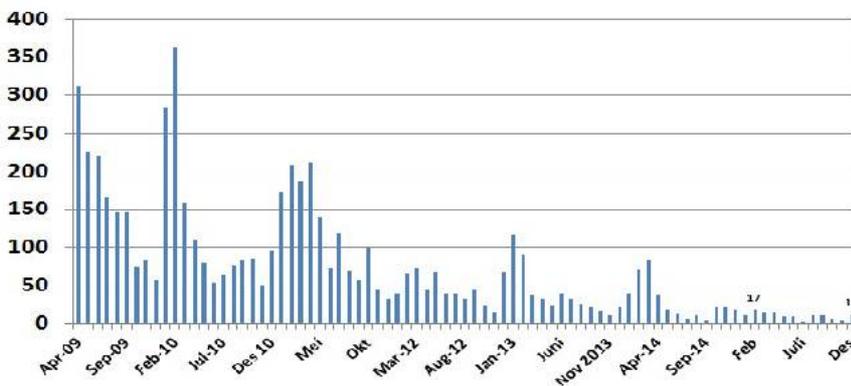
Sejak terjadinya wabah AI pada unggas di Indonesia yang dideklarasikan pada bulan Januari 2004, kasus secara bertahap menurun cukup signifikan setiap tahun yakni tahun 2007 = 2.751 kasus, tahun 2008 = 1.413 kasus, tahun 2009 = 2293 kasus, tahun 2010 = 1502 kasus, tahun 2011 = 1.411 kasus, tahun 2012 = 546 kasus, tahun 2013 = 470 kasus dan tahun 2014 = 346 kasus dan tahun 2015 = 123 kejadian.

Sebaran Kejadian AI Per Provinsi Selama Januari-Desember 2015



Grafik 4. Sebaran Kejadian AI per-provinsi selama Januari sampai Desember 2015

Kejadian AI Pada Unggas Tahun 2009 s/d 31 Desember 2015



Grafik 5. Kejadian AI pada Unggas Tahun 2009 s/d 31 Desember 2015

### 3.3.4.4. Respon Cepat Pengendalian PHMS

Respon cepat pengendalian PHMS bertujuan untuk

- 1) Melakukan respon cepat pengendalian penyakit *zoonosis* maupun non *zoonosis* dengan prinsip-prinsip *epidemiologi* lapangan di daerah yang terjadi kasus yaitu Kota Tangerang, Kab. Cianjur, Kab. Bogor, Kab Tangerang, Kota Serang dan Kota Jakarta Timur.
- 2) Memberikan arahan terkait respon pengendalian diantaranya adalah KIE, *biosekuriti*, kontrol lalu lintas, desinfeksi, dan *disposal*, depopulasi unggas tertular untuk kasus AI.
- 3) Koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait seperti Kementerian Kesehatan RI dalam rangka melakukan investigasi dan pengendalian penyakit terintegrasi.
- 4) Mengumpulkan data kasus kejadian PHMS serta memberikan bantuan peralatan perlindungan diri/PPE (*Personal Protection Equipment*) seperti masker, kacamata, sarung tangan, apron, baju pelindung diri dan desinfektan.

Selama tahun 2015 dilaporkan terjadi beberapa kasus PHMS seperti AI, rabies, penyakit hewan menular pada babi, *Septicemia epizootica* (SE) dan telah dilakukan respon cepat guna mencegah penyebaran penyakit lebih luas, pengendalian penyakit melalui penerapan biosekuriti dan depopulasi terbatas. Berikut kegiatan respon cepat yang dilakukan sesuai tabel dibawah ini:

Tabel 20. Kegiatan Respon Cepat Kegiatan Pengendalian PHMS Tahun 2015

No	Tanggal	Kasus	Lokasi
1	26 Maret	Avian Influenza	Kota Tangerang
2	24-26 Agustus	Rabies	Cianjur
3	11-12 Nopember	PHM pada babi	Kab. Bogor
4	11-12 Nopember	PHM pada babi	Kota Tangerang
5	4-5 dan 7 Desember	SE	Jakarta Timur
6	17-18 Des	PHM pada babi	Gn. Sindur
7	28-30 Des	Avian Influenza	Kota Serang
8	29-31 Des	PHM pada babi	Kota/Kab Tangerang

Sumber : *Direktorat Keswan, 2015*

### 3.3.4.5. Ekspor Obat Hewan

Lima tahun terakhir industri obat hewan Indonesia memasuki era baru dengan telah berhasilnya beberapa perusahaan obat hewan menembus pasar internasional, baik dikawasan Asia, Timur Tengah, ataupun Afrika. Upaya mendorong peningkatan ekspor obat hewan ini telah dilakukan dari tahun ke tahun dengan penerapan dan perbaikan regulasi dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor, misalnya penerapan cara pembuatan obat hewan yang baik dan pengujian mutu obat hewan.

Hasil yang telah dicapai dari penerapan CPOHB dan pengujian mutu pada 5 tahun terakhir terlihat dari adanya perkembangan nilai ekspor obat hewan di Kementerian Pertanian yang cukup signifikan yang mendatangkan devisa negara yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa produk obat hewan Indonesia mempunyai daya saing yang tinggi sehingga produk tersebut dapat diterima atau diekspor ke negara-negara di dunia.

Tabel 21. Data Nilai Ekspor Obat Hewan Tahun 2010 – 2015 (Nilai 1000 USD)

No.	JenisSediaan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Biologik	257.407,04	349.915,31	356.213,68	309.978,12	220.594,39	7.412.253,41
2.	Farmasetik	9.557,78	1.184,40	1.340,14	1.807,75	5.910,65	129.985,58
3.	Premiks	338.104,33	424.416,78	451.924,24	471.675,26	430.000,00	60.969.525,25
<b>Total</b>		<b>605.069,15</b>	<b>775.516,49</b>	<b>809.478,06</b>	<b>783.461,13</b>	<b>656.505,04</b>	<b>68.511.764,24</b>

Sumber data : Direktorat Kesehatan Hewan, 2015

Negara tujuan ekspor obat hewan sebanyak 37 negara.

Sediaan Biologik : China, Malaysia, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Pakistan, Nepal, Tanzania, Lebanon, Mesir, Nigeria, Rusia, Syria, Thailand dan Timor Leste.

Sediaan Farmasetik : Bangladesh, China, Malaysia, Greece, Mesir, Pakistan, Philipine, Thailand, Vietnam, Nepal, Nigeria, Tanzania, Kamboja dan Myanmar.

Sediaan Premiks : Belgium, Bulgaria, Croatia, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, India, Italy, Lithuania, Montenegro, Morocco, Netherlands, Norway, Poland, Serbi, Slovenia, Syria dan Tunisia.

Empat perusahaan eksportir obat hewan adalah : 1) PT. Cheil Jedang Indonesia; 2) PT. Vaksindo Satwa Nusantara; 3) PT. Trouw Nutrition Indonesia; dan 3) PT. Medion Farma Jaya.

Ditjen PKH ikut mendorong dan membina peternakan, unit usaha produk hewan, agar berproduksi yang baik dan benar, sehingga produk yang akan diekspor memenuhi persyaratan teknis yang diminta oleh negara pengimpor/negara tujuan ekspor, serta sesuai dengan perjanjian *Sanitary and Phytosanitary* (SPS). Sebagai jaminan bahwa produk hewan yang diekspor tersebut telah memenuhi persyaratan teknis kesehatan, keamanan, dan mutu untuk dikonsumsi manusia, maka persyaratan teknis tersebut dicantumkan dalam sertifikat kesehatan. Sertifikat tersebut antara lain berupa Sertifikat Kesehatan (*Veterinary Health Certificate/Health Certificate/Sanitary Certificate*) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Sampai dengan Oktober 2015, telah diterbitkan sertifikat kesehatan untuk produk pangan sebanyak 1.623 buah dan non pangan banyak 459 buah. Selain itu untuk membuka pasar produk ternak, maka telah dilakukan ekspor sampel daging ayam olahan sebanyak 133 kg ke Jepang.

Selain itu, dilakukan penataan kompartemen (*compartmentalization*) dan penataan zona usaha perunggasan (*zoning*) guna mengendalikan dan membebaskan suatu kompartemen atau zona atau kawasan dari penyakit

unggas. Dengan penerapan kompartementalisasi, produk unggas Indonesia telah diterima masuk ke Jepang dan *Haching Eggs* (HE) masuk ke Myanmar. Peluang ekspor ini, juga sedang dipersiapkan untuk masuk ke Timor Leste.

Penerapan Kompartementalisasi Bebas Penyakit Avian Influenza pada unit usaha peternakan (*Grand Parent Stock Farm, Parent Stock Farm, Commercial Stock Farm* dan *Hatchery*) hingga saat ini sebanyak 42 perusahaan telah memperoleh sertifikat Kompartemen Bebas Penyakit *Avian Influenza*.

**3.3.4.6. Status Kesehatan Hewan semakin meningkat**

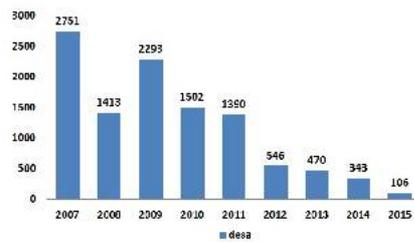
Pemerintah telah menetapkan 5 penyakit prioritas dari 25 penyakit hewan menular strategis (PHMS), yaitu *Brucellosis, Anthrax, Avian Influenza/AI, Rabies* dan *Hog Cholera* (Kepmentan No.4026/Kpts/OT.140/04/2013). Prinsip kebijakan pembangunan kesehatan hewan adalah mempertahankan wilayah yang bebas penyakit, menurunkan tingkat prevalensi/kasus penyakit dan pembebasan penyakit di suatu wilayah.

Menuju Bebas <i>Brucellosis</i> 2025	
	<p><i>Brucellosis</i> atau penyakit keluron menular yang mengakibatkan terjadinya keguguran, lahir mati, dan kemandulan yang menyerang ternak. Penyakit yang bersifat endemis ini banyak ditemukan di DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Meskipun tidak menyebabkan kematian, namun menimbulkan kerugian ekonomis. Dampak ekonomi penyakit <i>Brucella</i> di Indonesia diperkirakan sebesar Rp. 45 Miliar/tahun.</p>
<p><i>Kegiatan surveilans Brucellosis pada sapi perah di Kabupaten Sleman-DIY, 2015</i></p>	<p>Pemerintah telah mencanangkan tahun 2025 sebagai tahun bebas <i>Brucellosis</i> yang dimulai dengan penyusunan <i>Road Map</i>. Pendekatan ditempuh secara bertahap diawali dengan zona geografis, yaitu pengendalian penyakit menggunakan status dari status yang tidak diketahui menjadi diketahui, untuk mencapai status bebas penyakit. Tahap selanjutnya adalah pendekatan kompartemen produksi untuk memitigasi risiko lalu-lintas hewan terjangkit dan meningkatkan perdagangan ternak sehat.</p> <p>Selama tahun 2014-2015 ada 2 pulau yang memiliki populasi ternak sapi dan kerbau tinggi telah berhasil dibebaskan dari <i>Brucellosis</i> yaitu Pulau Sumba NTT (Kepmentan No. 52/Kpts/PD.630/1/2015) dan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur (Kepmentan No. 237/Kpts/PD.650/4/2015).</p>

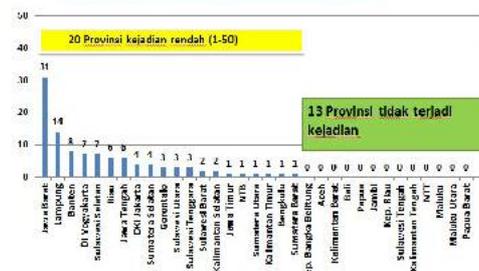
**Pengendalian Wabah Avian Influenza (AI)**

Sejak Januari 2004 sampai saat ini seluruh wilayah Indonesia endemis AI kecuali Provinsi Maluku Utara. Namun demikian upaya pengendalian terus dilakukan dan telah menghasilkan penurunan kasus kejadian cukup signifikan setiap tahunnya. Hingga periode Januari-Oktober 2015, 20 propinsi kejadian rendah (1-50 kasus) dan 13 propinsi tidak ada kasus.

Kejadian AI Pada Unggas Per Tahun Tahun 2007 s/d 31 Oktober 2015



Sebaran Kejadian AI Per Provinsi Selama Januari-Oktober 2015



**Menuju Bebas Rabies 2020**



Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Rabies untuk murid sekolah dasar di Pulau Nias, 2015

Sebagian besar wilayah Indonesia endemis penyakit Rabies. Beberapa provinsi bebas historis yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, NTB, Papua dan Papua Barat. Sedangkan Provinsi yang telah dinyatakan bebas melalui program pemberantasan yaitu DKI, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah untuk mencapai bebas

rabies 2020 antara lain penyusunan Roadmap pembebasan Rabies, fasilitasi dana kegiatan pemberantasan rabies di daerah lewat dana dekonsentrasi, vaksinasi massal dan KIE.

Pada tahun 2013-2015 beberapa wilayah telah berhasil dibebaskan yaitu Provinsi Bangka Belitung (Kepmentan No. 4435/Kpts/PD.620/7/2013), Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau (Kepmentan No. No. 239/Kpts/PD.650/4/2015), Provinsi Kepulauan Riau (Kepmentan No. 240/Kpts/PD.650/4/2015), Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu (Kepmentan No. 241/Kpts/PD.650/4/2015) dan Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat (Kepmentan No. 238/Kpts/PD.650/4/2015).



Pelaksanaan vaksinasi massal Rabies di kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, 2015

**Pemberantasan Hog Cholera**

Prioritas utama Pemerintah dalam pemberantasan Hog Cholera ditujukan untuk provinsi yang memiliki populasi tinggi seperti Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara dan Kalimantan Barat. Hal ini untuk mendorong timbulnya kembali peluang ekspor dan sebagai sumber penyediaan bibit babi di dalam negeri. Kemudian prioritas berikutnya adalah pemberantasan Hog Cholera di daerah penyedia babi potong seperti Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Karanganyar) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Alor) dan Papua.

Pemerintah telah menyusun Roadmap Pengendalian dan Pemberantasan Hog Cholera di Indonesia dengan sasaran menurunkan prevalensi kejadian Hog Cholera sampai ke tingkat yang serendah-rendahnya dalam waktu 10 tahun ke depan. Pemerintah telah berhasil mendeklarasikan Provinsi Sumatera Barat menjadi satu-satunya wilayah bebas di Indonesia saat ini (Kepmentan No.181/Kpts/PD.620/2/2014).

**3.3.4.7. Dukungan Kelembagaan, Sumberdaya Kesehatan Hewan dan ISHIKNAS**

Pelayanan kesehatan hewan yang profesional harus mendapat dukungan kelembagaan, sumberdaya kesehatan hewan dan system informasi yang teritegrasi. Hal itu, akan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat



peternak yang membutuhkan, terutama dalam penanganan penyakit hewan, pelayanan reproduksi dan permasalahannya, penerapan kewaspadaan dini dan diseminasi informasi dan pelayanan terkait penyakit hewan lainnya.

Tahun 2010 jumlah Puskesmas tercatat 889 unit yang tersebar di 328 kabupaten/kota, kota terbagi dalam 889 Kecamatan, dengan jumlah Dokter

Hewan tercatat 551 orang dan Paramedis Veteriner sebanyak 1577 orang. Sampai bulan Oktober 2015 telah meningkat jumlah dan sebarannya menjadi 1.262 unit Puskesmas, tersebar di 421 kabupaten/kota, terbagi dalam 1262 Kecamatan dengan jumlah Dokter Hewan tercatat 846 orang dan Paramedis Veteriner sebanyak 2373 orang.



iSIKHNAS adalah sistem informasi kesehatan hewan terpadu yang menggunakan teknologi sederhana yaitu layanan pesan singkat (SMS) dan instant Messaging (IM) serta memadukannya dengan Teknologi Informasi (TI) berbasis internet. Sistem ini adalah sistem yang cerdas, mampu mengumpulkan data dari

lapangan dan dengan cepat meneruskan notifikasi kepada petugas dan pemangku kepentingan.



iSIKHNAS memadukan sistem yang sudah ada sehingga data bisa dikelola lebih efisien dan lebih cepat. Perpaduan (integrasi) berbagai sistem ini membuat data pada sistem tersebut menjadi jauh lebih kuat dan akan memberikan dukungan yang lebih baik bagi pengambil keputusan.

Seluruh pengiriman data penyakit, lalu lintas hewan, wabah, pemotongan hewan, vaksinasi, pengambilan sampel dan kegiatan lainnya, dilaporkan melalui SMS pada saat kegiatan dilaksanakan. Data tersebut akan terekam dan diolah menjadi informasi yang disediakan melalui website iSIKHNAS dalam bentuk laporan tabel, diagram, lembar kerja serta data spasial (peta). Selain itu laporan dikirimkan oleh sistem melalui surat elektronik (email) secara berkala dan pengguna juga dapat memperoleh informasi melalui SMS. Output yang didapat saat ini :a) Tersedia data real time; b) Tersedia data dalam satu sistem database; c) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat; d) Deteksi dini penyakit hewan; e) Tersedia analisa data.

### 3.3.5. Kesehatan Masyarakat Veteriner

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan masyarakat veteriner. Fungsi Direktorat Kesmavet adalah : 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan; 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan; 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary, zoonosis, serta kesejahteraan hewan; 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan; 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan; dan 6) Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat kesehatan masyarakat veteriner.

#### 3.3.5.1. Daging Sapi Lokal Mampu Bersaing Dengan Daging Sapi Impor

Upaya peningkatan jaminan produk temak yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) utamanya daging sapi dilakukan melalui perbaikan sarana Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R), penetapan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan pengawasan kelayakan produk ternak.



*Pelaksanaan Buchering Karkas dan daging sapi Bali di RPH-R Potoe Tanoe, Sumbawa Barat, NTB*

RPH-R yang telah mampu memproduksi daging segar dingin/beku sapi lokal adalah RPH-R Tembesi, Kab. Gianyar, Bali; RPH-R Potoe Tanoe Kabupaten Sumbawa Barat, NTB ; RPH-R Asakota

Kota Bima, NTB; RPH-R Eka Putra Jaya, Kab. Bojonegoro, Jatim; dan RPH-R Segarau Bahari, Kab. Sumbawa, NTT. Kelima RPH-R tersebut telah mampu mengirim daging ke JABODETABEK kurang lebih 112 ton/bulan. Ke depan diharapkan volume pengiriman daging dingin/beku ke Jabodetabek semakin meningkat dan mampu bersaing dengan daging beku.

Dalam rangka memberikan jaminan keamanan daging yang diproduksi di RPH-R memenuhi persyaratan ASUH, pada tahun 2014 telah dibangun 16 unit RPH-R di



*Pengemasan daging sapi bali untuk menjadi meat box di RPH-R Potoe Tanoe, Kab. Sumbawa Barat. NTB*

7 Propinsi, untuk selanjutnya dilakukan sertifikasi NKV. Sampai saat ini RPH-R yang telah memiliki sertifikat NKV sebanyak 30 Unit, baik RPH-R milik pemerintah maupun swasta. Sedangkan pada tahun 2015 dalam proses pembangunan dan (Oktober 2015).



Pengangkutan daging meatbox sapi bali dengan kendaraan berpendingin dari NTB dengan tujuan JABODETABEK



Lauching daging segar dingin/beku sapi Bali di RPH-R Asakota, Kota Bima, NTB



Proses produksi daging yang bersertifikat NKV di RPH-R

### 3.3.5.2. Pengawasan pada Saat Pemotongan Hewan Qurban Tahun 2015

#### Pengawasan pada Saat Pemotongan Hewan Qurban 2015

Pada pelaksanaan ibadah Hari Raya Idhul Adha setiap tahunnya Ditjen PKH melaksanakan upaya penjaminan keamanan dan kelayakan serta penjaminan penerapan kesejahteraan hewan, khususnya di daerah endemis Anthrax. Bantuan Pengawasan Hewan Kurban Ditjen PKH terdiri dari 100 Dokter Hewan telah diturunkan ke lapangan, di wilayah DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.



Pemeriksaan hewan kurban di depok, Jawa Barat, 2015

Tim melaksanakan supervisi pemeriksaan dokumen kesehatan hewan, pemeriksaan antemortem dan post mortem, mengawasi penyembelihan serta penanganan daging dan jeroan hewan Kurban, selama Hari Raya Kurban dan hari tasrik. Tim Pengawas pelaksanaan pemotongan Hewan Kurban juga dibentuk di masing masing Propinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini untuk menjamin kesehatan hewan terutama hewan yang di transportasikan antar daerah, dan juga menjamin kesehatan, kesejahteraan dan kelayakan hewan yang akan dijadikan hewan kurban.

### 3.3.6. Dukungan Manajemen dalam menunjang Prestasi PKH

Ditjen PKH telah melakukan peningkatan pelayanan melalui perbaikan manajemen berkelanjutan, antara lain perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penerapan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK), transparansi pelayanan rekomendasi *on line*, deregulasi bidang PKH, penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI), perbaikan system Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan percepatan tindaklanjut hasil pengawasan.

Capaian kinerja tahun 2015 Sekretariat Ditjen PKH dapat dijelaskan bahwa untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan indikator kinerja. Realisasi output kegiatan rata-rata 108,65%, dengan rincian : 1) Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan mencapai 100%; 2) Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan mencapai 100%; 3) Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara mencapai 100%; dan 4) Ketatalaksanaan Organisasi Kepegawaian, Hukum serta Tata Usaha dan Rumah Tangga mencapai 134,58%.

Sedangkan *output* fungsi rata-rata capaian 90,39%, diantaranya : 1) Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja (IPNBK) mencapai 108%; 2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 100%, dan 3) Layanan Informasi Publik mencapai 79,28%.

#### 3.3.6.1. Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan

##### 1) Penyusunan Renja 2016

Penyusunan Renja 2016 adalah untuk menentukan alokasi kegiatan dan anggaran SKPD provinsi, UPT dan Pusat yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Output yang dihasilkan adalah Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran Tahun 2016 sebanyak 57 dokumen dengan rincian 34 Renja Provinsi, 22 Renja UPT dan 1 Renja Pusat.

##### 2) Penyusunan Perjanjian Kinerja 2015.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk : (i) memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi; (ii) melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan (iii) menilai keberhasilan organisasi. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya 57 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dengan rincian 1 PK Direktur Jenderal PKH, 1 PK Sekretaris Direktorat Jenderal, 22 PK UPT dan 34 PK Dinas provinsi.

3) Penyusunan Renstra Ditjen PKH dan Renstra Sekretariat

Pada tahun 2015 dilakukan revisi Renstra 2015-2019 teknokratik. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan visi misi dari presiden terpilih Nawacita serta disesuaikan dengan rencana strategis Kementerian Pertanian.

Hasil dari penyusunan Renstra Ditjen PKH dan Renstra Sekretariat adalah tersusunnya Renstra Ditjen PKH dan Renstra Sekretariat sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan dan program kegiatan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan pada periode 2015-2019.

4) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L)

Penyusunan RKA-K/L merupakan sarana dalam mensinergikan kegiatan berbagai unsur tersebut dan menuangkannya dalam RKA-K/L yang akan digunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2016. Penyusunan RKA-K/L merupakan rangkaian akhir kegiatan perencanaan yang telah dimulai dari pengajuan e-proposal, Musrenbangda, Pra Musrenbangtan, Musrenbangtan sampai finalisasi renja. Hasil dari penyusunan RKA-K/L yaitu dokumen RKA-K/L Sekretariat dan direktorat teknis serta UPT dan SKPD.

5) Penyusunan dan Penelaahan Usulan Dokumen Makalah Kerjasama/Bantuan Luar Negeri

Penyusunan dokumen kerjasama terkait bidang peternakan dan kesehatan hewan yaitu telah dilakukannya penandatanganan *Indonesia New Zealand Dairy Excellence Activity Partnership Arrangement* pada tanggal 10 September 2015, dokumen perpanjangan proyek *Enhancing the Capacity of the Government of Indonesia and Partner to Control Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) (OSRO/INS/103/USA)*, *Assistance to the Government of Indonesia for the Effective and Humane Control of Rabies in Indonesia, with Special Emphasis on Flores and Lembata Islands (OSRO/INS/302/WPA)* dan *Australia Indonesia Partnership for Emerging Infectious Disease Animal Health Program (AIP-EID)*.

Penelaahan terhadap dokumen proyek kerjasama juga telah dilakukan yaitu dokumen proyek hibah FAO OSRO/INS/501/USA (*Strengthening National Capacity To Prevent And Control Emerging And Re-Emerging Pandemic Threats Including Influenza A in Indonesia*), Proyek hibah Amerika Serikat *Implementing Arrangement on Biosecurity Upgrades at Disease Investigation Centers Maros and Wates between the Indonesian Ministry of Agriculture and the United States Departement of States*.

6) Koordinasi Kehumasan dengan Instansi Terkait.

*Pembangunan* sub sektor peternakan dan kesehatan hewan juga perlu ditopang dari sisi kehumasan dengan tujuan mempublikasikan capaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ditjen PKH. Pelaksanaan koordinasi kehumasan dengan instansi terkait yang dilakukan diantaranya publikasi di media massa, pembuatan *press release*, sosialisasi pameran dan peliputan

kunjungan kerja pejabat terkait pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dan temu koordinasi kehumasan.

Pameran adalah salah satu sarana untuk menyampaikan informasi mengenai peternakan dari pemerintah kepada masyarakat. Dalam pameran, masyarakat juga bisa mendapatkan informasi baik mengenai peraturan-peraturan pemerintah bidang peternakan maupun informasi perkembangan dunia peternakan terbaru. Pada tahun 2015 Ditjen PKH juga aktif mengikuti kegiatan-kegiatan pameran sebagai berikut :

- a) Pameran Hari Susu Nusantara, Palembang 1 Juni 2015;
- b) Indolivestock Expo & Forum 2015, Surabaya 29-31 Juli 2015;
- c) Pameran dalam rangka Raker PPID, Cimanggu Bogor 28 Mei 2015;
- d) Pameran ILDEX Indonesia 2015, JIExpo Kemayoran, 8-10 Oktober 2015;
- e) Pameran HPS, Palembang 17-20 Oktober 2015;
- f) Pameran Bakohumas Communication, Surabaya 17-19 November 2015;
- g) Pameran WBK, Bandung 10-11 Desember 2015.

Peliputan kunjungan kerja pejabat terkait pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan dalam rangka menyebarkan **informasi** beimbang kepada masyarakat. Kunjungan kerja yang dilakukan oleh Menteri Pertanian, Direktur Jenderal PKH atau pejabat Eselon II lingkup Ditjen PKH dimaksudkan agar terjadi koordinasi yang baik antara pusat dan daerah, pimpinan dan bawahan, serta pemerintah dan masyarakat peternak dan petani. Peliputan kunjungan kerja ini melibatkan wartawan baik cetak maupun elektronik. Selain pendampingan kunjungan kerja, juga dilakukan peliputan dalam rangka launching sebanyak empat kali.

Temu koordinasi kehumasan merupakan pertemuan pejabat yang membidangi kehumasan unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan lembaga terkait serta wartawan, dengan maksud untuk menyamakan persepsi tentang perkembangan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan terkini. Ditjen PKH aktif mengirim pejabat kehumasan pada kegiatan temu koordinasi kehumasan yang diadakan oleh Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

Selain kegiatan diatas, juga dilakukan pengelolaan media komunikasi seperti SMS Center, publikasi kegiatan melalui website Ditjen PKH.

- 7) Pengembangan Hubungan Kerjasama Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang PKH

Pengelolaan Hibah Luar Negeri (PHLN) tahun 2015 telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya penyusunan, perpanjangan, registrasi dan BAST dokumen kerjasama luar negeri.

Beberapa penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) proyek hibah yakni :

- a) *Assistance to the Government of Indonesia for the Effective and Humane Control of Rabies in Indonesia, with Special Emphasis on Flores and Lembata Islands (OSRO/INS/302/WPA)* BAST jasa Tahap II pada tanggal 21 April 2015 sebesar US\$ 126.564 atau senilai Rp. 1.637.991.288 . Juga telah disahkannya SP3HL-BJS dari Dit EAS tanggal 13 Juli 2015 sebesar USD 126.564 atau 1.637.991.288,-. Telah diterbitkan persetujuan MPHLBJS nomor 2015139238776003 pada tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 1.637.991.288
- b) *Australia Indonesia Partnership for Emerging Infectious Disease Animal Health Program*, BAST tanggal 4 Mei 2015, dengan nilai sebesar AUD 5.860.813 atau equivalen Rp 59.704.043.422. Telah diterbitkan persetujuan MPHLBJS Nomor 2015139238776002 pada tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 59.704.043.422 dan Persetujuan MPHLBJS Nomor 2015139238776001 pada tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 27.344.075.464.

Kerjasama dengan luar negeri dilakukan dalam beberapa kegiatan yakni :

- a) Pertemuan ke-19 *Indonesia Australia Working Group on Agriculture, Food and Forestry Cooperation (WGAFFC)* pada tanggal 10 s.d.12 November 2015 di Australia.
- b) Pertemuan 18th Working Group on Agriculture Fisheries and Forestry (WGAFF) Indonesia – Belanda pada tanggal 9 s.d 12 Desember 2015 di Belanda.
- c) Pertemuan The 6th D-8 Agriculture Ministerial Meeting on Food Security pada tanggal 6 s.d 7 Desember 2015 di Pakistan.
- d) Pertemuan AMAF ke-37 dan AMAF+3 ke-15 pada tanggal 7 s.d. 12 September 2015 di Filipina.
- e) Pertemuan Asean Working Group on Livestock (ASWGL) pada tanggal 1 s.d. 3 April 2015 di Thailand. Indonesia sebagai lead pada task force GAHP melaporkan hasil-hasil pembahasan yang dilakukan pada pertemuan ASWGL tersebut.
- f) Advision Team ke Timor Leste, Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular pada tanggal 7 s.d. 12 Desember 2015.
- g) Global Conference on Global Elimination og Dog Mediated Human Rabies The Time is Now pada tanggal 10 s.d. 11 Desember 2015 di Swiss.

Penyelenggaraan OIE Sub Regional *Workshop on the PVS Pathway* di Bali pada tanggal 28-30 April 2015 kerjasama OIE perwakilan Asia Tenggara yang berkantor di Bangkok dengan Direktorat Kesehatan Hewan Ditjen PKH Kementan.

### 3.3.6.2. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan

#### 1) Pengembangan Website Ditjen PKH

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan instansi pemerintah melalui media website, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) telah membentuk tim website Ditjen PKH dengan Keputusan Sekretaris Ditjen PKH nomor 243/KPTS/OT.160/F1/04/2015, yang terdiri atas sejumlah perwakilan dari Sekretariat dan Direktorat Teknis Lingkup Ditjen PKH. Untuk mengoptimalkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dimaksud, tim pengelola website Ditjen PKH dengan mengundang utusan dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) Kementan sampai Bulan Desember 2015 telah melakukan pertemuan sebanyak 3 kali.

Dalam upaya pelaksanaan *e-government* secara bertahap seluruh pegawai Lingkup Ditjen PKH telah memiliki email@pertanian.go.id, untuk melihat perkembangan dan informasi terkait peternakan dan kesehatan hewan dapat <http://ditjenpak.deptan.go.id>.

#### 2) Verifikasi dan Validasi Data Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dalam rangka mendukung terciptanya data statistik peternakan dan kesehatan hewan yang akurat dan akuntabel dimana data statistik menjadi dasar di dalam menyusun program pembangunan peternakan yang tepat sasaran, maka pada tahun 2015 Ditjen PKH memiliki agenda rutin untuk melaksanakan Verifikasi dan Validasi Data Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap tahun dalam rangka menghimpun data 15 komoditi peternakan dan kesehatan hewan dari 34 provinsi. Tujuan kegiatan adalah menentukan angka tetap tahun 2014 dan angka sementara tahun 2015 data pokok peternakan (populasi, produksi, pemotongan, pemasukan, dan pengeluaran) serta data fungsi peternakan dan kesehatan hewan tahun 2014. Sebagai tindak lanjut atas kegiatan verifikasi dan validasi data peternakan tingkat nasional tahun 2015 dan telah terkumpulnya data dari seluruh provinsi di Indonesia, maka Ditjen PKH secara rutin menerbitkan buku statistik peternakan dan kesehatan hewan untuk kemudian buku tersebut disebarluaskan kepada pemangku kepentingan dan stakeholder yang berkepentingan dengan data peternakan dan kesehatan hewan.

Output kegiatan ini berupa buku statistik peternakan dan kesehatan hewan tahun 2015. Data yang disajikan dalam buku ini selain data pokok (populasi, produksi, pemotongan, pemasukan, dan pengeluaran) ada juga data lainnya diantaranya PDB/PDRB, NTP, ekspor dan impor, konsumsi, tenaga kerja, investasi, serta data alamat UPT, Dinas Provinsi, universitas, dan asosiasi.

#### 3) Workshop Sosialisasi Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Rakorteknas II TA. 2015

- a) Pertemuan Sosialisasi Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2015.

Tujuan Sosialisasi Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2015 adalah meningkatkan pemahaman Penanggungjawab Monev dan Pelaporan dalam pelaporan kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan menggunakan Aplikasi PMK 249/2011 dan memahami indikator kinerja yang disusun berdasarkan ADIK.

Sosialisasi Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2015 dilaksanakan oleh Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada selaku pihak ketiga pelaksana swakelola.

- b) Rapat Koordinasi Teknis Nasional (Rakorteknas) II Tahun 2015

Rakorteknas II Tahun 2014 bertujuan untuk : 1) meningkatkan koordinasi dan komitmen mempercepat realisasi kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2015, mendukung terwujudnya sasaran pembangunan PKH nasional; 2) menyepakati tindakan antisipatif untuk percepatan pelaksanaan Kegiatan tahun 2016.

Sasaran penyelenggaraan Rakorteknas II adalah : (1) terwujudnya capaian kinerja kegiatan bidang PKH yang direpresentasikan oleh serapan anggaran tahun 2015 sesuai arah kebijakan pembangunan nasional PKH; (2) terlaksananya kegiatan tahun 2016 sesuai jadwal yang direncanakan melalui tindakan antisipatif untuk meminimalisasi hambatan.

- 4) Pelaksanaan Monev Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Telah dibentuk Tim Monev sesuai dengan SK Dirjen Nomor 113/Kpts/OT.160/F/02/2015 tanggal 5 Februari 2014 tentang Tim Perencana dan Pengawas Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015. Tim Perencana telah melakukan beberapa rangkaian persiapan pelaksanaan Kegiatan Monev Tahun 2015 antara lain : penyusunan ToR, Kerangka Acuan Kerja/KAK, Draft MoU dan Draft Dokumen Perjanjian Kerjasama. Verifikasi dan Validasi Data Monev Peternakan dan Kesehatan Hewan Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2015 dilaksanakan oleh Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Ditjen PKH.

- 5) Pembinaan dan Koordinasi Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Satlak PI Ditjen PKH telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal PKH Nomor 114/Kpts/OT.160/F/02/2015 tanggal 5 Februari 2015. Adapun tugas Tim Satlak PI adalah sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan pengendalian intern;

- b) Memantau penyelesaian tindaklanjut hasil audit/pemeriksaan dari APIP;
  - c) Memantau capaian kinerja lingkup intern satuan kerja;
  - d) Memantau pengelolaan program, kegiatan, keuangan, dan pengadaan barang/jasa lingkup intern satuan kerja;
  - e) Menilai, mengevaluasi, mereview, memantau, merekomendasikan dan membina serta menyusun laporan atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di Unit Kerja Ditjen PKH, UPT, Provinsi dan Kab/Kota;
  - f) Memantau penyusunan LAKIP lingkup intern satuan kerja;
  - g) Memantau penyusunan laporan hasil penilaian/pengujian atas pelaksanaan tugas yang ditujukan kepada atasan langsung/kepala satker;
  - h) Membina dan menilai pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di Satlak PI UPT; dan
  - i) Menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian intern dan rekomendasi konkrit atas perbaikan pelaksanaan program/kegiatan/anggaran kepada pimpinan unit kerja yang membuat laporan keuangan serta memberikan saran penerapan pengharaan terhadap prestasi kerja.
- 6) Evaluasi Hasil Pengawasan

Pertemuan Evaluasi Hasil Pengawasan adalah untuk mencari solusi penyelesaian tindaklanjut LHP yang sulit dan cukup lama dituntaskan dan melakukan pemutahiran data penyelesaian tindaklanjut LHP. Output dari pertemuan ini adalah sinkronisasi data tindaklanjut LHP dan rencana aksi penyelesaian tindaklanjut LHP. Pertemuan Evaluasi Hasil Pengawasan dilaksanakan dengan mengundang pimpinan satker, Direktorat Teknis lingkup Ditjen PKH, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian serta Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Kegiatan pertemuan Evaluasi Hasil Pengawasan pada tahun 2015 dilaksanakan dua kali yaitu di bulan Agustus dan Desember 2015 sedangkan kegiatan Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dilaksanakan selama dua kali di Provinsi Jawa Barat bulan Mei 2015 dan Nusa Tenggara Barat bulan Juni 2015. Jumlah Kerugian Negara yang bisa diselesaikan hasil pertemuan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di dua Provinsi tersebut adalah sebesar Rp. 252,53 juta.

Sampai dengan bulan Desember 2015 jumlah kumulatif sisa LHP (tahun 2000- 2015) sebanyak 126 LHP. Jumlah tersebut terdiri dari LHP reguler ltjen 113 LHP, Riksus 6 LHP, dan BPK-RI 7 LHP. Jumlah LHP yang telah dapat dinyatakan tuntas pada semester I (periode Januari s.d Agustus 2015) sebanyak 56 LHP, sedangkan pada semester II (periode September s.d Desember 2015) sebanyak 31 LHP, sehingga pada tahun 2015 terdapat 87 LHP yang dapat dinyatakan tuntas. Tambahan LHP tahun 2015 adalah 51 LHP, sehingga rasio jumlah LHP yang tuntas dibandingkan dengan jumlah

tambahan LHP pada tahun 2015 relatif cukup baik dengan nilai 1,7 atau tercapai 170%.

Besarnya penyelesaian KN (periode September s.d Desember 2015) Rp 1,29 miliar, sehingga total nilai (sisa) Kerugian Negara (KN) Rp. 2,2 miliar, terdiri dari : reguler Itjen Rp. 1,47 miliar dan Riksus Rp. 7,3 miliar.

Tambahan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian setiap tahun kurang lebih 59 buah laporan. Berdasarkan laporan data pemutakhiran periode 2010-2015, rata-rata jumlah LHP yang dapat dinyatakan tuntas setiap tahunnya baru mencapai 50 per tahun atau 85%. Idealnya, penyelesaian TL-LHP dinyatakan baik, apabila jumlah yang dapat diselesaikan minimal sama dengan LHP baru pada tahun berjalan. Kalau hal itu dapat diwujudkan, maka potensi penumpukan sisa LHP yang belum tuntas dapat diminimalkan. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 22.

Tabel 22 . Jumlah LHP Tuntas Periode 2010 s.d 2015

No.	Tahun	Tambahan LHP	Jumlah LHP Tuntas	
			Jumlah	%
1.	2010	53	45	85
2.	2011	76	68	89
3.	2012	51	38	75
4.	2013	54	24	44
5.	2014	68	36	53
6.	2015	51	87	170
Total		353	299	516
Rata-rata		59	50	85

Sumber : Bagian Evaluasi dan Pelaporan, 2015

#### 7) Penyusunan Laporan Bulanan Bahan RAPIM

Rapat Pimpinan (RAPIM) merupakan salah satu forum untuk mengevaluasi seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh unit kerja Eselon I, sekaligus dimaksudkan untuk membahas rencana kerja berikutnya. Sehingga melalui forum tersebut unit kerja lingkup Kementerian Pertanian memperoleh informasi tentang kegiatan yang dikerjakan oleh setiap unit kerja lainnya. Tujuan penyusunan laporan bulanan bahan Rapim adalah menyampaikan informasi isu-isu aktual Ditjen PKH di tingkat Rapim Kementerian Pertanian. Pada tahun 2015 laporan bahan Rapim dapat disusun per triwulan 4 laporan.

#### 3.3.6.3. Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara

- 1) Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2014 dilaksanakan dengan memperhatikan asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparan, asas efisiensi dan asas akuntabilitas serta asas kepastian nilai.

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integrasi dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik negara/daerah. Maka dengan memperhatikan hal tersebut perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

- a) Sosialisasi, pemantauan dan koordinasi terkait penatausahaan Barang Milik Negara (BMN);
- b) Penyusunan dan pengelolaan laporan Barang Milik Negara tingkat UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan UAPPB Es1 (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1);
- c) Penyusunan Laporan Persediaan Semester 1 dan 2 tingkat UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang);
- d) Penataan dan pengelolaan aset (penghapusan, hibah, pinjam pakai);

Outputnya adalah : (1) Workshop Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) tingkat UAPPB Es1; (2) Apresiasi Pengelolaan BMN; (3) Penyusunan dan Pengelolaan Laporan BMN tingkat UAKPB dan UAPPB Eselon I; (4) Penataan Aset Pusat/Daftar Inventaris Ruangan; (5) Persiapan dan Pelaksanaan Penghapusan Aset dan (6) Penyusunan laporan Barang Persediaan Tingkat UAKPPB Satker Pusat Ditjen PKH, sebanyak 150 dokumen.

## 2) Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Eselon I yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 233/PMK.05/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, maka dilakukan kegiatan :

- a) Sosialisasi dan pemantauan penyusunan Laporan Keuangan ke seluruh satuan kerja yang mendapat alokasi dana APBN;
- b) Penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) Kantor Pusat setiap bulan;
- c) Penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAPPA Es.1 (Unit Akuntansi Pembantun Pengguna Anggaran) Ditjen PKH setiap bulan.

Outputnya adalah (1) Workshop Penyusunan Laporan Keuangan semester 1 dan 2 Tingkat UAPPA Eselon I; (2) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Tingkat UAPPA Eselon I ; (3) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Tingkat UAPPA dan Laporan Serapan DIPA dan (4) Apresiasi Bimbingan Teknis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual, sebanyak 165 dokumen.

3) Perbendaharaan Keuangan

Subbag Perbendaharaan sesuai dengan Permentan No. 24/Permentan /OT.140/7/2010 mempunyai tugas melakukan urusan Perbendaharaan, urusan PNBPN dan penyiapan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).

Tujuan : (1) Tertib administrasi pengelolaan dan penatausahaan anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN); (2) Kelancaran pelaksanaan kegiatan yang didukung dengan ketersediaan dana yang tepat, waktu dan tepat jumlah; (3) Meminimalkan kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan keuangan baik yang berifat administratif maupun yang mengakibatkan kerugian negara dan (4) Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Output : (1) Apresiasi Pengelolaan Anggaran; (2) Apresiasi Bendahara Penerima; (3) Penyelesaian Kerugian Negara; (4) Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan (5) Diklat Bendahara Pengeluaran, sebanyak 27 laporan. Sedangkan realisasi lainnya sebanyak 37 dokumen terdiri dari Penerbitan SPM sebanyak 12 dokumen; Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran 12 dokumen; Penyelesaian Penetapan Pengelola DIPA/ Keuangan 1 dokumen dan Laporan Pengelolaan Gaji Pegawai/Pembayaran Gaji 12 dokumen.

**3.3.6.4. Ketatalaksanaan, Organisasi, Kepegawaian, Hukum, serta Tata Usaha dan Rumah Tangga**

1) Evaluasi dan Penataan Kelembagaan

a) Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Ditjen PKH

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Peraturan Menteri ini merupakan pengganti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.040/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Penataan organisasi Kementerian Pertanian tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi Kementerian Pertanian menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*). Melalui penataan organisasi dan kelembagaan Kementerian Pertanian diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal organisasi, memudahkan penugasan dan koordinasi serta meningkatkan kapasitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Prinsip penataan organisasi Kementerian Pertanian adalah perampingan dan tidak menambah struktur organisasi dan disisi lain terdapat penghapusan satu unit kerja eselon I yaitu Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, yang fungsinya selanjutnya pengolahan diakomodir oleh Direktorat Jenderal Komoditas (Ditjen Tanaman Pangan,

Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan dan Ditjen PKH). Tugas dan fungsi pengolahan dan pemasaran selanjutnya diakomodir menjadi satu unit kerja/Eselon II tersendiri tanpa menambah jumlah unit kerja Eselon II pada masing-masing unit kerja Eselon I.

Sehubungan dengan hal tersebut, telah terjadi penataan ulang organisasi meliputi nomenklatur, tugas dan fungsi unit kerja Eselon II, III dan IV di lingkup Ditjen PKH (Pusat). Jika pada permentan Nomor 61 Tahun 2010, terdapat 6 unit Eselon II lingkup Ditjen PKH meliputi Sekretariat, Direktorat Perbibitan Ternak, Direktorat Pakan Ternak, Direktorat Budidaya Ternak, Direktorat Kesehatan Hewan dan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen. Pada Permentan 43 tahun 2015 terdapat perubahan pada 6 unit Eselon II menjadi Sekretariat, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, Direktorat Pakan, Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

b) Kajian Pembentukan Kelembagaan UPT Bidang Kesehatan Hewan Wilayah Kerja Papua dan Papua Barat

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas dan kemampuan pelayanan kesehatan hewan serta dalam rangka pemberantasan dan pengendalian PHMS/Z perlu dilakukan peningkatan pelayanan laboratorium diagnostik untuk memperkuat pelaksanaan surveillans penyakit di Indonesia, terutama untuk wilayah kerja Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu diperlukan adanya eksistensi unit pelaksana teknis untuk wilayah tersebut, sehingga fungsi layanan pemerintah dalam pengendalian penyakit hewan secara optimal dapat menyentuh wilayah seperti Papua dan Papua Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, telah dibentuk Tim Pengkajian Pembentukan Kelembagaan UPT melalui Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 968/Kpts/OT.050/F/10/2015 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Kelembagaan UPT Lingkup Ditjen PKH Tahun 2015, yang bertugas untuk melakukan kajian Pembentukan Kelembagaan UPT wilayah kerja Papua dan Papua Barat.

Adapun maksud dari kajian pembentukan UPT ini adalah untuk melakukan kajian deskriptif kemungkinan pendirian Balai Veteriner di wilayah kerja Papua dan Papua Barat. Sedangkan tujuannya adalah memperoleh data berupa kondisi wilayah, potensi peternakan dan situasi PHMS/Z di wilayah Papua dan Papua Barat serta sebagai bahan kebijakan dalam pengambilan keputusan pembentukan kelembagaan UPT bidang kesehatan hewan wilayah kerja Provinsi Papua dan Papua Barat.

Berdasarkan hasil kajian dan potensi peternakan serta situasi PHMSZ, keberadaan Balai Veteriner wilayah kerja Papua dan Papua Barat menjadi sangat penting dalam rangka :

- (1) Peningkatan pencegahan dan pengendalian PHMSZ karena intensitas lalu lintas hewan dan produk asal hewan yang sangat tinggi di wilayah Papua dan Papua Barat
- (2) Pencegahan masuknya penyakit eksotik, terutama pada wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga
- (3) Efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan hewan oleh Balai Veteriner dikarenakan wilayah kerja yang menjadi lebih sedikit sehingga pelayanan dapat lebih fokus dan optimal mencakup seluruh kab/kota di Papua dan Papua Barat, memperpendek rentang kendali, hasil pemeriksaan laboratorium lebih akurat dan pengendalian/penanganan penyakit dapat lebih cepat dilakukan.
- (4) Penjaminan keamanan produk asal hewan

Terkait dengan penetapan lokasi pembangunan Balai Veteriner wilayah kerja Papua dan Papua Barat, yang harus menjadi perhatian adalah ketersediaan dan kejelasan status lahan untuk pembangunan Balai Veteriner (bersertifikat hak milik dan hak ulayat), kemudahan dan ketersediaan akses transportasi ke seluruh wilayah di Papua dan Papua Barat, dan komitmen dan jaminan dari pemerintah daerah terutama terhadap keamanan Balai Veteriner sehingga kinerja balai dapat optimal dan berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seyogyanya Balai Veteriner wilayah kerja Papua dan Papua Barat dibangun di Kota Jayapura, Provinsi Papua.

## 2) Pengelolaan Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIHP)

Terdapat empat kelompok Jabatan Fungsional RIHP yang pembinaannya secara teknis dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Keempat jabatan fungsional RIHP tersebut meliputi Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan dan Pengawas Bibit Temak. Sehubungan dengan pengelolaan Jabatan Fungsional RIHP tersebut, pada tahun 2015 telah melaksanakan kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional RIHP Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sosialisasi Jabatan Fungsional RIHP Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Pertemuan Koordinasi Tim Penilai Jabatan Fungsional RIHP Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional RIHP Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah dilakukan sebanyak 2 kali. Penilaian periode I dilaksanakan di Bogor pada tanggal 13 s.d 16 Januari 2015, sedangkan Penilaian periode II dilaksanakan di Bogor pada tanggal 30 Juni s.d 3 Juli 2015. Kegiatan penilaian ini diikuti oleh Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional RIHP Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dan prestasi para pejabat fungsional RIHP bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dituangkan dalam Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK). Adapun DUPAK yang telah terkumpul dan dinilai selama tahun 2015 sebanyak 1.775 DUPAK dengan rincian 569 Medik Veteriner, 595

Paramedik Veteriner, 207 Pengawas Mutu Pakan dan 406 Pengawas Bibit Temak.

Kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional RIHP Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan juga telah dilakukan sebanyak 2 kali. Sosialisasi Jabatan Fungsional RIHP Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang pertama dilaksanakan di PPMKP Ciawi pada tanggal 30-31 Maret 2015. Pertemuan ini diikuti unsur dari Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan se-Provinsi Jawa Barat, se-Provinsi Banten, dan Provinsi DKI Jakarta; Kepala BKD/pengelola kepegawaian se-Provinsi Jawa Barat serta petugas teknis dan pengelola kepegawaian pada UPT Ditjen PKH se-Jawa Barat.

Adapun sosialisasi yang kedua dilaksanakan di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Semarang pada tanggal 1 s.d 3 September 2015. Pertemuan ini diikuti oleh 110 peserta, terdiri dari Kepala Dinas/Pengelola Kepegawaian/Pejabat fungsional RIHP pada Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan se-Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta Kepala BKD/ pengelola kepegawaian BKD se-Provinsi Jawa Tengah serta UPT BBPTU-HPT Baturraden dan BB-Vet Wates. Dalam perjalanan sejak terbentuknya jabatan fungsional RIHP bidang peternakan dan kesehatan hewan hingga saat ini, pemahaman tentang jabatan fungsional RIHP tersebut masih perlu terus ditingkatkan, khususnya di daerah. Hal ini terlihat dari jumlah pengangkatan dalam jabatan fungsional RIHP bidang peternakan dan kesehatan hewan yang jumlahnya masih belum signifikan.

Pertemuan Koordinasi Tim Penilai Jafung RIHP Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2015 bertempat di Ruang Rapat Utama I Ditjen PKH, yang dihadiri oleh 80 orang terdiri dari Tim Penilai Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan menyamakan persepsi Tim Penilai Jafung RIHP, sehingga dapat dihasilkan Tim Penilai Jafung RIHP yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas pekerjaannya untuk melakukan penilaian terhadap Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) para pejabat fungsional RIHP bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

### 3) Pengelolaan administrasi kepegawaian

Kegiatan pengelolaan kepegawaian lingkup Ditjen PKH Tahun 2015 terdiri dari pengelolaan data kepegawaian (SIMPEG dan PUPNS) dan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi administrasi kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan fungsional tertentu, pengangkatan jabatan jabatan fungsional tertentu, pemberhentian jabatan fungsional tertentu, mutasi, pemberhentian sebagai PNS, MPP, pensiun, cuti, dan pengurusan Karis/Karsu/Karpeg. Rincian sebagai berikut :

- a) Kenaikan pangkat fungsional sebanyak 77 pegawai;
- b) Kenaikan pangkat reguler sebanyak 50 pegawai;
- c) Kenaikan jabatan fungsional sebanyak 80 pegawai

- d) Pengangkatan pertama jabatan fungsional sebanyak 40 pegawai;
- e) Pengaktifan kembali jabatan fungsional sebanyak 20 pegawai;
- f) Pembebasan sementara dari jabatan fungsional sebanyak 25 pegawai;
- g) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional sebanyak 2 pegawai.
- h) Pensiun sebanyak 13 pegawai;
- i) Proses mutasi sebanyak 13 pegawai;
- j) Kenaikan Gaji Berkala 240 pegawai;
- k) Pengurusan cuti pegawai 326 orang;
- l) Pengurusan Karis/Karsu 9 pegawai.
- m) Kegiatan pengelolaan kepegawaian lainnya yang telah dilaksanakan antara lain : Pengelolaan Sistem Informasi Evaluasi Jabatan (SIVAJAB), pengelolaan Sistem Manajemen Pegawai (SIMPEG), pengelolaan Sistem Administrasi Pengelolaan Kepegawaian (SAPK), Penyusunan data perubahan pemangku jabatan lingkup Ditjen PKH sebagai dasar pembayaran Tunjangan Kinerja, pelaksanaan sumpah dan Pakta Integritas PNS, pelaksanaan ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (KPPI) dan Ujian Dinas, penataan arsip kepegawaian, pertemuan Koordinasi Kepegawaian, dan Pertemuan SIMPEG dan SAPK.

4) Pembekalan Keterampilan Wirausaha Purnabakti

Dalam rangka meningkatkan keterampilan bagi pegawai yang akan memasuki masa purnabakti, Dewan Pengurus KORPRI Ditjen PKH menyelenggarakan kegiatan Pembekalan Keterampilan Wirausaha Purnabakti yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari pada tanggal 6 s.d 10 April 2015, bertempat di Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang.

Kegiatan Pembekalan Keterampilan Wirausaha Purnabakti ini dilaksanakan secara swakelola antara Ditjen PKH dan BBPP Lembang. Kegiatan ini diikuti oleh 31 orang, yang terdiri dari pegawai Ditjen PKH (Pusat dan UPT). Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta Diklat mendapatkan bekal yang cukup untuk persiapan memasuki masa pensiun, baik kesiapan mental, spiritual dan jiwa wirausaha.

5) Pembinaan Budaya Kerja

Untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara diperlukan upaya luar biasa untuk menata ulang birokrasi dan aparatur dari tingkat tertinggi hingga terendah, melalui perubahan paradigma yang memberikan terobosan atau pemikiran baru. Perubahan paling mendasar yang diperlukan oleh aparatur adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja.

Ditjen PKH selalu berupaya untuk melakukan pembinaan terhadap para pegawai, sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanannya kepada masyarakat. Upaya pembinaan pegawai tersebut dilakukan melalui pembinaan disiplin pegawai, mental agama, etika dan jiwa korsa serta sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada seluruh pegawai lingkup Ditjen PKH baik Pusat maupun UPT. Pada tahun 2015, telah dilaksanakan pembinaan budaya kerja pegawai sebanyak 8 kegiatan.

6) Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Untuk mencapai keberhasilan program Ditjen PKH yakni Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat, diperlukan pengawalan terhadap pelaksanaan program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, diantaranya penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menjadi tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang peternakan dan kesehatan hewan. Keberadaan PPNS diharapkan dapat berperan secara optimal dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

Sehubungan dengan pentingnya keberadaan PPNS tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memandang perlu untuk melaksanakan Pendidikan dan Latihan PPNS (Diklat PPNS) bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Diklat PPNS ini diselenggarakan oleh Ditjen PKH bekerja sama dengan Badan Reserse dan Kriminal POLRI. Diklat PPNS ini dilaksanakan di Pusat Pendidikan Reserse dan Kriminal POLRI Megamendung pada tanggal 26 Agustus s.d. 24 Oktober 2015. Adapun tujuan pelaksanaan Diklat adalah membentuk PNS menjadi seorang Penyidik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peserta Diklat PPNS ini terdiri dari PNS pada Ditjen PKH dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota berjumlah 24 orang dan dinyatakan lulus mengikuti Diklat PPNS dengan predikat Baik.

7) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden

Pada tahun 2015 telah tersusun rancangan Peraturan Pemerintah tentang Otoritas Veteriner dan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemasukan Temak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.

Perkembangannya bahwa RPP Otoritas Veteriner, terakhir telah selesai diharmonisasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 22 Desember 2015, selanjutnya menunggu surat dari Menteri Hukum dan HAM kepada Menteri Pertanian terkait permohonan paraf RPP dimaksud, yang selanjutnya diproses ke Sekretariat Negara untuk pengesahannya. Untuk perkembangan RPP tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan bahwa RPP dimaksud telah disampaikan juga kepada Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian melalui Surat Menteri Pertanian kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor

252/HK.120/11/ M/2015 tanggal 25 Nopember 2015, posisi terakhir ada di Kemenko dan telah dibahas di Kemenko pada tanggal 29 Desember 2015, saat ini menunggu proses selanjutnya di Kemenko dan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan secara paralel RPP dimaksud disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Surat Menteri Pertanian kepada Menteri Hukum dan HAM Nomor 270/HK.120/M/12/2015 tanggal 16 Desember 2015 hal Permohonan Harmonisasi RPP tentang Pemasukan ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Dari Negara dan/atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.

- 8) Penyusunan Peraturan/Keputusan Menteri Pertanian bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pada tahun 2015 telah diterbitkan 38 buah Peraturan/Keputusan Menteri Pertanian bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan rincian Peraturan Menteri sebanyak 15 buah Peraturan Menteri Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian sebanyak 23 buah keputusan Menteri Pertanian

- 9) Pelaksanaan Bantuan Hukum Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan kondisi Pada tahun 2015 antara lain sebagai berikut :

- a) Temuan BPK Perwakilan Provinsi Bali atas aset lahan Perusda Bali yang dipergunakan oleh Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Temak sebagai *Breeding Center* tidak memberikan benefit kepada Perusda Bali.

Usulan penyelesaian :

- (1) Jangka Pendek

BPTU-HPT Denpasar perlu melihat potensi kegiatan yang tepat guna mengakomodir temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Bali untuk memberikan kontribusi/benefit bagi Perusda, namun tetap sesuai dengan koridor dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya perlu dibahas bersama dengan melibatkan Perusda, Pemprov Bali, dan BPTU-HPT Denpasar.

- (2) Jangka Panjang

BPTU-HPT Denpasar harus berdiri di atas lahan milik sendiri antara lain melalui :

- (a) Permintaan Hibah kepada Pemerintah Provinsi Bali (Surat Menteri Pertanian Ke Gubernur Bali);  
(b) Pengadaan Lahan/Ganti rugi/Kompensasi;  
(c) Tukar-menukar.

- b) Eksekusi lahan BPTU-HPT Sembawa

Permasalahan lahan seluas + 155,4 Ha BPTU-HPT Sembawa telah dilakukan eksekusi pada tanggal 7 Oktober 2015, dengan melibatkan Pengadilan Negeri Sekayu, Kepolisian, TNI.

Pelaksanaan eksekusi tersebut telah dilaporkan kepada Bapak Menteri Pertanian melalui surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 29008/HK.140/F/12/2015 tanggal 29 Desember 2015.

c) Penanganan Perkara Nomor 117/PUU-XIII/2015

Pengujian Materiil atas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap UUD 1945.

d) Penangan Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015

Pengujian Materiil atas Pasal 36C ayat (1) dan ayat (3), Pasal 36D ayat (1) dan Pasal 36E ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap UUD 1945.

10) Penyusunan Perjanjian Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan kondisional pada tahun 2015 sebagai berikut :

a) Penyerahan lahan Direktorat Tanaman Pangan ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi lokasi pemindahal kantor dan laboratorium BPMSPT dari Setu ke Cikarang;

b) Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Dengan Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Program Studi Kedokteran Hewan Universitas Hasanuddin, dan Program Kedokteran Hewan (PKH) Universitas Brawijaya Tentang Kerjasama Pengembangan Pendidikan Sumber Daya Manusia dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

11) Pembinaan dan Pengembangan Ketatausahaan

Pembinaan dan pengembangan ketatausahaan bertujuan untuk membangun ketatausahaan yang profesional berbasis *online* di lingkup Ditjen PKH, sehingga pengelolaan tata kelola persuratan dapat terintegrasi, baik di tingkat pusat maupun unit pelaksana teknis. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Agenda Surat *Online* (eSIMAS) telah disosialisasikan melalui pertemuan Apresiasi SIM Ketatausahaan dilaksanakan pada tanggal 22 s.d. 23 April 2015 di Jakarta, dihadiri oleh para Kasubbag Tata Usaha dan pengelola e-SIMAS lingkup Ditjen PKH (Pusat dan UPT). Untuk meningkatkan profesionalisme para pengelola ketatausahaan telah dilaksanakan kegiatan Pengembangan Karakter pada tanggal 23 s.d 24 Oktober 2015 di Sentul Bogor.

12) Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Ditjen PKH memiliki tenaga arsiparis yang berjumlah 4 orang. Kegiatan penyusutan dan pemusnahan arsip secara rutin dilakukan namun tahun 2015 ini menaruh perhatian khusus terhadap arsip Direktorat Budidaya Peternakan yang telah mengalami reorganisasi. Pembinaan dan pencerahan terhadap para pengelola arsip baik di tingkat Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis dilakukan melalui Pertemuan Kearsipan dan Perpustakaan yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 13 Juni 2015 di Jakarta.

### 13) Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan

Perpustakaan Ditjen PKH merupakan sarana pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka/pengguna baik di lingkup Ditjen PKH maupun di lingkungan lembaga pemerintah lainnya dan masyarakat. Sistem Informasi manajemen yang digunakan adalah aplikasi Senayan dimana pengguna bisa mengakses OPAC (Online Public Acces Catalogue) untuk semua koleksi yang ada di perpustakaan Ditjen PKH. Seluruh Unit Pelaksana Teknis telah menggunakan sistem perpustakaan online ini.

Selain menambah koleksi buku, perpustakaan juga mengembangkan koleksi digital yang dapat dimanfaatkan oleh para pengguna. Pembinaan dan pencerahan terhadap para pengelola perpustakaan baik di tingkat Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis dilakukan melalui Pertemuan Kearsipan dan Perpustakaan yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 13 Juni 2015 di Jakarta. Penggabungan kegiatan pertemuan kearsipan dan perpustakaan ini adalah dalam rangka efisiensi anggaran.

### 14) Pembinaan dan Pengembangan ISO 9001:2008

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 merupakan suatu standar internasional untuk sistem manajemen Mutu yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang atau jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu, dimana kebutuhan atau persyaratan tertentu tersebut ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan dan organisasi. Dalam menjamin kualitas pelayanan terhadap pelanggan eksternal dan internal. Sekretariat Ditjen PKH telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 sejak tahun 2013. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 dikeluarkan oleh QS Cert pada tanggal 15 Juli 2013.

Pada tanggal 3 Agustus 2015 QS Cert telah melakukan surveilans terhadap implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di Sekretariat Ditjen PKH. Hasil surveilans tersebut menyatakan bahwa Sekretariat Ditjen PKH telah mampu mengimplementasikan dan mempertahankan sertifikat sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008. Pada tahun 2016, akan dilakukan reakreditasi sertifikat sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008. Melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 diharapkan dapat lebih

meningkatkan pelayanan prima Sekretariat Ditjen PKH terhadap masyarakat pada umumnya dan pelanggan pada khususnya.

15) Pembinaan dan Pengembangan Unit Pelayanan Perizinan dan Rekomendasi (UPPR)

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan rekomendasi yang efektif, efisien dan transparan, perlu dilaksanakan pelayanan perizinan dan rekomendasi satu pintu di lingkungan Ditjen PKH dengan membentuk yang telah diresmikan pada tanggal 13 Pebruari 2014 dan diperkuat dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 206/Kpts/HK.340/F/03/2015 tanggal 17 Maret 2015. Terdapat 15 jenis komoditi perizinan dan rekomendasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dilayani oleh Direktorat Teknis terkait Ditjen PKH sebagaimana Tabel 23.

Tabel 23. Jenis Komoditi Perijinan dan Rekomendasi Ditjen PKH

No.	Jenis Komoditi	Penyelenggara proses
1	Benih dan /atau Bibit Ternak	Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak
2	Pemasukan Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Direktorat Pakan Ternak
3	Pendaftaran Pakan	Direktorat Pakan Ternak
4	Bahan Pakan Asal Tumbuhan	Direktorat Pakan Ternak
5	Bahan pakan Asal Hewan	Direktorat Kesehatan Hewan
6	Obat Hewan	Direktorat Kesehatan Hewan
7	Izin Usaha Obat Hewan	Direktorat Kesehatan Hewan
8	Hewan Kesayangan	Direktorat Kesehatan Hewan
9	Sapi Bakalan dan Sapi Indukan	Direktorat Kesehatan Hewan
10	Karkas, Daging dan Olahannya	Direktorat Kesmavet
11	Susu	Direktorat Kesmavet
12	Kulit dan Bulu	Direktorat Kesmavet
13	Telur dan Madu	Direktorat Kesmavet
14	Produk Hewan Non Pangan	Direktorat Kesmavet
15	Pakan Hewan Kesayangan	Direktorat Kesmavet

Sumber : Bagian Umum, 2015

Seiring dengan tingginya frekuensi permohonan izin dan rekomendasi, UPR Ditjen PKH telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Rekomendasi *Online* (eSIMREK). Berdasarkan Inpres No 7 tahun 2015 integrasi rekomendasi dan perizinan diawasi oleh KPK untuk menghindari potensi korupsi dan mengatasi masalah *dwelling time*, dimana penerapan rekomendasi perizinan secara elektronik diharapkan mampu meminimalisir potensi korupsi, diharapkan kedepan 15 komoditas pelayanan Ditjen PKH dapat diterapkan secara *on-line* sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 304/Kpts/TI.130/5/2015 tentang pengelola situs web Kementerian Pertanian. Dari 15 komoditi diatas, 8 komoditi telah dilayani dengan sistem *online* (baik melalui Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian/PPVTTP maupun UPPR).

Berdasarkan Pementan Nomor 117/Permentan/Hk.3001/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian secara *online*, jenis perizinan yang melalui PPVTTP adalah :

- a) Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak (DOC dan bibit/semem/embrio ternak).
- b) Pemasukan dan Pengeluaran Bibit/Benih Hijauan Pakan Ternak.
- c) Pendaftaran Pakan
- d) Izin Usaha Obat Hewan
- e) Pemasukan karkas, daging dan/atau olahannya.

Koordinasi dengan pihak PPVTPP dan Pusat Data dan Sistem Informasi (PUSDATIN) terus dilakukan dalam rangka mengintegrasikan sistem agar penerapan satu pintu pelayanan dapat terwujud sempurna sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 117/Permentan/HK.300/11/2013.

Adapun jenis pelayanan perizinan dan rekomendasi yang telah dikelola oleh UPPR secara online meliputi :

- a) Sapi Bakalan dan Sapi Indukan.

Berdasarkan Permentan Nomor 97/Permentan/PD.410/9/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 85/Permentan/PD.410/8/2013, jenis perizinan yang telah *Online* langsung melalui UPR Ditjen PKH adalah Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan dan Sapi Siap Potong.

- b) Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan.
- c) Pemasukan Bahan Baku Obat Hewan Non Register.

UPPR dalam pelayanan perijinan dan rekomendasi telah mengembangkan dan membuat sendiri program sistem aplikasi *on-line* dimana PPVTPP sebagai *user/penggunanya* untuk komoditas sebagai berikut :

- a) Bibit dan Benih Temak (Day Old Chick / Ayam Umur Sehari , Bibit, semen dan embrio sapi).
- b) Bibit/Benih Hijauan Pakan Ternak
- c) Pendaftaran Pakan
- d) Bahan Pakan Asal Hewan
- e) Obat Hewan (Bahan Baku Obat Hewan Non Register)
- f) Sapi Indukan dan Sapi bakalan
- g) Karkas, Daging dan Olahannya.

Jenis komoditi yang dilayani secara non *online* ini adalah :

- a) Obat Hewan (Bahan Baku Obat Hewan Register dan Registrasi Obat Hewan)
- b) Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Kesayangan.
- c) Pemasukan produk susu.

- d) Pemasukan produk kulit dan bulu.
- e) Pemasukan telur dan madu
- f) Pemasukan Produk Hewan Non Pangan.
- g) Pemasukan Pakan Hewan Kesayangan.

Jumlah surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Rekomendasi Ditjen PKH pada tahun 2014 adalah 16.915 surat. Adapun Jenis dan Jumlah Permohonan Rekomendasi tahun 2015 sebagaimana Lampiran 3.

**3.3.6.5. SAKIP**

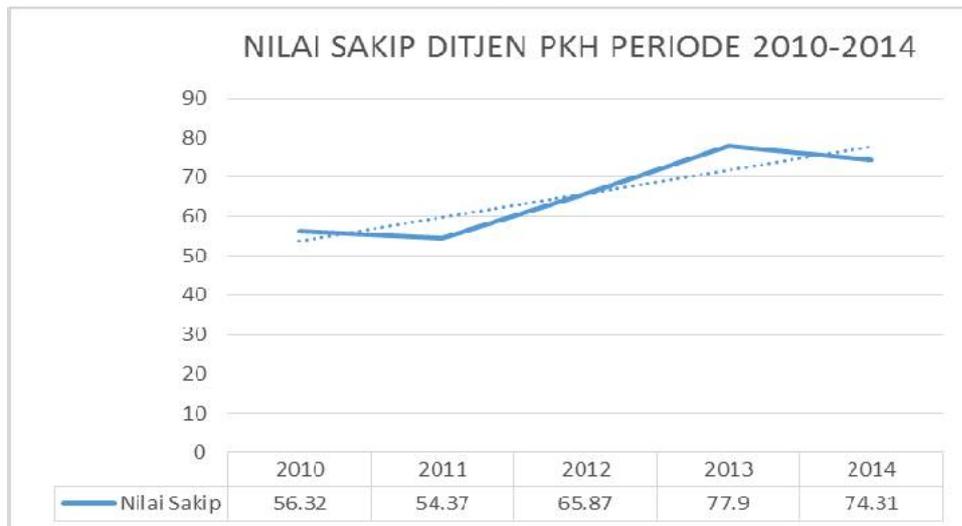
SAKIP yang merupakan instrumen instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, yang mencakup komponen perencanaan kinerja, pengukuran dan pemantauan capaian kinerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

Hasil evaluasi Sistem AKIP Ditjen PKH dari tahun 2010-2014 oleh Inspektorat Jenderal, Kementan cenderung membaik dari Kategori cukup (CC) pada tahun 2010 menjadi kategori sangat baik (A) pada tahun 2013. Penilaian SAKIP Tahun 2014 adalah kategori baik (B), sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 24 dan Grafik 6.

Tabel 24. Penilaian SAKIP dilingkup Ditjen PKH 2010-2014

No.	Tahun	Skor	Nilai	Kategori
1.	2010	56,32	CC	Cukup
2.	2011	54,37	CC	Cukup
3.	2012	65,87	B	Baik
4.	2013	77,90	A	Sangat Baik
5.	2014	74,31	B	Cukup Baik

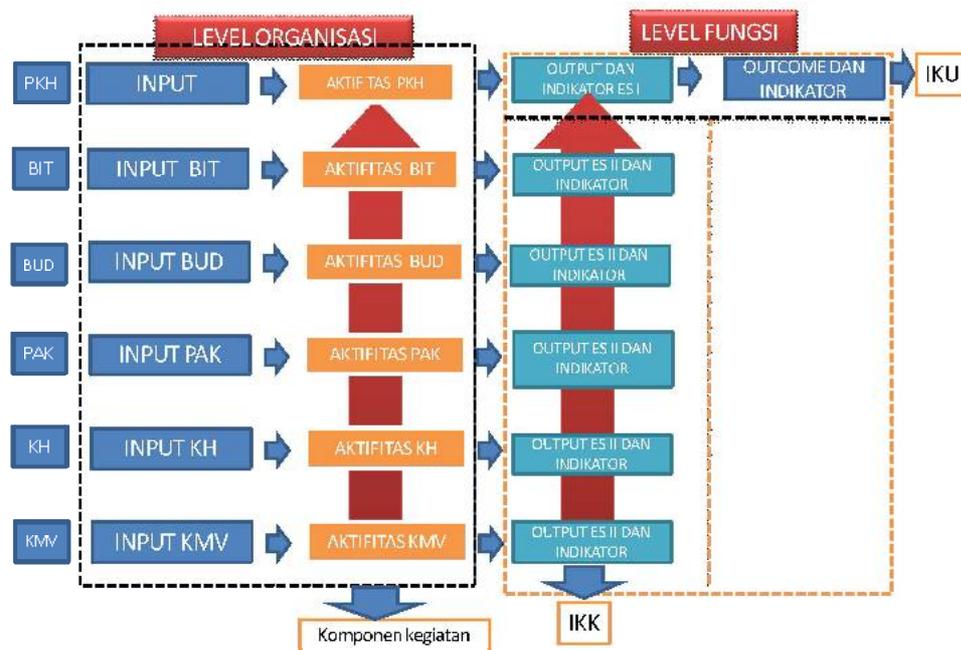
Sumber : Data diolah Hasil Evaluasi SAKIP Itjen Kementan, 2015



Grafik 6. Nilai SAKIP Ditjen PKH Periode 2010-2014

Sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan agar penganggaran di Indonesia menggunakan cara penganggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada *outcome*. Seiring dengan semangat untuk menerapkan secara penuh *performan base budgeting* diperlukan penguatan rencana strategis dengan penataan arsitektur kinerja dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL). Arsitektur kinerja tersebut menggunakan pendekatan kerangka logika (*logik model*) program dengan basis pada *outcome* yang komponennya terdiri atas *outcome*, output, aktivitas, input dengan berbagai indikator dan target untuk masing-masing *outcome* dan output.

Ditjen PKH telah menyusun kerangka logik model yang dituangkan dalam ADIK untuk tahun 2016 – 2019. Di dalam ADIK tersebut disebutkan sebagai input adalah anggaran, SDM, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, prasarana dan sarana, data dan informasi, NSPK dan organisasi kelembagaan peternakan dan kesehatan hewan. Dengan input tersebut maka *outcome* yang diharapkan adalah sasaran IKU berupa peningkatan produksi pangan asal ternak, peningkatan daya saing peternakan, dan peningkatan kesejahteraan petemak.



Sumber : Renstra Ditjen PKH Tahun 2015-2019

Gambar 4. Struktur IKU dan IKK dalam ADIK

### 3.3.6.6. SPI

Sistem Pengendalian Intern (SPI) efektif diimplementasikan di Ditjen PKH pada tahun 2009 mencakup seluruh unit kerja termasuk 22 UPT lingkup Ditjen PKH. Berbagai penghargaan telah diberikan seperti tampak pada Tabel 10. Selama kurun waktu 2010-2014 Ditjen PKH telah menerima sebanyak 25 penghargaan SPI.



Penilaian Implementasi SPI oleh Ditjen PKH di Bandung, Juni 2014



Forum SPI di Yogyakarta, Juni 2015

Tabel 25. Daftar Penghargaan SPI Ditjen PKH tahun 2010-2014

No	Tahun	Satker	Penghargaan
1	2010	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Unit Eselon I yang Pertama Melaksanakan Forum SPI
		Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Peringkat Pertama Pembina SPI Terbaik Tingkat Eselon I lingkup Kementan
		Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Peringkat Pertama Tim Satiak P Sangat Handal Tingkat Eselon I lingkup Kementan
		Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Perah Baturraden	Peringkat Kedua Tim Satiak P Handal Tingkat Eselon II lingkup Kementan
		Balai Inseminasi Buatan Lembang	Peringkat Pertama Tim Satiak P Sangat Handal Tingkat Eselon III lingkup Kementan
		Balai Pengujian Mutu dan Produk Peternakan	Peringkat Kedua Tim Satiak P Handal Tingkat Eselon III lingkup Kementan
2	2011	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	Satiak P Terbaik II Tingkat Eselon II lingkup Kementan
		Balai Inseminasi Buatan Lembang	Satiak P Terbaik I Tingkat Eselon III lingkup Kementan
		Balai Pengujian Mutu dan Produk Peternakan	Satiak P Terbaik II Tingkat Eselon III lingkup Kementan
		Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Dwiguna dan Ayam Serbawa	Satiak P Terbaik III Tingkat Eselon III lingkup Kementan
		Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Presentase Handal terbanyak I Eselon I yang Mempunyai Satiak P Handal
3	2012	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Satiak P Terbaik I Tingkat Eselon I lingkup Kementan
		Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	Satiak P Terbaik I Tingkat Eselon II lingkup Kementan
		Balai Inseminasi Buatan Lembang	Satiak P Terbaik II Tingkat Eselon III lingkup Kementan
		Balai Embrio Ternak Cipelang	Satiak P Terbaik III Tingkat Eselon III lingkup Kementan
		Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pembina SPI Terbaik I Tingkat Eselon I lingkup Kementan
4	2013	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terbaik I Satiak P Terbaik Tingkat Eselon I lingkup Kementan
		Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terbaik I Eselon I Pembina SPI Terbaik lingkup Kementan
		Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	Terbaik II Satiak P Terbaik Tingkat Eselon II lingkup Kementan
5	2014	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Satiak P terbaik tingkat Eselon I lingkup Kementan
		Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pembina SPI Terbaik I tingkat Eselon I lingkup Kementan
		Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	Satiak P terbaik I tingkat Eselon II lingkup Kementan
		Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hujan Pakan Ternak Baturraden	Satiak P Terbaik II tingkat Eselon II lingkup Kementan
		Balai Inseminasi Buatan Lembang	Satiak P Terbaik I Tingkat Eselon III lingkup Kementan
		Balai Veteriner Banjarbaru	Satiak P Terbaik II Tingkat Eselon III lingkup Kementan

Sumber : data diolah Penghargaan SPI Itjen Kementan, 2014

### 3.3.6.7. IPNBK

Untuk mengevaluasi penerapan nilai-nilai dan makna bekerja di Kementerian Pertanian tersebut, dilaksanakan Pengukuran Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja (IPNBK) di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagai acuan bagi setiap pimpinan unit kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan nilai budaya kerja pada unit kerja yang dipimpinnya. Dengan demikian dapat diketahui penerapan nilai budaya kerja pada setiap unit kerja di lingkungan Ditjen PKH.

Nilai IPNBK diukur terhadap penerapan lima komponen budaya kerja meliputi Komitmen, Keteladanan, Profesionalisme, Integritas dan Disiplin, dengan nilai indeks skala 1-4 dengan interval nilai mutu 25-100, dan kategori A (Sangat baik), B (Baik), C (Kurang baik) dan D (Tidak Baik).

Pengukuran IPNBK tahun 2015, diperoleh nilai IPNBK sebesar 3,62 (Sangat Baik) sebagaimana terlihat pada Tabel 25. Nilai ini melebihi target tahun 2015 sebesar 3,33 atau 8,71%. Nilai IPNBK tahun 2015 ini mengalami peningkatan sebesar 8.29% dibandingkan tahun 2014 (Nilai IPNBK tahun 2014 sebesar 3,32 kategori sangat baik).

Tabel 26. Perbandingan Nilai IPNBK tahun 2014 dan 2015

No.	Komponen Nilai Budaya Kerja	Tahun 2014	Tahun 2015	Persentase Peningkatan (%)
1	Komitmen	3.26	3.56	8.43
2	Keteladanan	3.33	3.60	7.50
3	Profesionalisme	3.27	3.63	9.92
4	Integritas	3.31	3.69	10.30
5	Disiplin	3.39	3.70	8.38
	<b>IPNBK</b>	<b>3,32 (Sangat baik)</b>	<b>3.62 (Sangat baik)</b>	<b>8.29</b>

Sumber : Bagian Umum 2015

Hasil pengukuran IPNBK ini selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam upaya memperbaiki dan menggerakkan peningkatan budaya kerja aparatur.

### 3.3.6.8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Data IKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong bagi setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Pada tahun 2015, telah dilakukan pengukuran IKM terhadap 23 unit pelayanan publik lingkup Ditjen PKH yaitu Unit Pelayanan Perizinan dan Rekomendasi (UPPR) Pusat dan UPT, pada 2 periode yaitu periode I (Januari s.d Juni) dengan responden yang terdiri dari pelaku usaha, stake holder dan masyarakat.

Pada Tabel 26 dapat dilihat perolehan nilai IKM periode I sebesar 3,26 dengan kategori sangat baik (mutu pelayanan A) dan nilai IKM periode II sebesar 3,29 dengan kategori sangat baik (mutu pelayanan A), sehingga secara keseluruhan diperoleh nilai IKM tahun 2015 sebesar 3,27 dengan kategori sangat baik (mutu pelayanan A). Nilai capaian IKM tahun 2015 ini memenuhi target yang ditentukan sebesar 3,27 atau 100%. Nilai IKM tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 4,14% jika dibandingkan tahun 2014 (Nilai IKM sebesar 3.14) dengan kategori Baik. Nilai IKM lingkup Ditjen PKH Tahun 2015 sebagaimana Tabel 26 berikut.

Tabel 27. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015

No	Unsur Pelayanan	Nilai IKM		
		Periode I	Periode II	Tahun 2015
1	Prosedur Pelayanan	3.23	3.27	3.25
2	Persyaratan Pelayanan	3.22	3.28	3.25

3	Kejelasan Pelaksana Pelayanan	3.25	3.30	3.28
4	Kedisiplinan Pelaksana Pelayanan	3.23	3.27	3.25
5	Tanggung Jawab Pelaksana Pelayanan	3.26	3.36	3.31
6	Kemampuan Pelaksana Pelayanan	3.30	3.33	3.32
7	Kecepatan Pelayanan	3.17	3.22	3.20
8	Keadilan Mendapatkan Pelayanan	3.42	3.39	3.40
9	Kesopanan dan Keramahan Pelaksana	3.40	3.35	3.38
10	Kewajaran Biaya Pelayanan	3.23	3.29	3.26
11	Kepastian Biaya Pelayanan	3.28	3.33	3.30
12	Kepastian Jadwal Pelayanan	3.26	3.28	3.27
13	Kenyamanan Lingkungan	3.33	3.33	3.33
14	Keamanan Pelayanan	3.31	3.37	3.34
	NILAI IKM	3.26	3.29	3.27
	NILAI KONVERSI IKM	81.45	82.28	81.86
	MUTU PELAYANAN	<b>A (Sangat Baik)</b>	<b>A (Sangat Baik)</b>	<b>A (Sangat Baik)</b>

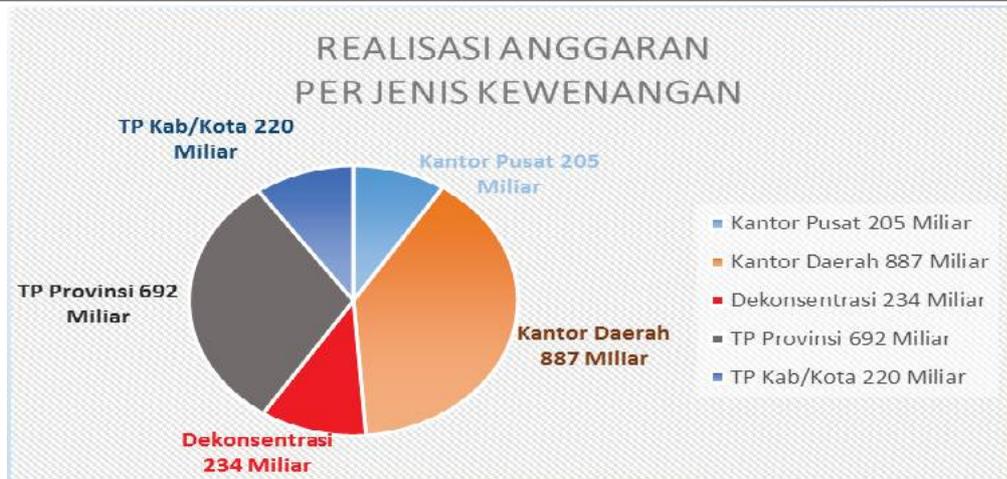
Sumber: Bagian Umum 2015

### 3.3.7. Realisasi Anggaran Ditjen Tahun 2015

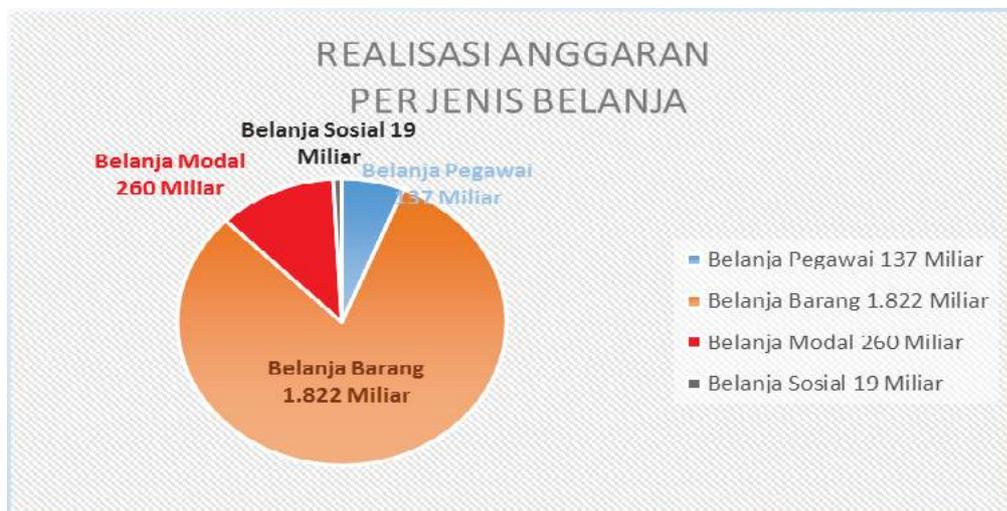
Sampai dengan 31 Desember 2015, serapan anggaran Ditjen PKH sebesar Rp. 2.240 miliar (71,45%). Kantor Pusat sebesar Rp. 205 miliar (40,18%), Kantor Daerah Rp. 887miliar (79,18%), Dekonsentrasi Rp. 234 miliar (82,71%), TP Provinsi Rp. 692 miliar (71,12%), dan TP Kab/Kota Rp. 220 miliar (89,52%).

Berdasarkan Jenis Belanja realisasi anggaran Ditjen PKH adalah Belanja Pegawai Rp. 137 miliar (96,37%), Belanja Barang Rp. 1.822 miliar (68,04%), Belanja Modal Rp. 260 miliar (88,46%), dan Belanja Sosial Rp. 19 miliar (99,49%).

Berdasarkan kegiatan utama adalah Peningkatan Produksi Ternak Rp. 633 miliar (60,61%), Peningkatan Produksi Ternak Rp. 506 miliar (59,83%), Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis Rp. 353 miliar (88,25%), Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Rp. 309 miliar (84,24%), Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing Rp. 159 miliar (88,85%), dan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Rp. 277 miliar (93,79%).



Grafik 7. Realisasi Anggaran Per Jenis Kewenangan Ditjen PKH Tahun 2015



Grafik 8. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Ditjen PKH Tahun 2015



Grafik 9. Realisasi Anggaran Per Kegiatan Utama Ditjen PKH Tahun 2015

**IV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN BERKELANJUTAN**

**4.1. Sasaran Pembangunan PKH Tahun 2016**

Dalam kurun waktu 2015-2019 arah kebijakan yang ditempuh oleh Ditjen PKH mengacu dengan arah kebijakan jangka menengah pembangunan pertanian nasional. Kebijakan pembangunan pertanian tersebut adalah mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Kementerian Pertanian telah menetapkan 8 tahapan menuju pertanian industri. Tahapan periode tahun 2015-2019 dirumuskan untuk kokohnya pondasi bioindustri yang berkelanjutan, sehingga pada tahun 2045 yaitu tahapan akhir pertanian bioindustri, dapat terwujud tahapan pertanian Indonesia bermartabat, mandiri, maju, adil dan makmur.

Mengacu pada rumusan di atas, maka Ditjen PKH pada 2015-2019 menetapkan arah kebijakan Terwujudnya Kedaulatan dan Keamanan Pangan Asal Ternak mendukung kokohnya pondasi bioindustri yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan peternakan dan keswan tersebut, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya produksi pangan asal ternak, daya saing peternakan, dan kesejahteraan peternak

Tabel 28. Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Peningkatan produksi pangan asal ternak	a. Produksi daging sapi kerbau (000 ton)	545,29	588,56	639,61	694,96	755,04
		b. Produksi daging ternak lainnya (000 ton)	3.438,01	3.678,67	3.796,88	3.969,57	4.167,51
		c. Produksi telur (000 ton)	3.131,89	3.393,36	3.565,86	3.655,43	3.770,04
		d. Produksi susu (000 ton)	799,97	850,77	910,57	980,88	1.063,56
2.	Peningkatan daya sang peternakan	a. Peningkatan status kesehatan hewan (terbebaskannya dan target yang telah ditetapkan) %	70	73	76	78	80
		b. Jumlah sertifikat (volume)	25.865	26.000	27.000	28.000	29.000
		c. Jumlah ekspor obat hewan (volume)					
		d. Jumlah ekspor semen beku (volume)					
		e. Jumlah ekspor produk peternakan (volume)					
		f. Jumlah ekspor ternak hidup (volume)					
3.	Peningkatan kesejahteraan peternak	Nilai Tukar Peternakan (indeks)	106,94	107,23	107,53	107,82	108,12

Sumber : Renstra Ditjen PKH

**4.2. Strategi Pencapaian Sasaran**

Selaras dengan arah kebijakan pembangunan pertanian maka Ditjen PKH merumuskan strategi untuk pemenuhan pangan asal ternak dan pembangunan agribisnis peternakan rakyat sebagai berikut :

**a. Pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik lokal**

Indonesia memiliki sumber daya plasma nutfah yang merupakan sumber daya genetik lokal yang berlimpah. Oleh karena itu pelestarian dan pemanfaatannya melalui berbagai program konversi dan pemuliabiakan harus terus dilanjutkan dan menjadi strategi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Untuk melindungi sumber daya genetik lokal pemerintah telah menyusun pelestarian dan pemanfaatan ternak lokal yang berpotensi untuk dikembangkan yaitu: ternak asli sapi yang meliputi 6 rumpun, kerbau 6 rumpun asli, kambing 5 rumpun, domba 6 rumpun, ayam 7 rumpun, itik 13 rumpun dan kuda 1 rumpun asli. Pemerintah akan mengatur dari sisi konsumsi ternak tersebut dan pelestariannya.

**b. Penguatan kawasan dan kelembagaan peternakan**

Pemerintahan Jokowi JK telah memutuskan untuk membangun dari pinggiran. Oleh karena itu fokus pembangunan peternakan dan kesehatan hewan diarahkan kepada pembangunan kawasan. Telah diputuskan terdapat 100 kawasan pengembangan sapi potong, 13 kawasan pengembangan kerbau, 11 kawasan pengembangan kambing, 6 kawasan pengembangan sapi perah, 5 kawasan pengembangan domba dan 9 pengembangan kawasan babi diberbagai kabupaten/kota di Indonesia. Pengembangan kawasan akan memperkuat kelembagaan peternakan dan kesehatan hewan yang diharapkan dapat memperkuat simpul-simpul pelayanan teknis pelayanan ekonomi lainnya.

**c. Penguatan infrastruktur dan pelayanan teknis**

Penguatan infrastruktur dan peningkatan pelayanan teknis merupakan menjadi dua hal yang saling mendukung. Pelayanan teknis peternakan dan kesehatan hewan menjadi optimal apabila ada infrastrukturnya. Oleh karena itu dalam hal pelayanan teknis melalui fungsi-fungsi pembangunan peternakan dan keswan yaitu pelayan perbibitan, budidaya, pakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen masing-masing memerlukan infrastruktur sesuai dengan fungsinya. Pelayanan fungsi-fungsi peternakan sangat memerlukan adanya unit pelayanan teknis yang dapat menjangkau sampai ditingkat lapangan. Oleh karena itu dalam kurun waktu 5 tahun mendatang diperlukan penguatan UPT baik UPT pusat maupun UPT daerah. Ditingkat lapangan juga akan diperkuat infrastruktur pelayanan fungsi yaitu pendirian village breeding center, lumbung pakan, puskesmas, pos IB, sampai kepada sarana padang penggembalaan terutama di wilayah timur Indonesia.

**d. Pemberdayaan Peternak dan Daya Saing**

Pemberdayaan peternak sesuai yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2013 bahwa pemberdayaan peternak adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk meningkatkan kemandirian, memberikan kemudahan dan kemajuan usaha, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan Peternak. Dengan demikian pemberdayaan peternak mencakup daya saingnya. Untuk ini akan dibuka akses dan kemudahan peternak terhadap sumber pembiayaan, pemodalannya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi.

**e. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas (kualitas) SDM peternakan dan kesehatan hewan**

Angkatan kerja peternakan dan kesehatan hewan menunjukkan kecenderungan yang semakin menua. Hal tersebut menunjukkan bahwa lapangan usaha peternakan dan kesehatan hewan mulai tidak menarik bagi generasi muda. Data sakernas menunjukkan bahwa tenaga kerja subsektor peternakan pada tahun 2013 didominasi oleh tenaga kerja laki-laki sebanyak lebih dari 2,4 juta orang (58,7%) sedangkan komposisi tenaga kerja perempuan lebih dari 1,7 juta orang (41,3%) pada umumnya tenaga kerja perempuan berpendidikan SD masih cukup dominan. Data sakernas menunjukkan juga bahwa lebih dari 1,6 juta orang (37,1%) berpendidikan SD. Oleh karena itu, peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas SDM peternakan dan kesehatan hewan menjadi kunci dari strategi lainnya. Upaya peningkatan tersebut dilakukan melalui pendidikan formal maupun informal. Melalui program pemerintah selalu terkait di dalamnya untuk peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas SDM.

**f. Penerapan Teknologi dan Sistem Informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Ditjen PKH menyadari bahwa penerapan teknologi merupakan faktor terpenting untuk peningkatan produksi dan produktivitas ternak. Saat ini tingkat kematian, angka kesakitan, pertambahan berat badan, lamanya calving interval dan masalah kurangnya pakan pada musim kemarau dan masih lemahnya penataan pemotongan ternak (TPH) disadari dapat dipecahkan dengan penerapan teknologi dibidang pembibitan, budidaya, pakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner melalui teknologi dan bioteknologi. Penerapan teknologi dapat ditempuh dengan melakukan kerja sama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Demikian juga untuk sistem informasi akan ditempuh mengikuti perkembangan yang berbasis computer, antara lain: dibidang perencanaan sudah mulai diterapkan e-planning dan bidang pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement. Dibidang teknis pelayanan dikembangkan sms gateway untuk pemotongan ternak dan ISIKHNAS untuk kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, menjadi bagian e-government.

**g. Penguatan Regulasi Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Dalam hal regulasi, penguatan akan terus dilakukan oleh Ditjen PKH. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 41 tahun 2014 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Sebagai turunannya Ditjen PKH telah banyak menyusun Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Pertanian. Sesuai dengan perkembangan, berbagai peraturan tersebut akan mengalami penambahan, revisi, atau pencabutan.

**h. Mendorong insentif peternakan**

Mendorong insentif peternakan akan dilakukan ditngkat peternak maupun badan usaha berbentuk koperasi, BUMN, BUMD dan Perusahaan. Insentif dapat diberikan dalam pemberian bantuan modal khususnya kepada peternak sasaran, pembebasan bea masuk untuk bibit, pembebasan pajak dan berbagai kemudahan lainnya untuk menarik investasi. Diakui bahwa investasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan realisasinya masih rendah tidak sesuai harapan. Dalam rangka menuju kemandirian dan keamanan pangan menuju bioindustri peternakan dan kesehatan hewan maka berbagai bentuk insentif akan dikembangkan sesuai dengan peraturan perundangan. Insentif

mengandung arti “perlindungan” terhadap petani peternak dan sumber daya lokal. Oleh karena itu bentuk-bentuk insentif ini akan berbeda dengan untuk korporasi.

**i. Perbaikan Tata Niaga Ternak dan Produk Ternak**

Mata rantai yang panjang komoditas ternak dan produknya sudah lama disadari. Tata niaga ternak potong yang sangat panjang dari wilayah produsen ternak di NTB, NTT, dan Sulawesi Selatan ke Jakarta sebagai wilayah konsumen menyebabkan peternak menerima margin keuntungan yang kecil dibandingkan pedagang, distributor dan pengecer. Untuk peternakan unggas khususnya ayam ras masalah tata niaga dan pemasaran produknya terjadi sebagai akibat pertentangan antara peternak mandiri, kemitraan dan perusahaan. Perusahaan cenderung mengusahakan dalam usaha yang terintegrasi sehingga usahanya menjadi lebih efisien.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Ditjen PKH akan meningkatkan koordinasi lintas sektor khususnya dengan Kementerian terkait. Dengan Kementerian Perhubungan terus dijajaki adanya pengadaan kapal ternak untuk lebih meningkatkan pendapatan peternak di daerah produsen sebagai akibat berkurangnya kerugian pasca panen. Selain itu di daerah-daerah produsen ternak akan dibangun rumah potong hewan (RPH) modern sehingga angkutan ternak digantikan oleh mata rantai dingin untuk mengurangi perlakuan yang tidak sesuai dengan kaidah animal welfare. Dengan Kementerian Perdagangan terus akan dilakukan kerjasama dalam bentuk tim misalnya tim harga agar harga tidak naik dan menyesuaikan dengan suplay ternak local.

**4.3. Kegiatan Utama Tahun 2016**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka kegiatan utama Ditjen PKH tahun 2016 adalah kegiatan peningkatan kuantitas dan kualitas benih/bibit dan produksi ternak, peningkatan produksi pakan ternak, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, penjaminan produk hewan yang asuh dan berdaya saing, dan kegiatan dukungan manajemen teknis. Target utama kegiatan tersebut yang ingin dicapai berdasarkan DIPA Nomor 018.06.1.238776/2016 Tanggal 7 Desember 2015 adalah :

**a. Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Benih/Bibit Dan Produksi Ternak**

Target utama kegiatan peningkatan kuantitas dan kualitas benih/bibit dan produksi ternak adalah Penguatan Manajemen Sentra Peternakan Rakyat (SPR) 500 unit, Pengadaan Pejantan dan Indukan Sapi Potong Impor 12.053 ekor, Penguatan Produksi Ternak 438 paket, Peningkatan Produksi Bibit Unggul 506.842 ekor, Peningkatan Produksi Semen Beku Sapi 5,05 juta dosis, Peningkatan Produksi Embrio Ternak 800 embrio, dan Penguatan Pembibitan ternak di Pulau/Kabupaten/Kota Terpilih 62 paket.

**b. Peningkatan produksi pakan ternak**

Target utama kegiatan peningkatan produksi pakan ternak adalah Pengembangan Lumbung Pakan (LP) Ruminansia 5 kelompok, Pengembangan Padang Penggembalaan (Pastura) di UPT 573 Ha, Pengembangan Kebun HPT

di UPT 474 Ha, Penguatan Sumber bibit/benih HPT di UPTD 100, Pengembangan Padang Pengembalaan 800 Ha, Pemanfaatan Lahan Ex Tambang Untuk Pengembangan HPT 400 Ha, Pemeliharaan Padang Pengembalaan 6.890 Ha, dan Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Ternak Berkualitas 45.943.000 stek,

c. Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis Dan Penyakit Zoonosis

Target utama kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis adalah Pengendalian dan Penanggulangan PHMSZ 8.369.313 dosis, Penyidikan dan Pengujian PHMSZ 352.743 sampel, dan Tenaga Harian Lepas Pelayanan Kesehatan Hewan 1.100 orang.

d. Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan

Target utama kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan adalah Fasilitas Pengolahan Daging Ruminansia 17 unit, Fasilitas Pengolahan Unggas dan Aneka Ternak 24 unit, Fasilitas Pengolahan Susu 17 unit, Fasilitas Pengolahan Biogas, Kompos dan Pupuk Cair 21 unit, Fasilitas Sarana dan Kelembagaan Pasar Ternak 11 unit, Fasilitas Sarana Unit Pemasaran Hasil Peternakan 12 unit, serta Investasi dan Pengembangan Usaha 1 lokasi.

e. Penjaminan Produk Hewan Yang Asuh Dan Berdaya Saing

Target utama kegiatan penjaminan produk hewan yang asuh dan berdaya saing adalah Fasilitas Bangunan RPH Ruminansia 4 unit, Fasilitas Peralatan Rantai Dingin Daging di RPH Ruminansia 5 unit, Fasilitas Kios Daging 5 unit, Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Kesmavet 652 orang, dan Fasilitas Model Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Pemotongan Hewan Qurban 23 unit.

f. Kegiatan Dukungan Manajemen Teknis

Target utama kegiatan dukungan manajemen teknis adalah Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan 156 dokumen, Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan 185 dokumen, Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara 228 dokumen, dan Ketatalaksanaan Organisasi Kepegawaian, Hukum serta Tata Usaha 99 dokumen.

**V. PENUTUP****5.1. Kesimpulan****5.1.1. Fungsi Perbibitan Ternak**

- 1) Tahun 2015 telah ditetapkan 8 (delapan) wilayah sumber bibit yaitu kabupaten Kebumen (Sapi PO), Gunung Kidul (Sapi PO), Banjarnegara (Domba Batur dan Kambing PE), Banyumas (Kambing PE), Barito Kuala (Sapi Bali), Bojonegoro (Sapi PO) dan Lampung Selatan (Sapi PO).
- 2) Sampai dengan Desember 2015 telah ditetapkan/dilepas 64 rumpun galur ternak. Penetapan/pelepasan ternak selama tahun 2010-2015.
- 3) Pejantan unggul di BIB Nasional dan BIBD sampai bulan Juli 2015 berjumlah 240 ekor lokal dan 317 ekor eksotik. Produksi semen beku pada BBIB Singosari dan BIB Lembang kurun waktu tahun 2010 sampai dengan bulan Desember 2015 mencapai 29.634.647 dosis dan distribusi mencapai 18.438.689 dosis.
- 4) Produksi temak bibit unggul pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Temak dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2015 mencapai 1.603.498 ekor. Produksi tahun 2015 sampai dengan Desember mencapai 492.245 ekor.
- 5) Embrio ternak diproduksi BET Cipelang, realisasi produksi 2010 sampai dengan bulan Desember 2015 sebanyak 9.061 embrio.
- 6) Realisasi pemanfaatan Kredit Usaha Pembibitan Sapi Perah sampai dengan 15 Desember 2015 sebanyak 50.805 ekor sapi dengan total dana sebesar Rp. 637,45 miliar (15,92% dari total PKP Rp. 4,003 Triliun) dengan jumlah pelaku sebanyak 493 pelaku usaha pembibitan sapi (12 perusahaan, 17 koperasi dan 464 kelompok/gabungan kelompok).
- 7) Sampai dengan 15 Desember 2015, Asuransi Temak Sapi (ATS) telah diakses oleh peserta asuransi sebanyak 93 pelaku yang terdiri atas 2 koperasi dan 91 kelompok/gabungan kelompok dengan total temak yang telah diasuransikan sebanyak 2.252 ekor dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 17,2 miliar.

**5.1.2. Fungsi Budidaya Ternak**

- 1) Realisasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sapi Potong sebanyak 350 kelompok (93,58%) dari target 374 kelompok, dengan realisasi pengadaan ternak sebanyak 9.566 ekor (ternak jantan sebanyak 1.159 ekor dan betina sebanyak 7.877 ekor). Untuk kegiatan melalui alokasi dana APBN-P di 7 provinsi dengan target output sebanyak 41 kelompok terealisasi sebanyak 36 kelompok atau (87,80%).
- 2) Realisasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Budidaya Kerbau dengan pengadaan ternak sebanyak 416 ekor (ternak jantan sebanyak 47 ekor dan betina sebanyak 245 ekor). Sedangkan kegiatan yang dialokasikan melalui

dana APBN-P dilaksanakan di 5 provinsi dari target output sebanyak 10 kelompok terealisasi sebanyak 9 kelompok atau (87.80%).

- 3) Target kegiatan Pengembangan Budidaya Kambing sebanyak 44 kelompok terdapat di 20 Provinsi dengan realisasi sebanyak 45 kelompok (102.27%). Realisasi pengadaan ternak sebanyak 2.411 ekor (ternak jantan sebanyak 239 ekor dan betina sebanyak 2.009 ekor). Untuk kegiatan yang dialokasikan melalui dana APBN-P di 11 provinsi dengan target output sebanyak 62 kelompok terealisasi sebanyak 55 kelompok atau (88.71%).
- 4) Target kegiatan Pengembangan Budidaya Domba sebanyak 32 kelompok terdapat di 6 Provinsi. Realisasi kegiatan sebanyak 30 kelompok (93.75%), dengan realisasi pengadaan ternak sebanyak 1.709 ekor (ternak jantan sebanyak 260 ekor dan betina sebanyak 1.285 ekor). Untuk kegiatan yang dialokasikan melalui dana APBN-P di 2 provinsi dengan target output sebanyak 19 kelompok hanya terealisasi sebanyak 8 kelompok atau (42.11%).
- 5) Pada tahun 2015, kegiatan sinkronisasi birahi regular melalui dana APBN dilaksanakan di daerah dan UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan total target kegiatan sebanyak 31.900 dosis, dengan rincian jumlah untuk daerah sebanyak 1.900 dosis dan di 4 UPT Ditjen PKH (BPTU HPT Sembawa, BIB Lembang, BPTU HPT Padang Mengatas dan BET Cipelang) sebanyak 30.000 dosis. Dari total target kegiatan pada tahun 2015 yaitu sebanyak 31.900 dosis, dilaporkan realisasinya adalah sebanyak 25.573 dosis (80.1%).
- 6) Pada tahun 2015, kegiatan InKA melalui pengadaan jantan pemacek dilaksanakan di 12 Provinsi dengan target pengadaan sapi jantan pemacek sebanyak 1.798 ekor. Adapun realisasi pelaksanaan kegiatan pengadaan dan distribusi pejantan pemacek sapi tersebut berjumlah sebanyak 2.142 ekor atau 119.13%. Pengadaan kerbau jantan pemacek dilaksanakan di 8 Provinsi dengan target pengadaan sebanyak 437 ekor. Realisasi pelaksanaan kegiatan sebanyak 337 ekor atau 77.12%.
- 7) Pengembangan budidaya sapi perah dilakukan melalui fasilitasi anggaran TP provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan di 7 provinsi dengan target output sebanyak 27 kelompok. Realisasi pelaksanaan kegiatan sebanyak 27 kelompok (100 %), dengan realisasi pengadaan ternak sebanyak 513 ekor (ternak betina calon induk).
- 8) Pengembangan budidaya kerbau perah dilakukan melalui fasilitasi anggaran TP provinsi dilaksanakan di 1 provinsi dan 1 kabupaten yakni Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan dengan target output sebanyak 3 kelompok. Realisasi pelaksanaan kegiatan sebanyak 3 kelompok (100 %), dengan realisasi pengadaan ternak sebanyak 51 ekor (ternak betina calon induk).
- 9) Pengembangan budidaya kambing perah dilakukan melalui fasilitasi anggaran TP provinsi dan Kabupaten/kota dilaksanakan di 10 provinsi dan 23 kabupaten yakni dengan target output sebanyak 53 kelompok. Realisasi pelaksanaan kegiatan sebanyak 53 kelompok (100 %), dengan realisasi

pengadaan temak sebanyak 1378 ekor (temak calon induk jantan 112 ekor dan betina 1266 ekor).

- 10) Pengembangan ayam lokal dengan target 146 kelompok terealisasi sebanyak 134 kelompok (91,78 %). Sedangkan realisasi populasi ayam lokal dari target 292.000 ekor terealisasi sebanyak 268.000 ekor (91,78 %).
- 11) pengembangan budidaya itik dengan target 45 kelompok terealisasi sebanyak 45 kelompok (100%). Sedangkan realisasi populasi ayam lokal dari target 45.000 ekor terealisasi sebanyak 45.000 ekor (100%).
- 12) pengembangan budidaya babi APBN Tahun 2015 terealisasi di 14 kelompok dari target 15 kelompok (93,33%) dengan jumlah populasi 736 ekor
- 13) pengembangan budidaya babi APBN-P Tahun 2015 terealisasi di 37 kelompok dari target 39 kelompok (94,87%) dengan jumlah populasi 1.884 ekor.

### 5.1.3. Fungsi Pakan Ternak

- 1) Pengembangan padang penggembalaan dilaksanakan mulai tahun 2013, sampai dengan Oktober 2015 telah dikembangkan 115 kelompok di 14 Kabupaten pada 7 provinsi dengan luas padang penggembalaan 8.154 Hektar.
- 2) Sampai dengan tahun 2015 terealisasi penanaman tanaman pakan ternak berkualitas sebanyak 12.295.349 stek atau setara 12.295 Hektar.

### 5.1.4. Fungsi Keswan

- 1) Realisasi penanggulangan gangguan reproduksi yang mendukung pelaksanaan GBIB sampai dengan bulan Desember tahun 2015 mencapai 249.832 ekor atau 83,28% dari total target akseptor gangrep sebanyak 300.000 ekor.
- 2) Sampai dengan bulan Desember 2015 tercatat 1262 unit Puskesmas yang tersebar di 417 kabupaten/kota terbagi dalam 1262 Kecamatan dengan jumlah tenaga Dokter Hewan tercatat 853 orang dan tenaga Paramedis Veteriner sebanyak 2432 orang.
- 3) Perkembangan Kasus AI menurun dari 346 kasus (2014) menjadi 123 kasus pada tahun 2015.
- 4) Selama tahun 2015 dilaporkan terjadi beberapa kasus PHMS seperti AI, rabies, penyakit hewan menular pada babi, *Septicemia epizootica* (SE) dan telah dilakukan respon cepat guna mencegah penyebaran penyakit lebih luas, pengendalian penyakit melalui penerapan biosekuriti dan depopulasi terbatas.
- 5) Selama tahun 2014-2015 ada 2 pulau yang memiliki populasi ternak sapi dan kerbau tinggi telah berhasil dibebaskan dari Brucellosis yaitu Pulau Sumba NTT (Kepmentan No. 52/Kpts/PD.630/1/2015) dan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur (Kepmentan No. 237/Kpts/PD.650/4/2015).

**5.1.5. Fungsi Kesmavet**

- 1) Rumah Potong Hewan Ruminansia yang telah mampu memproduksi daging segar dingin/beku sapi lokal adalah RPH-R Tembesi, Kab. Gianyar, Bali; RPH-R Potoe Tanoë Kabupaten Sumbawa Barat, NTB ; RPH-R Asakota Kota Bima, NTB; RPH-R Eka Putra Jaya, Kab. Bojonegoro, Jatim; dan RPH-R Segarau Bahari, Kab. Sumbawa, NTT. Kelima RPH-R tersebut telah mampu mengirim daging ke JABODETABEK kurang lebih 112 ton/bulan.
- 2) Tahun 2015 dalam proses pembangunan dan perbaikan sarana 23 unit RPH-70% (Oktober 2015).

**5.1.6. Fungsi Dukungan Manajemen**

- 1) Pengukuran IPNBK tahun 2015, diperoleh nilai IPNBK sebesar 3,62 (Sangat Baik).
- 2) Perolehan nilai IKM periode I sebesar 3,26 dengan kategori sangat baik (mutu pelayanan A) dan nilai IKM periode II sebesar 3,29 dengan kategori sangat baik (mutu pelayanan A), sehingga secara keseluruhan diperoleh nilai IKM tahun 2015 sebesar 3,27 dengan kategori sangat baik (mutu pelayanan A).
- 3) Penilaian SAKIP Tahun 2014 adalah kategori sangat baik (B) dengan nilai 74,31.
- 4) Jumlah Kerugian Negara yang bisa diselesaikan hasil pertemuan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di dua Provinsi tersebut adalah sebesar Rp. 252,53 juta.
- 5) Sampai dengan bulan Desember 2015 jumlah kumulatif sisa LHP (tahun 2000- 2015) sebanyak 126 LHP.

**5.2. Permasalahan**

**5.2.1. Fungsi Perbibitan Ternak**

- 1) Permasalahan dalam pelaksanaan asuransi Peternakan ini adalah peternak mengharapkan adanya subsidi asuransi bagi pengakses kredit KUPS seperti halnya dengan subsidi asuransi bagi petani padi, hal ini sangat membantu peternak pembibit karena cost yang ditanggung cukup besar.
- 2) Kelompok masih belum dapat menerapkan pola pencatatan yang tertib dan rapih khususnya dalam mencatat ternaknya baik secara harian, bulanan maupun tahunan.
- 3) Dalam usaha pembibitan ternak membutuhkan waktu yang cukup panjang dan pola recording yang baik, sehingga dibutuhkan pola pembinaan serta pendanaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan pola dan sistem usaha perbibitan.
- 4) Masih belum berjalannya upaya pengawasan penerapan kartu temak di lokasi uji coba kartu temak.

- 5) Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan keswan belum dapat menindak lanjuti penerapan kartu ternak melalui peraturan bupati atau peraturan gubernur.
- 6) Pelaksanaan penerapan kartu ternak di 8 lokasi uji coba masih belum dapat direalisasikan sesuai target populasi ternak.
- 7) Belum terlaksananya kemudahan bagi peternak yang telah memiliki kartu ternak.

#### **5.2.2. Fungsi Budidaya Ternak**

- 1) Proses penghematan anggaran sehingga terjadinya keterlambatan pelaksanaan kegiatan;
- 2) Pengadaan barang dan jasa menggunakan sistem kontraktual, sehingga pelaksanaan menjadi tidak tepat waktu bahkan ada beberapa kegiatan yang mengalami gagal lelang; dan
- 3) Proses lelang melalui ULP membutuhkan waktu yang cukup lama karena banyaknya lelang yang dilaksanakan di ULP.

#### **5.2.3. Fungsi Pakan Ternak**

- 1) Fluktuasi produksi karena musim.
- 2) Terbatasnya sebaran lahan dan sumber bibit HPT di masyarakat.

#### **5.2.4. Fungsi Keswan**

- 1) Populasi HPR belum terdata dengan baik,
- 2) Cakupan vaksinasi masih belum mencapai target,
- 3) Sarana dan prasarana veteriner belum memadai terkait kegiatan dan tindakan teknis dalam rangka pengendalian PHMS khususnya Brucellosis
- 4) Sistem pelaporan terkait situasi umum dan insidencence penyakit hewan menular serta data hasil pemeriksaan dan pengujian specimen sudah dilaksanakan secara terstruktur.

#### **5.2.5. Fungsi Kesmavet**

#### **5.2.6. Fungsi Dukungan Manajemen**

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pada setiap unit kerja pelayanan publik lingkup Ditjen PKH terdapat beberapa unsur pelayanan yang perlu mendapat perhatian dari pimpinan unit terkait dengan kinerja aparatur pemerintah yang masih belum memenuhi kualitas yang diharapkan oleh masyarakat. Unsur-unsur tersebut adalah prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kedisiplinan pelaksana pelayanan dan kecepatan pelayanan.

### **5.3. Saran**

#### **5.3.1. Fungsi Perbibitan Ternak**

- 1) Biaya penerbitan surat keterangan sehat dari dokter hewan yang merupakan syarat wajib bagi pengguna asuransi ternak sapi ini juga dianggap membebani petani, sehingga diharapkan adanya kebijakan penerbitan surat keterangan sehat tidak dibebankan ke peternak.
- 2) Perlu disusun terkait koordinasi dan pembinaan terhadap manajemen organisasi dan manajemen teknis pembibitan kepada kelompok pembibitan agar dapat berkelanjutan dan bersifat multiyears.
- 3) Perlu adanya koordinasi antara Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Kepala Badan SDM Pertanian untuk melakukan kerjasama dalam penguatan kelembagaan pembibitan bidang peternakan secara berkesinambungan.
- 4) Perlu adanya kerjasama dengan Kapolsek setempat, sebagaimana yang telah dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Tuban, dalam upaya pengawasan penerapan kartu ternak.
- 5) Guna keberlanjutan penerapan kartu ternak di seluruh kabupaten, diharapkan peran Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan keswan dapat menindak lanjuti melalui peraturan bupati atau peraturan gubernur.
- 6) Diharapkan pelaksanaan penerapan kartu ternak di 8 lokasi uji coba dapat direalisasikan sesuai target populasi ternak pada masing-masing kabupaten paling lambat tanggal 30 Desember 2015.
- 7) Perlu meyakini bahwa bagi peternak yang memiliki kartu ternak, akan mendapatkan fasilitas pelayanan standar minimal berupa kesehatan hewan. Registrasi ternak yang telah tercatat berdasarkan struktur populasi ternak, dapat mengetahui keberadaan ternak, jumlah rumah tangga peternak, mutasi ternak, stock ternak yang ada dan dapat digunakan sebagai dasar untuk penyusunan data dan informasi di lokasi SPR.
- 8) Rencana pelaksanaan penerapan kartu ternak tahun 2016, diusulkan alokasi anggaran untuk pembinaan dan pengembangan lokasi.

#### **5.3.2. Fungsi Budidaya Ternak**

- 1) Mengawal kegiatan prioritas agar tidak dilakukan penghematan anggaran.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan daerah dalam pengadaan ternak untuk kegiatan budidaya ternak.
- 3) Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa dilakukan lebih awal sehingga proses tender/lelangnya dapat selesai di awal tahun.

#### **5.3.3. Fungsi Pakan Ternak**

- 1) Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Berkualitas di Masyarakat.

- 2) Mengoptimalkan potensi hasil samping tanaman sebagai pakan ternak.

#### 5.3.4. Fungsi Keswan

- 1) Perlunya pengawasan, monitoring dan evaluasi di daerah yang terdapat kasus hewan sakit atau kematian ternak
- 2) Sosialisasi pada masyarakat akan bahaya penyakit rabies perlu ditingkatkan.
- 3) Monitoring dan surveillance dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan.
- 4) Perlunya dibentuk posko pengendalian dan penanggulangan penyakit rabies dan ceheck point untuk pengawasan lalu lintas hewan.
- 5) Upaya perbaikan penanganan gangguan reproduksi harus dilakukan secara menyeluruh baik yang menyangkut ketepatan program, SDM, fasilitas sarana dan prasarana, kelembagaan, system pelayanan serta perangkat pedoman sebagai acuan petugas dalam melakukan penanganan gangguan reproduksi di lapangan.

#### 5.3.5. Fungsi Kesmavet

#### 5.3.6. Fungsi Dukungan Manajemen

- 1) Melakukan perbaikan SAKIP pada aspek perencanaan yaitu : a) Penetapan target PK Eselon I agar dibuat secara kuantitatif, sehingga target dapat diukur dan dapat dinilai capaiannya; b) Penetapan target PK merupakan target yang akan dilaksanakan sesuai anggaran yang tercantum dalam DIPA Ditjen PKH, sehingga memudahkan pada saat penjabaran ke PK Eselon II dan target kinerja individu. Serta aspek pengukuran dengan melakukan penilaian/pengukuran atas capaian kinerja *outcome* pada Eselon I dan mengumpulkan data capaian kinerja rencana aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
- 2) Memperbaiki unsur-unsur pelayanan yang menjadi keluhan masyarakat yaitu : prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kedisiplinan pelaksanaan pelayanan dan kecepatan pelayanan. Selain itu komitmen para pimpinan atau pejabat pelayanan public serta dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kemajuan teknologi.

VI. LAMPIRAN

Lampiran 1. Perbandingan NTPT Tahun 2014-2015

No	Kelompok Dan Sub Kelompok	2014	2015	Laju %
	<i>Groups And Sub Group</i>			
1	<b>Indeks Harga Yang Diterima Petani (IT)/Indices Of Price Received By Farmers (IT)</b>	116,53	123,96	5,99
	Ternak Besar/ <i>Large Livestock</i>	118,13	125,83	6,12
	Ternak Kecil/ <i>Small Livestock</i>	114,61	121,88	5,97
	Unggas/ <i>Poultry</i>	114,38	120,92	5,41
	Hasil Ternak/ <i>The production of Livestock</i>	112,36	119,23	5,76
2	<b>Indeks Harga Yang Dibayar Petani (IB)/Indices Of Consumer Prices Paid By Farmers (IB)</b>	109,26	115,10	5,07
	Indeks Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household consumption indices</i>	114,03	122,18	6,67
	Bahan Makanan/ <i>Food</i>	119,17	129,36	7,88
	Makanan Jadi/ <i>Prepared Food</i>	110,15	117,38	6,16
	Perumahan/ <i>Housing</i>	110,24	117,78	6,40
	Sandang/ <i>Clothing</i>	110,33	117,25	5,91
	Kesehatan/ <i>Health</i>	107,92	113,79	5,16
	Pendidikan, Rekreasi & Olahraga/ <i>Education, Recreation &amp; Sport</i>	108,05	111,68	3,25
	Transportasi & Komunikasi/ <i>Transportation &amp; Communication</i>	115,03	122,28	5,93
	Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal/ <i>Cost of Production and Capital Formation Indices</i>	104,98	108,78	3,49
	Bibit/ <i>Seed</i>	105,94	109,25	3,03
	Obat-obatan & Pupuk/ <i>Drugs &amp; Fertilizer</i>	102,44	106,22	3,56
	Transportasi & Komunikasi/ <i>Transportation &amp; Communication</i>	104,04	107,23	2,97
	Sewa Lahan, Pajak & Lainnya/ <i>Hire of Land, Taxes &amp; Others</i>	118,03	126,78	6,90
	Penambahan Barang Modal/ <i>Capital Formation</i>	104,99	107,85	2,65
Upah Buruh Tani/ <i>Wage of farmworker</i>	106,47	109,87	3,09	
3	<b>Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)/Animal Husbandry Farmers Terms Of Trade (AFTT)</b>	106,65	107,69	0,97

Lampiran 2. Rincian Peraturan Menteri Pertanian dan Surat Keputusan Menteri Pertanian selama Tahun 2015.

a. Penyusunan Peraturan Menteri Pertanian.

Peraturan Menteri Pertanian yang telah ditandatangani sebanyak 15 Peraturan

- 1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02/Permentan/PD.410/1/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 139/Permentan/PD.410/12/2014 tentang Pemasukan Karkas Daging, Dan/Atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
- 2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 23/Permentan/PK.130/4/2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia
- 3) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 24/Permentan/PK.320/4/2015 tentang Pembukaan Pemasukan Unggas dan/atau Produk Unggas dari Negara Australia Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
- 4) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 373/Kpts/HK..030/F/04/2015 Tentang Pedoman Teknis Percepatan Peningkatan Populasi Melalui Gertak/Sinkronisasi Berahi Dan Optimalisasi Inseminasi Butatan (GBIB) Serta Penanggulangan Gangguan Reproduksi Pada Ternak Sapi Dan/Atau Kerbau APBN-P Tahun 2015
- 5) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 381/Kpts/SR.180/F/04/2015 tentang Pedoman Teknis Kegiatan Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Ternak Berkualitas APBN-P Tahun 2015
- 6) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 28/Permentan/PD.410/5/2015 tentang Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak
- 7) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/Permentan/KP.240/5/2015 tentang Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan.
- 8) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 101/Kpts/RC.210/F/06/2015 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Nasional Terpadu (Isiknas) APBN-P 2015
- 9) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 102/Kpts/PK.200/F/06/2015 Tentang Pedoman Teknis Kegiatan Pengembangan Budi daya Kambing atau Domba APBN – P Tahun 2015
- 10) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 42/Permentan/PP.040/7/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 108/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
- 11) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46/Permentan/PK.210/8/2015 tentang Pedoman Budidaya Sapi Potong Baik
- 12) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 48/Permentan/PK.440/8/2015 tentang Pemasukan Sapi Bakalan dan Sapi Indukan Ke

Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

- 13) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 57/Permentan/PK.110/11/2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan Ke dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia.
- 14) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 58/Permentan/PK.210/11/2015 tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
- 15) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan.

b. Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri.

Telah ditandatangani Keputusan Menteri Pertanian sebanyak 23 Keputusan

- 1) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Kpts/PD.410/1/2015 tentang Penetapan Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Sapi Perah, Domba, dan Babi Nasional
- 2) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/Kpts/SR.120/1/2015 tentang Penetapan Kabupaten Kebumen Sebagai Wilayah Sumber Bibit Sapi Peranakan Ongole
- 3) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 48/Kpts/SR.120/1/2015 tentang Kabupaten Gunung Kidul Sebagai Wilayah Sumber Bibit Sapi Peranakan Ongole
- 4) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 52/Kpts/PD.630/1/2015 Tentang Pernyataan Pulau Sumba Provinsi Nusa Tenggara Timur Bebas Dari Penyakit Hewan Keluron Menular (Brucellosis) Pada Sapi dan Kerbau
- 5) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 237/Kpts/PD.650/4/2015 Tentang Pernyataan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur Bebas dari Penyakit Hewan Keluron Menular (Brucellosia) Pada Sapi
- 6) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 238/Kpts/PD.650/4/2015 Tentang Pernyataan Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat Bebas Dari Penyakit Anjing Gila (Rabies)
- 7) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 239/Kpts/PD.650/4/2015 Pernyataan Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Bebas Dari Penyakit Anjing Gila (Rabies)
- 8) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 240/Kpts/PD.650/4/2015 Tentang Pernyataan Provinsi Kepulauan Riau Bebas Dari Penyakit Anjing Gila (Rabies)
- 9) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 241/Kpts/PD.650/4/2015 Tentang Pernyataan Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu Bebas Dari Penyakit Anjing Gila (Rabies)
- 10) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 249/Kpts/PK.320/4/2015 Tentang Penutupan Pemasukan Unggas dan Produk Unggas Dari Chinese-Taipe Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
- 11) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 361/Kpts/PK.040/6/2015 Tentang Penetapan Negara Kanada Sebagai Negara Asal Pemasukan Bahan Pakan Asal Unggas Ke Dalam Wilayah Negara

Republik Indonesia

- 12) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 352/Kpts/PK.040/6/2015 tentang Penetapan Kabupaten Banjarnegara Sebagai Wilayah Sumber Bibit Domba Batur
- 13) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 353/Kpts/PK.040/6/2015 tentang Penetapan Kabupaten Banjarnegara Sebagai Wilayah Sumber Bibit Kambing Peranakan Etawa
- 14) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 354/Kpts/PK.040/6/2015 tentang Penetapan Kabupaten Banyumas Sebagai Wilayah Sumber Bibit Kambing Peranakan Etawa
- 15) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 355/Kpts/PK.040/6/2015 tentang Penetapan Kabupaten Barito Kuala Sebagai Wilayah Sumber Bibit Sapi Bali
- 16) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 356/Kpts/PK.040/6/2015 tentang Penetapan Kabupaten Bojonegoro Sebagai Wilayah Sumber Bibit Sapi Peranakan Ongole
- 17) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 357/Kpts/PK.040/6/2015 tentang Penetapan Kabupaten Lampung Selatan Sebagai Wilayah Sumber Bibit Sapi Peranakan Ongole
- 18) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 358/Kpts/PK.040/6/2015 tentang Penetapan Galur Sapi Peranakan Ongole Kebumen
- 19) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 359/Kpts/PK.040/6/2015 tentang Penetapan Rumpun Kambing Saburai
- 20) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 360/Kpts/PK.040/6/2015 tentang Pelepasan Galur Itik Alabimaster-1 Agrinak
- 21) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 461/Kpts/PK.130/7/2015 Tentang Penetapan Negara Kanada Sebagai Negara Asal Pemasukan Bahan Pakan Asal Unggas Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
- 22) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 494/Kpts/PK.010/8/2015 Tentang Penutupan Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya Dari Negara Kanada Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
- 23) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 8002/Kpts/OT.050/F/09/2015 Tim Audit Negara dan Unit Usaha Pemasukan Daging Ruminansia Besar dari Negara India Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Lampiran 3. Jenis dan Jumlah Permohonan Rekomendasi tahun 2015

No	Jenis Permohonan	Bulan												Jumlah	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Bahan Asal Hewan	Masuk	222	381	431	417	341	405	-	-	-	-	-	-	2,197
		Selesai	212	273	361	364	286	321	-	-	-	-	-	-	
		Proses	10	108	70	53	55	84	-	-	-	-	-	-	
2	Obat Hewan	Masuk	906	894	976	1,150	864	798	724	783	837	892	708	599	10,131
		Selesai	751	733	408	951	35	558	601	660	691	616	419	243	
		Proses	155	161	568	199	829	240	123	123	146	276	287	356	
3	Hewan Kesayangan	Masuk	124	119	140	72	92	194	125	7	5	157	125	113	1,273
		Selesai	112	110	99	61	53	160	97	5	4	138	95	76	
		Proses	12	9	41	11	39	34	28	2	1	19	32	37	
4	Susu	Masuk	77	46	59	134	206	119	42	48	49	124	208	134	1,246
		Selesai	57	28	45	52	37	69	36	32	33	109	194	108	
		Proses	20	18	14	82	169	50	6	16	16	15	14	26	
5	Kulit dan Bulu	Masuk	102	46	44	46	42	46	24	24	26	28	65	190	683
		Selesai	85	37	23	31	13	29	23	19	24	23	50	134	
		Proses	17	9	21	15	29	17	1	5	2	5	15	56	
6	Telur dan Madu	Masuk	2	-	5	1	6	3	2	6	1	3	-	2	31
		Selesai	2	-	4	-	-	1	1	6	1	2	-	2	
		Proses	-	-	1	1	6	2	1	-	-	1	-	-	
7	Produk Hewan Non Pangan	Masuk	12	5	5	-	5	25	10	4	2	6	4	9	87
		Selesai	8	2	3	-	-	11	7	4	1	5	3	8	
		Proses	4	3	2	-	5	14	3	-	1	1	1	1	
8	Pakan Hewan Kesayangan	Masuk	15	4	9	8	25	16	21	7	5	7	11	12	140
		Selesai	12	-	7	5	10	15	14	5	3	7	6	8	
		Proses	3	4	2	3	15	1	7	2	2	-	5	4	
9	Daging dan Karkas	Masuk	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	26
		Selesai	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	
		Proses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Pakan Asal Tumbuhan	Masuk	615	549	646	721	570	506	461	460	551	508	488	532	6,607
		Selesai	539	508	596	637	391	479	444	442	528	483	440	410	
		Proses	76	41	50	84	179	27	17	18	23	25	48	122	
11	Bibit dan Semen	Masuk	3	4	11	6	10	10	9	13	5	2	2	1	76
		Selesai	2	1	11	3	8	9	3	8	-	-	-	-	
		Proses	1	3	-	3	2	1	6	5	5	2	2	1	
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		Masuk	2,078	2,048	2,326	2,555	2,161	2,122	1,418	1,378	1,481	1,727	1,611	1,592	22,497
		Selesai	1,780	1,692	1,557	2,104	833	1,552	1,226	1,207	1,285	1,383	1,207	989	16,915
		Proses	298	356	769	451	1,328	470	192	171	196	344	404	603	5,582

## VII. DAFTAR ISTILAAH

SAI	: Sistem Akuntansi Informasi
SIMAK-BMN	: Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara
SIMKA	: Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
SIKHNAS	: Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional
TLHP	: Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
SIMREK	: Sistem Informasi Rekomendasi
PDB	: Produk Domestik Bruto
PMDN	: Penguatan Modal Dalam Negeri
PMA	: Penguatan Modal Asing
NTP	: Nilai Tukar Petani
NTPP	: Nilai Tukar Petani Peternak
PUSVETMA	: Pusat Veterinaria Farna
PHM	: Penyakit Hewan Menular
PHMS	: Penyakit Hewan Menular Strategis
AI	: Avian influenza
PSDSK	: Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau
BBIB	: Balai Besar Inseminasi Buatan
BIBD	: Balai Inseminasi Buatan Daerah
BET	: Balai Embrio Transfer
TE	: Tranfer Embrio
KSO	: Kerja Sama Operasi
BLU	: Badan Layanan Umum
S/C	: Service per Conception
SDG	: Sumber Daya Genetik
CPU	: Calon Pejantan Unggul
PC	: Participated Cow
DC	: Daughter Cow
KP3RGT	: Komisi Penilaian Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak
SKLB	: Surat Keterangan Layak Bibit
VBC	: Village Breeding Center
IB	: Inseminasi Buatan
INKA	: Intensifikasi Kawin Alam
ULP	: Unit Layanan Pengadaan
PKB	: Pemeriksaan Kebuntingan
ATR	: Asisten Teknik Reproduksi
KKPE	: Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
CSR	: Corporate Social Responsibility
PKBL	: Program Kemitraan Bina Lingkungan
LSPro	: Lembaga Sertifikasi Produk
DOC	: Day Old Chick
DOD	: Day Old Duck
GPS	: Grand Parent Stock
PS	: Parent Stock
BPTP	: Balai Penerapan Teknologi Pertanian
GBP	: Good Breeding Practice
SNI	: Standar Nasional Indonesia
KUPS	: Kredit Usaha Pembibitan Sapi
PKP	: Perjanjian Kerjasama Pendanaan
ATS	: Asuransi Ternak Sapi
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan

P3	: Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
MBM	: Meat and Bone Meal
PFM	: Poultry Feather Meal
FA/FS	: Feed Additive / Feed Supplement
HPT	: Hijauan Pakan Ternak
PPBH	: Pertambahan Bobot Badan Harian
GERBANG PATAS	: Gerakan Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Ternak Berkualitas
FGD	: Forum Group Discussion
UPP	: Unit Pengolah Pakan
SKKNI	: Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
BSN	: Badan Standarisasi Nasional
CPPB	: Cara Pembuatan Pakan Yang Baik
PTM	: Persyaratan Teknis Minimal
PUPTP	: Pengembangan Usaha Penggemukan Tunda Potong
HPS	: Harga Perkiraan Sendiri
MBR	: Masyarakat Berpenghasilan Rendah
MP3EI	: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
KAUL	: Kawasan Agribisnis Unggas Lokal
SMD	: Sarjana Membangun Desa
APN	: Adhikarya Pangan Nusantara
UPPO	: Unit Pengolahan Pupuk Organik
SPSE	: Sistem Pengadaan Secara Elektronik
NVS	: National Veterinary Services
SE	: Septicemia Epizootic
Kiat Vetindo	: Kesiagaan Darurat Veteriner Indonesia
UPPAI	: Unit Pengendalian Penyakit Avian influenza
URC	: Unit Respon Cepat
WRD	: World Rabies Day
PBL	: Problem Based Learning
HPR	: Hewan Penular Rabies
PEP	: Pre Post Exposure Prophylaxis
ACCAHZ	: ASEAN Coordination Centre for Animal Health and Zoonoses
GF-TADs	: Global Framework for the Progressive Control of Transboundary <i>Animal Disease</i>
ASWGL	: ASEAN Sectoral Working Group on Livestock
RBT	: Rose Bengal Test
ND	: New Castle Disease
MG	: Mycoplasma Gallinarum
BVD	: Bovine Viral Diarrhea
IBR	: Infectious Bovine Rhinotracheitis
PPOH	: Penilai Pendaftaran Obat Hewan
KOH	: Komisi Obat Hewan
BBPMSOH	: Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
TMS	: Tidak Memenuhi Syarat
CPOHB	: Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik
BV	: Balai Veteriner
BBV	: Balai Besar Veteriner
RLN	: Regional Laboratory Network
OIE	: World Organisation for Animal Health
FAO	: Food and Agriculture Organization
AAHL	: Australian Animal Health Laboratory (AAHL)
WPRO	: World Health Organization Western Pacific Regional Office

USAID	: United States Agency for International Development
APP	: Surat Persetujuan Pemasukan
BPAH	: Bahan Pakan Asal Hewan
UPR	: Unit Perijinan dan Rekomendasi
RPH-R	: Rumah Potong Hewan Ruminansia
ASUH	: Aman, Sehat, Utuh dan Halal
RPH-U	: Rumah Potong Hewan Unggas
TpnU	: Tempat Penampungan Unggas
LPSE	: Layanan Pengadaan Secara Elektronik
LPPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
TPS	: Tempat Pengumpulan Susu
SSA	: Spektrofotometer Serapan Atom
BPMSPH	: Badan Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan
PHMU	: Penyakit Hewan Menular Utama
PMK	: Penyakit Mulut dan Kuku
BSE	: Bovine Spongiform Encephalopathy
RKT	: Rencana Kerja Tahunan
UAKPB	: Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang
UAPPB Es1	: Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1
SAK	: Sistem Akuntansi Keuangan
UAKPA	: Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
UAPPA Es1	: Unit Akuntansi Pembantun Pengguna Anggaran
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPSPM	: Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar
SPM	: Surat Perintah Membayar
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
UPR	: Unit Pelayanan Rekomendasi
PSPK	: Pendataan Sapi Perah, Potong dan Kerbau
LHP	: Laporan Hasil Pengawasan
SPI	: Sistem Pengendalian Intern
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
IKHS	: Instalasi Karantina Hewan Sementara
DAK	: Dana Alokasi Khusus